

# bab i

## pendahuluan

### 1.1 latar belakang masalah

pemenuhan kebutuhan dasar merupakan indikator penting kesejahteraan masyarakat, dan perumahan menempati posisi strategis di dalamnya. rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung secara fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang membentuk rasa aman, identitas, dan martabat individu. bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr), keterbatasan ekonomi kerap menjadi penghalang utama dalam mewujudkan hunian yang layak, sehingga persoalan perumahan tetap menjadi tantangan struktural dalam pembangunan sosial (sulthan et al., 2023).

tabel 1.1  
data rekapitulasi per desil kabupaten takalar tahun 2025

desil	keluarga	jiwa
desil 1	8.155	27.826
desil 2	8.333	28.827
desil 3	9.646	31.083
desil 4	10.809	34.577
desil 5	12.591	38.347
desil 6-10	52.248	167.545
belum pemeringkatan	3.896	6.653
non aktif	55	401
<b>total</b>	<b>105.733</b>	<b>335.259</b>

sumber: dinas sosial kabupaten takalar 2025

di kabupaten takalar, kondisi kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya ketimpangan yang masih signifikan. berdasarkan data dinas sosial kabupaten takalar tahun 2025, pengelompokan masyarakat dilakukan menggunakan sistem desil, yaitu pembagian tingkat kesejahteraan menjadi sepuluh kelompok (desil 1 sampai desil 10) berdasarkan urutan tingkat sosial ekonomi dari yang terendah hingga tertinggi.

desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau 10% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terbawah. desil 2 adalah kelompok 10% berikutnya dengan kondisi sedikit lebih baik dari desil 1, namun masih tergolong sangat rentan. desil 3 dan desil 4 termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menuju menengah bawah, yang masih menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar tertentu. desil 5 dan desil 6 berada pada kategori menengah, dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih stabil dibandingkan empat desil sebelumnya, meskipun belum sepenuhnya tergolong sejahtera. sementara itu, desil 7 sampai 10 umumnya dikategorikan sebagai

kelompok menengah atas hingga atas.

berdasarkan data tersebut, sebanyak 16.488 keluarga berada pada kelompok desil 1 dan 2, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. selain itu, terdapat 9.646 keluarga pada desil 3, 10.809 keluarga pada desil 4, serta 12.591 keluarga pada desil 5, yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berada pada kategori rentan dan menengah bawah. kelompok-kelompok ini masih berpotensi mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap rumah layak huni.

meskipun sebagian besar masyarakat berada pada kelompok desil 6 hingga 10 yang relatif lebih stabil secara ekonomi, keberadaan kelompok miskin dan rentan dalam jumlah yang cukup besar menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan dan perumahan masih menjadi isu nyata di tingkat lokal. oleh karena itu, intervensi kebijakan perumahan yang tepat sasaran perlu mempertimbangkan distribusi kesejahteraan berdasarkan klasifikasi desil tersebut agar program bantuan dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

tabel 1.2 data rtlh kecamatan pattallassang tahun 2025

no.	kecamatan	kelurahan / desa	jumlah rtlh
1.	pattallassang	sabintang	77 rumah
2.	pattallassang	kalabbirang	69 rumah
3.	pattallassang	pallantikang	64 rumah
4.	pattallassang	salaka	32 rumah
5.	pattallassang	bajeng	32 rumah
6.	pattallassang	maradekayya	64 rumah
7.	pattallassang	pappa	89 rumah
8.	pattallassang	pattallassang	94 rumah
9.	pattallassang	sombala bella	80 rumah
<b>total</b>			<b>601 rumah</b>

sumber: dinas pu kabupaten takalar 2025

kerentanan tersebut tercermin secara konkret dalam kondisi perumahan. di kecamatan pattallassang tercatat 601 rumah tidak layak huni (rtlh) yang tersebar di sembilan desa dan kelurahan, dengan jumlah tertinggi berada di kelurahan pattallassang, desa pappa, dan desa sombala bella. data ini memperlihatkan bahwa keterbatasan daya dukung ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan hunian layak, sekaligus menjadi dasar bagi pentingnya intervensi kebijakan perumahan yang tepat sasaran.

sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah mengembangkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) sebagai salah satu kebijakan strategis dalam upaya pengurangan rtlh. program ini dirancang tidak hanya untuk memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga untuk mendorong pemberdayaan

masyarakat melalui konsep swadaya. bantuan yang diberikan bersifat stimulan, sehingga masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif melalui kontribusi tenaga, waktu, maupun sumber daya lain sesuai dengan kemampuan masing-masing.

namun, dalam praktik pelaksanaannya, konsep “swadaya” tidak selalu dipahami dan dijalankan sesuai dengan maksud kebijakan. bagi pemerintah, swadaya dimaknai sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. sebaliknya, bagi sejumlah kelompok penerima bantuan yang berada pada kondisi ekonomi terbatas, swadaya justru dipersepsikan sebagai beban tambahan yang sulit dipenuhi. perbedaan makna ini menjadi semakin kompleks ketika masyarakat berada pada situasi ekonomi rentan, sebagaimana tercermin dalam data desil kesejahteraan dan tingginya jumlah rtlh di wilayah penelitian yaitu di kelurahan pattallassang.

dalam konteks di kelurahan pattallassang, pelaksanaan bpsps memperlihatkan adanya dinamika sosial yang menarik, di mana makna swadaya dibentuk melalui interaksi antara penerima bantuan, pendamping lapangan (fasilitator), aparat desa/kelurahan, dan lingkungan sosial sekitar. melalui proses interaksi tersebut, swadaya dapat dimaknai sebagai simbol kemandirian, tanggung jawab, dan harga diri, tetapi juga dapat dimaknai sebagai formalitas administratif atau bahkan sebagai simbol keterbatasan dan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. makna yang berbeda ini secara langsung memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, pola keterlibatan dalam pembangunan rumah, serta relasi sosial antarwarga.

berbagai penelitian sebelumnya mengenai program bantuan stimulan perumahan swadaya (bpsps) umumnya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan, efektivitas distribusi bantuan, dan capaian fisik pembangunan rumah. (saidatul, 2022) menyatakan bahwa (keberhasilan program bantuan stimulan perumahan swadaya diukur dari jumlah rumah yang berhasil direnovasi di kabupaten tabalong). sementara itu, (zulfachri, 2023) menegaskan bahwa (kendala utama dalam implementasi bpsps terletak pada aspek administratif, khususnya kelengkapan dokumen dan kapasitas aparatur desa).

penelitian-penelitian tersebut cenderung memandang bpsps sebagai kebijakan yang bersifat objektif dan homogen, sehingga keberhasilannya dapat diukur secara kuantitatif. padahal, dalam kebijakan berbasis partisipasi masyarakat, keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesesuaian antara makna kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dengan makna yang dikonstruksi oleh masyarakat di tingkat lokal.

oleh karena itu, penelitian mengenai makna swadaya dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (bpsps) menjadi penting untuk dilakukan. dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan perspektif interaksionisme simbolik, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana makna swadaya dikonstruksi,

dinegosiasikan, dan dimodifikasi melalui interaksi sosial di kalangan penerima bantuan. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian sosiologi pembangunan, serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan perumahan yang lebih peka terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, sehingga tujuan pemberdayaan dalam program bsps dapat tercapai secara lebih substansial dan berkelanjutan.

selain itu, pentingnya penelitian ini juga terletak pada kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan antara perspektif pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan realitas masyarakat sebagai pelaksana di lapangan. perbedaan pemahaman terhadap makna *swadaya* bukan hanya memengaruhi efektivitas program, tetapi juga membentuk relasi kuasa, identitas, dan solidaritas sosial dalam komunitas. jika makna yang dibangun masyarakat bertentangan dengan maksud awal kebijakan, maka implementasi program dapat kehilangan esensinya sebagai upaya pemberdayaan. penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian interaksionisme simbolik, serta kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi komunikasi dan pendampingan program yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap dinamika lokal. dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki urgensi sosial yang tinggi dalam upaya mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **1.1.1 penelitian terdahulu**

penelitian terdahulu adalah rangkuman atau analisis literatur yang berkaitan dengan suatu bidang atau topik tertentu. keberadaan penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam sebuah penelitian karena dapat memperkuat kajian ilmiah serta berfungsi sebagai perbandingan dalam analisis yang dilakukan. berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dikaji oleh peneliti:

*pertama*, andika et al. (2023) dalam artikel berjudul “*dampak program bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap kondisi sosial ekonomi penerima bantuan (studi kasus desa padi, kecamatan tulakan, kabupaten pacitan)*” mengkaji peran program bsps dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni, memperbaiki kondisi lingkungan, serta memberikan dampak positif pada aspek sosial dan ekonomi penerima bantuan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan kategori kemiskinan ekstrem. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bsps berhasil memperbaiki struktur bangunan dan kualitas material rumah sehingga berdampak positif terhadap kesehatan dan kenyamanan penerima bantuan, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui praktik gotong royong dan kontribusi tenaga maupun materi. meskipun demikian, dampak ekonomi yang dihasilkan belum signifikan karena masih dihadapkan pada keterbatasan dana dan pendapatan penerima bantuan,

meskipun program ini turut membuka peluang kerja di sekitar lokasi pelaksanaan.

*kedua*, zulfachry et al. (2023) dalam artikel berjudul "*implementasi kebijakan program bantuan stimulan perumahan swadaya*" mengkaji pelaksanaan program bps dengan menyoroti peran pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan administrasi serta implementasi program untuk meningkatkan kualitas permukiman. penelitian ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan faktor sosial budaya seperti gotong royong dalam menunjang keberhasilan program, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, antara lain ketatnya persyaratan penerima serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berpihak kepada masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang, sehingga program bps dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, meskipun masih terdapat kendala teknis yang dapat diantisipasi melalui pelibatan aktif masyarakat dan stakeholder terkait.

*ketiga*, saidatul et al. (2022) dalam artikel berjudul "*program bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) di kabupaten tabalong: sebuah evaluasi*" mengevaluasi pelaksanaan program bps di kabupaten tabalong dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. penelitian ini menilai berbagai aspek pelaksanaan program melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu kepala dinas perkimtan dan kepala bidang perumahan kabupaten tabalong. hasil penelitian menunjukkan bahwa program bps dinilai efektif karena target perbaikan rumah berhasil direalisasikan, namun besaran bantuan sebesar rp17.500.000 masih belum mencukupi untuk perbaikan rumah secara memadai. selain itu, ditemukan permasalahan berupa pemerataan bantuan yang belum optimal, adanya penerima bantuan lebih dari satu kali, serta lemahnya pengawasan pelaksanaan yang berdampak pada kualitas perbaikan rumah dan ketepatan sasaran program.

*keempat*, pambuditama dan priyanto (2023) dalam artikel berjudul "*analisis faktor risiko program bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) untuk penanganan kemiskinan ekstrem (pke) desa trimulyo kecamatan guntur kabupaten demak*" menganalisis berbagai faktor risiko yang berpotensi menghambat pelaksanaan program bps dalam upaya meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni berbasis partisipasi masyarakat. hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17 faktor risiko yang diidentifikasi, sebagian besar berada pada kategori risiko rendah berdasarkan metode iso 31000, dengan risiko utama meliputi faktor cuaca, tradisi dan budaya lokal, serta keterbatasan tenaga kerja. namun demikian, ditemukan pula risiko tinggi terkait keterbatasan sumber daya penerima bantuan yang mendorong mereka menjual aset atau menggadaikan barang berharga, meskipun secara umum pelaksanaan program bps di desa trimulyo dinilai cukup matang dan berjalan dengan pengelolaan risiko yang relatif baik.

*kelima*, Julianto (2020) dalam artikel berjudul “*partisipasi masyarakat dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di desa koto baru kecamatan koto baru*” mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program bps dengan menyoroti keterlibatan warga pada setiap tahapan program, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara umum masih tergolong rendah, di mana penerima bantuan relatif aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, namun masyarakat non-penerima cenderung kurang terlibat. Pada tahap pemanfaatan hasil, partisipasi dinilai baik karena penerima bantuan mampu menjaga dan memanfaatkan rumah hasil program dengan optimal. Faktor pendorong partisipasi adalah adanya bantuan yang meringankan beban ekonomi masyarakat, sedangkan faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan swadaya dana akibat kondisi ekonomi warga yang sebagian besar berpenghasilan rendah dan bekerja sebagai buruh tani.

*keenam*, Fenina (2021) dalam artikel berjudul “*evaluasi program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di desa karya tunas jaya kabupaten indragiri hilir*” mengevaluasi pelaksanaan program bps dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah dan memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan menggunakan empat indikator utama, yaitu input, proses, output, dan outcome. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program tergolong “cukup baik” karena mampu mencapai target yang ditetapkan berdasarkan keempat indikator tersebut. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan program, seperti keterlambatan pengiriman bahan bangunan, keterbatasan tenaga tukang, kurangnya kerja sama masyarakat, serta kebutuhan dana tambahan akibat bahan bangunan yang tidak sesuai permintaan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar penerima bantuan, penguatan sosialisasi mengenai pentingnya swadaya, serta pelaksanaan monitoring secara rutin guna meningkatkan efektivitas program bps di masa mendatang.

*ketujuh*, Aprianus (2021) dalam artikel berjudul “*perubahan sosial masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya: studi di desa Nanga Dangan Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu*” mengkaji perubahan sosial yang dialami masyarakat penerima bps, dengan fokus pada perubahan kondisi fisik rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni serta perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat setelah menerima bantuan. Penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan dalam pelaksanaan program, terutama keterbatasan bantuan yang mengharuskan masyarakat menyediakan dana tambahan melalui pinjaman atau penjualan aset untuk menutupi biaya upah tukang dan pengangkutan bahan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bps mampu memotivasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki kondisi rumah mereka sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya hunian layak dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Meskipun bantuan yang diberikan berupa bahan

bangunan dan uang tunai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan, secara umum program bsps dinilai memberikan dampak positif terhadap kondisi fisik rumah dan dinamika sosial masyarakat penerima bantuan, meskipun masih menghadapi berbagai kendala di tingkat pelaksanaan.

*kedelapan*, indriyani et al. (2020) dalam artikel “konstruksi makna perempuan pergerakan” menjelaskan bahwa perempuan anggota kopri di kabupaten karawang memaknai pergerakan perempuan sebagai proses pembentukan identitas dan peran sosial yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif perubahan sosial. melalui pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi serta analisis menggunakan teori konstruksi realitas sosial dan interaksi simbolik, penelitian ini menunjukkan bahwa makna pergerakan dibangun dari pengalaman hidup dan interaksi sosial perempuan dalam menghadapi stigma serta norma konservatif yang membatasi peran perempuan pada ranah domestik. hasil penelitian mengungkapkan dua makna utama pergerakan perempuan, yaitu perempuan sebagai pemberi manfaat bagi orang lain melalui berbagai aktivitas sosial yang berdampak positif bagi masyarakat, serta perempuan sebagai ujung tombak peradaban yang dipahami sebagai pelopor dan penggerak transformasi sosial dalam menentukan arah perubahan dan masa depan bangsa.

*kesembilan*, dirgantara dan yuningsih (2016) dalam artikel “konstruksi makna bandung kota kreatif” mengkaji bagaimana makna bandung sebagai kota kreatif dikonstruksi melalui interaksi sosial antara aktor pemerintah kota bandung dan masyarakat sipil dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi. hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi makna tersebut berlangsung melalui tiga tahap, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, di mana pada tahap eksternalisasi para aktor melakukan pemetaan masalah dan blusukan untuk memahami kondisi riil masyarakat, pada tahap objektivasi dilakukan fasilitasi, pelatihan, pengembangan ide, serta pelaksanaan berbagai kegiatan kreatif seperti kampung kreatif dan mural, sedangkan pada tahap internalisasi konsep kota kreatif diterima dan dihayati oleh masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepercayaan diri dan penerimaan kolektif, sehingga makna bandung sebagai kota kreatif menjadi realitas sosial yang dibangun dan disepakati bersama.

penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan memiliki kegunaan penting dalam penelitian ini sebagai landasan teoritis dan empiris untuk memahami pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di masyarakat. secara umum, penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai dampak sosial, ekonomi, partisipasi masyarakat, evaluasi kebijakan, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan program bsps. selain itu, penelitian-penelitian tersebut membantu peneliti melihat bagaimana konsep swadaya dipraktikkan dalam bentuk gotong royong, kontribusi tenaga, dana, dan material, meskipun belum banyak yang mengkaji makna swadaya secara mendalam dari perspektif subjektif masyarakat penerima. oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan temuan-temuan terdahulu

sebagai pembanding dan penguat analisis, sekaligus untuk mengisi celah penelitian (*research gap*) dengan menitikberatkan pada konstruksi makna swadaya yang dipahami dan dialami oleh masyarakat dalam program bsps, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual. secara ringkas penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

tabel 1.3 penelitian terdahulu

no	nama peneliti (tahun)	judul penelitian	temuan	metode
1	andika maiqirlana, syamsul huda dan anisa fitria utami (andika et al, 2023)	“dampak program bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap kondisi sosial ekonomi penerima bantuan (studi kasus ds. padi kec. tulakan kab. pacitan”	temuan penelitian menunjukkan bahwa program bsps meningkatkan kualitas rumah, keamanan, partisipasi masyarakat, dan kondisi sosial lingkungan penerima, meski masih terkendala dana dan belum ada peningkatan pendapatan signifikan.	penelitian ini menggunakan <b>metode deskriptif kualitatif</b> dengan teknik <b>wawancara, observasi, dan dokumentasi</b> untuk menggambarkan perubahan sosial ekonomi penerima program bsps di <b>desa padi, kecamatan tulakan, kabupaten pacitan</b> sebelum dan sesudah menerima bantuan.
2	zulfachry, zul fadli, zul rachmat, zh nurul kusumawardhani dan nurhidayah (zulfachry et al, 2023)	“implementasi kebijakan program bantuan stimulan perumahan swadaya”	temuan penelitian menunjukkan bahwa program bsps di lalabata rilau berjalan cepat dan efektif berkat dukungan ekonomi masyarakat dan budaya gotong royong, meski terkendala persyaratan ketat serta keterbatasan sdm dan sarana.	penelitian ini menggunakan <b>metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif</b> , yang menggambarkan pelaksanaan kebijakan program bsps secara mendalam. data dikumpulkan melalui <b>wawancara, observasi, dan telaah dokumen</b> , dengan peneliti sebagai instrumen utama.
3	ach. apriyanto romadhan, saidatul habibah, iradhad taqwa sihid dan	“program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kabupaten	program bsps di kabupaten tabalong dinilai efektif karena berhasil mencapai target perbaikan rumah, namun	penelitian ini menggunakan <b>metode deskriptif kualitatif</b> dengan teknik pengumpulan data

	muhammad kamil (romadhan, 2022)	tabalong : sebuah evaluasi”	dana sebesar rp17.500.000 masih kurang untuk menghasilkan rumah yang benar-benar layak. pemerataan bantuan belum optimal, bahkan ada penerima yang mendapat bantuan lebih dari satu kali. selain itu, pengawasan di lapangan masih lemah sehingga kualitas hasil perbaikan belum maksimal dan proses penetapan penerima bantuan masih menghadapi berbagai kendala.	melalui <b>wawancara, observasi, dan dokumentasi</b> , untuk mengevaluasi pelaksanaan program bps di kabupaten tabalong berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan william dunn.
4	altadhy pambuditama dan budi priyanto (pambuditama dan priyanto, 2023)	“analisis faktor risiko program bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) untuk penanganan kemiskinan ekstrem (pke) desa trimulyo kecamatan guntur kabupaten demak”	temuan penelitian menunjukkan terdapat 17 faktor risiko dalam pelaksanaan program bps di desa trimulyo, dengan mayoritas risiko berada pada kategori rendah. risiko utama meliputi cuaca buruk, tradisi dan budaya lokal, serta kurangnya tenaga kerja. risiko tinggi terkait keterbatasan sumber daya penerima bantuan menyebabkan mereka harus menjual atau menggadaikan aset. selain itu, komunikasi yang kurang lancar dan pencairan dana yang lama juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program.	metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah <b>metode campuran (mixed method)</b> — gabungan antara <b>kualitatif dan kuantitatif</b> . data dikumpulkan melalui <b>wawancara terstruktur, studi literatur, dan dokumentasi</b> , kemudian dianalisis dengan <b>pendekatan manajemen risiko berbasis iso 31000:2018</b> , yang mencakup tahap <b>identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko</b>
5	pebi julianto (julianto, 2020)	“partisipasi masyarakat dalam	penelitian menemukan bahwa partisipasi	penelitian ini menggunakan <b>pendekatan kualitatif</b>

		program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di desa koto baru kecamatan koto baru (2020)”	masyarakat dalam program bsp di desa koto baru masih rendah. penerima bantuan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan, tetapi warga non-penerima kurang terlibat. masyarakat memanfaatkan hasil bantuan dengan baik, namun partisipasi terhambat oleh minimnya swadaya dana karena sebagian besar berpenghasilan rendah.	untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam program bsp secara mendalam. data dikumpulkan melalui <b>wawancara, observasi, dan dokumentasi</b> terhadap 9 informan yang dipilih menggunakan <b>teknik purposive sampling</b> . data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui proses <b>reduksi data, penyajian data, triangulasi, dan penarikan kesimpulan</b> .
6	fenina eliza, nurmasari dan zulkifli (eliza, 2021)	“evaluasi program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di desa karya tunas jaya kabupaten indragiri hilir”.	program bsp di desa karya tunas jaya tergolong "cukup baik" dengan pencapaian indikator input, proses, output, dan outcome. namun, terdapat kendala seperti keterlambatan pengiriman bahan bangunan, tenaga tukang terbatas, dan bahan bangunan yang tidak sesuai permintaan. selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan sosialisasi agar program berjalan lebih efektif di masa depan.	penelitian ini menggunakan <b>metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif</b> . data dikumpulkan melalui <b>wawancara dan kuesioner</b> kepada pihak terkait seperti <b>kasatker penyediaan perumahan, pemerintah desa, fasilitator lapangan, dan masyarakat penerima bsp</b> . analisis dilakukan secara <b>deskriptif kuantitatif</b> dengan menggunakan <b>persentase</b> untuk menilai empat indikator utama program: <b>input, proses, output, dan outcome</b> .
7	p. kasianus aprianus (aprianus, 2021)	“perubahan sosial masyarakat penerima bantuan stimulan	penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di desa	metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <b>metode kualitatif dengan pendekatan</b>

		perumahan swadaya : studi di desa nanga dangkan kecamatan silat hulu kabupaten kapuas hulu”	nanga dangkan berhasil memotivasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki kondisi rumah mereka dari tidak layak huni menjadi layak huni. selain itu, terdapat perubahan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat sebagai dampak dari program ini, meskipun mereka menghadapi kendala seperti kebutuhan tambahan dana untuk upah tukang dan pengangkutan bahan bangunan.	<b>deskriptif.</b> peneliti menentukan informan secara <b>purposive sampling</b> , dan data dikumpulkan melalui <b>observasi, wawancara, dan dokumentasi.</b> data yang diperoleh kemudian dianalisis secara <b>deskriptif kualitatif</b> menggunakan tahapan <b>reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi</b> (model miles & huberman).
8	pitri indriyani, eka yusuf dan muhammad ramdhani (indriyani et al, 2020)	“konstruksi makna perempuan pergerakan”	penelitian ini menunjukkan bahwa anggota kopri di kabupaten karawang memaknai pergerakan perempuan sebagai wadah untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan menjadi ujung tombak peradaban. makna tersebut lahir dari pengalaman mereka dalam aksi kemanusiaan seperti penggalangan dana, menjadi relawan bencana, hingga membuka ruang baca bagi warga. motif keterlibatan mereka pun beragam, mulai dari menjalankan amanah guru, keinginan mencoba hal baru, hingga kebutuhan untuk berkontribusi sosial. namun demikian, perempuan pergerakan	metode yang digunakan dalam penelitian <b>“konstruksi makna perempuan pergerakan”</b> adalah <b>metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.</b> pendekatan ini digunakan untuk memahami <b>pengalaman, motif, dan makna</b> yang dialami langsung oleh para informan perempuan kopri di karawang

			masih menghadapi stigma dan pandangan konservatif yang membatasi peran mereka di ranah publik.	
9	khantia ridwan dirgantara dan ani yuningsih (dirgantara dan yuningsih 2016)	“konstruksi makna bandung kota kreatif “	temuan penelitian menunjukkan bahwa para aktor dengan latar belakang berbeda memiliki motif beragam (sebab, agar, untuk) yang memengaruhi tindakan sosial mereka (rasional instrumental, berorientasi nilai, tradisional). mereka menjalankan langkah strategis konstruksi makna bandung sebagai kota kreatif melalui tiga tahap: eksternalisasi (pemetaan masalah, blusukan), objektivasi (fasilitasi, pelatihan, pengembangan ide, kegiatan kreatif), dan internalisasi (peningkatan kepercayaan diri dan penerimaan masyarakat). proses ini membentuk realitas sosial bandung sebagai kota kreatif melalui interaksi dan tindakan sosial para aktor.	metode yang digunakan dalam penelitian “ <b>konstruksi makna bandung kota kreatif</b> ” adalah <b>metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi</b> . data dikumpulkan melalui <b>observasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan internet searching</b> , dengan pemilihan informan menggunakan <b>purposive sampling</b>

*sumber: hasil olahan data sekunder tahun 2025*

kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap makna swadaya dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) sebagaimana dikonstruksi oleh masyarakat penerima bantuan. berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya memandang swadaya sebagai konsep normatif dan teknis dalam kebijakan perumahan, penelitian ini memposisikan swadaya sebagai realitas sosial yang dimaknai secara subjektif dan dinegosiasikan melalui interaksi sosial. dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan kerangka teori interaksionisme simbolik herbert blumer, penelitian ini melihat swadaya tidak hanya sebagai bentuk

partisipasi ideal, tetapi sebagai pengalaman sosial yang dipengaruhi oleh relasi, tafsir, dan keterbatasan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

penelitian ini mengisi kekosongan kajian dengan menempatkan masyarakat penerima bps sebagai subjek utama dalam pembentukan makna swadaya. makna tersebut terbentuk melalui interaksi antara penerima bantuan, pendamping program, dan aparat desa dalam konteks sosial dan budaya lokal. dengan mengungkap bagaimana dan mengapa swadaya dimaknai secara beragam, baik sebagai simbol tanggung jawab dan gotong royong maupun sebagai beban ekonomi dan kewajiban administratif. penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi kajian sosiologi kebijakan serta masukan praktis bagi perumusan kebijakan perumahan yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap realitas sosial masyarakat.

## **1.2 rumusan masalah**

berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait makna swadaya dalam program bps. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. bagaimana masyarakat memaknai swadaya pada program bps di kelurahan pattallassang ?
2. bagaimana makna swadaya yang dibangun masyarakat berimplikasi pada implementasi program bps di kelurahan pattallassang ?

## **1.3 tujuan penelitian**

1. menggali makna subyektif yang diberikan masyarakat terhadap konsep swadaya pada program bps
2. menganalisis bagaimana makna swadaya yang dibangun masyarakat memengaruhi partisipasi, pengelolaan sumber daya, dan hasil pelaksanaan program bps.

## **1.4 manfaat penelitian**

- a. manfaat teoritis
  1. memperkaya kajian sosiologi pembangunan dengan menjelaskan bagaimana masyarakat memaknai konsep swadaya serta penerapannya dalam teori interaksionisme simbolik.
  2. memperkaya kajian sosiologi pembangunan dengan menjelaskan pengaruh makna swadaya masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan program bps.
- b. manfaat praktis
  1. menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan mekanisme swadaya agar

- lebih sesuai dengan kemampuan masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan program bps secara merata.
2. memberikan masukan untuk penyempurnaan mekanisme swadaya agar lebih sesuai dengan kemampuan masyarakat dan menghasilkan hunian yang layak secara merata.

## 1.5 kerangka konsep

penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana makna “swadaya” dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) dikonstruksi dan dinegosiasikan oleh masyarakat penerima bantuan. kerangka konsep penelitian ini didasarkan pada teori interaksionisme simbolik herbert blumer, yang menekankan bahwa tindakan sosial manusia berlandaskan pada makna yang dibentuk melalui proses interaksi sosial dan interpretasi subjektif (blumer, 1969; elbadiansyah, 2014).

dalam konteks bps, swadaya tidak dipahami sebagai konsep yang bersifat tetap dan tunggal sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan pemerintah, melainkan sebagai simbol sosial yang dimaknai secara beragam oleh masyarakat penerima bantuan. makna tersebut menjadi dasar bagi tindakan sosial masyarakat, seperti tingkat partisipasi, bentuk keterlibatan dalam pembangunan rumah, serta sikap terhadap program bantuan. dengan demikian, cara masyarakat bertindak dalam program bps sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka memaknai konsep swadaya itu sendiri.

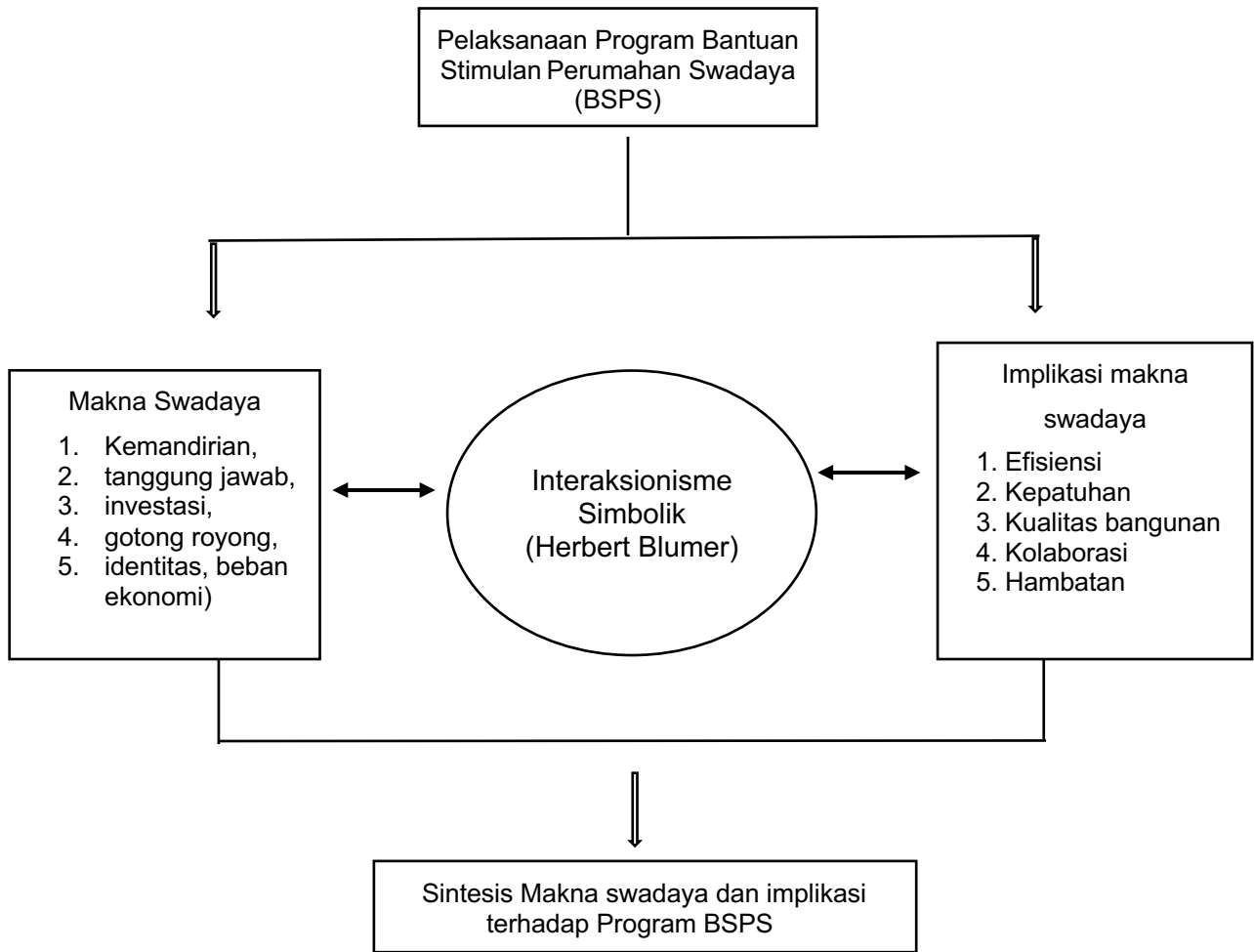
sesuai dengan premis pertama interaksionisme simbolik, individu bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimilikinya. dalam penelitian ini, penerima bantuan tidak serta-merta menjalankan program sesuai petunjuk formal, tetapi terlebih dahulu menafsirkan makna swadaya berdasarkan pengalaman hidup, kondisi ekonomi, dan persepsi pribadi mereka. makna tersebut dapat mendorong partisipasi aktif ketika swadaya dimaknai sebagai gotong royong dan tanggung jawab, tetapi juga dapat menghambat keterlibatan ketika swadaya dipersepsikan sebagai beban atau kewajiban administratif.

premis kedua menjelaskan bahwa makna muncul melalui interaksi sosial. makna swadaya dalam bps dibentuk melalui interaksi antara penerima bantuan dengan pendamping program, aparat desa, tetangga, dan tokoh masyarakat. melalui komunikasi, arahan, dan pengalaman bersama, masyarakat membangun pemahaman kolektif tentang apa yang dimaksud dengan swadaya. oleh karena itu, makna swadaya bersifat intersubjektif dan dipengaruhi oleh dinamika di tingkat lokal.

selanjutnya, premis ketiga menegaskan bahwa makna tidak bersifat final, melainkan terus dimodifikasi melalui proses interpretasi. dalam praktik bps, penerima bantuan secara reflektif menyesuaikan makna swadaya dengan situasi yang mereka hadapi, seperti keterbatasan ekonomi, tekanan sosial, atau ekspektasi

dari pendamping dan aparat desa. proses interpretasi ini menyebabkan makna swadaya dapat berubah seiring waktu, dari simbol gotong royong menjadi beban ekonomi, atau sebaliknya.

berdasarkan kerangka ini, peneliti memandang program bsps sebagai arena interaksi sosial tempat berbagai aktor berperan dalam produksi dan negosiasi makna. kerangka konsep ini menempatkan interaksi sosial sebagai proses utama, makna swadaya sebagai pusat analisis, dan tindakan masyarakat sebagai konsekuensi dari makna yang dikonstruksi. dengan demikian, kebijakan perumahan tidak dipahami semata sebagai intervensi teknis, tetapi sebagai proses sosial yang sarat makna dan relasi sosial.



**gambar 1.1 kerangka berpikir**

## 1.6 daftar pustaka

- altadhy, p., & priyanto, b. (2023). *analisis faktor risiko program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) untuk penanganan kemiskinan ekstrem (pke) desa trimulyo, kecamatan guntur, kabupaten demak. prosiding seminar nasional teknik sipil ums, 2023*, 1–8
- andika, m., huda, s., & utami, a. f. (2023). dampak program bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap kondisi sosial ekonomi penerima bantuan: studi kasus desa padi, kecamatan tulakan, kabupaten pacitan. *jurnal ilmiah wahana pendidikan*, 5(2), 84–94.
- aprianus. (2021). perubahan sosial masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya: studi di desa nanga dangkan kecamatan silat hulu kabupaten kapuas hulu. *jurnal sosiologi nusantara*, 7(2), 112–124.
- blumer, h. (1969). *symbolic interactionism: perspective and method. university of california press.*
- dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kabupaten takalar. (2025). *data rumah tidak layak huni (rtlh) kabupaten takalar tahun 2025*. takalar: dinas pu kabupaten takalar.
- dinas sosial kabupaten takalar. (2025). *data rekapitulasi per desil kabupaten takalar tahun 2025*. takalar: dinas sosial kabupaten takalar.
- dirgantara, a. r., & yuningsih, y. (2016). konstruksi makna bandung kota kreatif. *jurnal kajian komunikasi*, 4(2), 129–140.
- fenina, d., ardiansyah, a., & syafriadi. (2021). evaluasi program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di desa karya tunas jaya kabupaten indragiri hilir. *jurnal ilmu administrasi dan studi pembangunan*, 12(2), 123–135.
- indriyani, l., sari, n. p., & wibowo, a. (2020). konstruksi makna perempuan pergerakan. *jurnal sosiologi reflektif*, 14(1), 88–101.
- julianto, p. (2020). partisipasi masyarakat dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di desa koto baru kecamatan koto baru. *qawwam: the leader's writing*, 1(2), 31 desember 2020.
- saidatul, s., lestari, e. r., & syahrir, s. (2022). program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kabupaten tabalong: sebuah evaluasi. *jurnal pembangunan dan pemerataan daerah*, 3(1), 1–11.

sulthan, m., yusri, m. y. a. r., & ardiputra, s. (2023). analisis komunikasi politik kepala desa buttu pamboang dalam menerapkan sustainable development goals (sdg's) desa dalam mengatasi kemiskinan. jurnal pendidikan dan konseling (jpdk), 5(1), 73–83.

umiarso, & elbadiansyah. (2014). interaksionisme simbolik dari era klasik hingga modern. jakarta: rajagrafindo persada.

zulfachry, m., pasande, a. a., & abbas, m. (2023). implementasi kebijakan program bantuan stimulan perumahan swadaya. jurnal perencanaan wilayah dan kota, 14(1), 37–48.

## **bab ii**

### **masyarakat memaknai swadaya pada program bsps di kelurahan pattallassang**

#### **2.1 abstrak**

penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai konsep swadaya dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kelurahan pattallassang, kabupaten takalar. fokus penelitian diarahkan pada cara penerima bantuan menginterpretasikan swadaya, baik sebagai bentuk gotong royong, kemandirian, maupun sebagai beban tambahan dalam proses pembangunan rumah. metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. informan penelitian terdiri dari penerima bantuan, aparat kelurahan, fasilitator program, serta pejabat terkait. hasil penelitian menunjukkan bahwa makna swadaya tidak tunggal, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, nilai budaya, serta interaksi antarwarga dan pemerintah. sejumlah kelompok penerima bantuan melihat swadaya sebagai peluang pemberdayaan yang menumbuhkan solidaritas sosial, sementara kelompok penerima lainnya menganggapnya sebagai beban karena keterbatasan sumber daya. perbedaan makna ini memengaruhi tingkat partisipasi dan keberhasilan program. penelitian ini menegaskan pentingnya memperhatikan aspek makna sosial dalam kebijakan perumahan agar program lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan konteks lokal.

**kata kunci:** swadaya, program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps), pemaknaan, interaksi sosial, partisipasi

#### **2.2 pendahuluan**

kehidupan sosial masyarakat senantiasa berinteraksi dengan berbagai kebijakan, program, maupun fenomena yang muncul di lingkungannya. persepsi masyarakat sangat penting untuk dipahami, terutama dalam konteks memaknai implementasi kebijakan publik atau program pembangunan, karena penerimaan atau penolakan suatu program banyak dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat memaknai kebijakan tersebut. persepsi masyarakat tidak hanya terbentuk secara individual, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi sosial, pengalaman bersama, dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh kelompok sosial tertentu (soekanto, 2007). oleh karena itu, memahami persepsi masyarakat dalam memaknai sesuatu menjadi kunci dalam mengidentifikasi potensi keberhasilan atau hambatan suatu program.

program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr). program ini dirancang untuk tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk bantuan bahan bangunan dan jasa tukang, tetapi juga untuk menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam membangun rumah mereka sendiri. dalam pelaksanaannya, bsps menekankan prinsip swadaya,

yaitu partisipasi sukarela dari penerima bantuan dalam bentuk tenaga, biaya, maupun material sebagai wujud keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. konsep ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada kontribusi langsung dari masyarakat sebagai subjek pembangunan (kementerian pupr, 2015).

namun, dalam realitas pelaksanaannya, konsep swadaya sering kali ditafsirkan secara beragam oleh para penerima bantuan. sejumlah kelompok masyarakat memahami swadaya sebagai bentuk gotong royong dan wujud kemandirian lokal yang memperkuat solidaritas sosial. tetapi tidak sedikit pula yang justru menganggap swadaya sebagai beban tambahan, terutama ketika mereka merasa tidak memiliki cukup sumber daya untuk berkontribusi sesuai ekspektasi program. hal ini menunjukkan bahwa makna swadaya tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, norma budaya, dan dinamika interaksi sosial di masyarakat penerima bantuan (khalawati, 2023).

dalam perspektif interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh blumer (umiarso dan elbadiansyah, 2014), makna terhadap suatu tindakan atau simbol tidak melekat secara alamiah pada objek tersebut, tetapi dibentuk melalui proses interaksi sosial antarindividu dan kelompok. dalam konteks bsp, hal ini berarti bahwa pemahaman masyarakat terhadap swadaya tidak hanya berasal dari instruksi pemerintah atau pendamping program, tetapi juga dari diskusi informal antarwarga, pengalaman sebelumnya, dan nilai-nilai lokal yang berkembang. oleh karena itu, bisa terjadi kesenjangan antara makna ideal yang dimaksudkan oleh pemerintah dan makna aktual yang dibangun oleh masyarakat.

perbedaan dalam memaknai konsep swadaya berpotensi memengaruhi keberhasilan program bsp. ketika masyarakat merasa terlibat secara bermakna, mereka cenderung berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab. namun jika makna yang diterima berbeda dengan maksud kebijakan, maka dapat muncul resistensi, sikap pasif, atau bahkan konflik sosial di tingkat lokal. oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penerima bantuan memaknai konsep swadaya dalam pelaksanaan program bsp, agar kebijakan yang dirancang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga diterima secara sosial dan kultural oleh masyarakat sasaran.

### **2.2.1 pengertian makna**

makna merupakan sebuah kata yang merujuk pada kata arti. kata makna digunakan untuk menjelaskan definisi atau konsep suatu kata atau hal. makna sosial didapatkan dari hasil interaksi antar individu ataupun kelompok ataupun pemberian makna terhadap sesuatu serta pembentukan simbol (sumaya, 2020). blumer menyatakan ada tiga hal mengenai makna sosial, yaitu pertama manusia bertindak

terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. kedua, makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. ketiga, makna-makna tersebut disempurnakan pada saat proses interaksi sosial berlangsung (blumer, 1969; damsar, 2015: 149–150).

selain itu, menurut veeger makna sosial bisa didapat melalui sosialisasi, yang mana mekanisme sosialisasi yang paling ampuh adalah interaksi dan penyatuan diri dengan orang lain. bahasa menjadi perantara dalam proses pengembangan diri individu. orang yang bersangkutan belajar mengkomunikasikan arti dan maksudnya sendiri, belajar berpikir abstrak, dan belajar mengadakan refleksi, dan mana pengalaman lama digunakan untuk meninjau dan menilai situasi sekarang dan mengadakan perencanaan untuk masa mendatang (veeger & wulansari, 2009: 42).

menurut george herbert mead makna tidak tumbuh dari proses mental soliter namun merupakan hasil dari interaksi sosial atau signifikansi kausal interaksi sosial. individu secara mental tidak hanya menciptakan makna dan simbol semata, melainkan juga ada proses pembelajaran atas makna dan simbol tersebut selama berlangsungnya interaksi sosial (haris & amalia, 2018).

### **2.2.2 jenis-jenis makna**

#### **a. makna lesikal**

makna leksikal adalah makna yang melekat pada suatu kata secara mandiri, yaitu makna dasar atau arti sebenarnya sebagaimana tercantum dalam kamus, tanpa dipengaruhi oleh konteks kalimat, gramatika, atau hubungan sosial dalam penggunaannya. dalam kajian semantik, makna leksikal merupakan jenis makna yang paling dasar karena berkaitan langsung dengan referen atau objek yang dirujuk oleh kata tersebut. misalnya, kata “air” secara leksikal berarti cairan bening yang tidak berwarna, tidak berbau, dan dapat diminum. makna ini bersifat tetap dan tidak berubah meskipun digunakan dalam kalimat yang berbeda, selama tidak melibatkan proses gramatikal atau maknakontekstual. makna leksikal dapat dipahami sebagai makna kamus (*dictionary meaning*) karena biasanya dapat ditemukan secara eksplisit dalam kamus bahasa. para ahli linguistik menyatakan bahwa makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan makna kata secara umum sebelum dikenai proses morfologis atau gramatikal seperti afiksasi (chaer, 2009).

oleh karena itu, makna leksikal menjadi landasan awal dalam memahami kata atau frasa dalam bahasa, terutama sebelum kata tersebut dimodifikasi dalam konteks tertentu. dalam penelitian atau analisis bahasa, memahami makna leksikal penting untuk membedakan mana arti dasar suatu kata dan mana arti yang muncul dari konteks atau relasi sosial. tanpa pemahaman terhadap makna leksikal, seseorang bisa keliru menafsirkan pesan yang disampaikan dalam komunikasi,

karena akan melewatkan arti utama dari kata yang digunakan. maka, makna leksikal tidak hanya menjadi unsur penting dalam struktur makna, tetapi juga menjadi titik awal dalam memahami bagaimana bahasa bekerja dalam menyampaikan makna.

b. makna gramatikal

makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai hasil dari proses gramatika atau tata bahasa dalam suatu bahasa, seperti afiksasi, reduplikasi, pemajemukan, serta proses sintaktis lainnya. berbeda dengan makna leksikal yang bersifat tetap dan melekat pada kata secara mandiri, makna gramatikal bersifat kontekstual dalam struktur kalimat karena terbentuk melalui hubungan antar satuan bahasa dalam susunan gramatikal tertentu. oleh karena itu, makna gramatikal tidak dapat ditemukan secara langsung dalam kamus karena tidak melekat pada kata dasar, melainkan timbul akibat struktur atau bentuk kata dalam suatu konstruksi kalimat.

misalnya, kata dasar "lari" memiliki makna leksikal sebagai kegiatan bergerak cepat, namun ketika mendapat imbuhan "ber" menjadi "berlari", terjadi perubahan makna yang menandakan adanya tindakan aktif yang dilakukan oleh subjek. begitu pula dalam kata "buku-buku", bentuk jamak ini menunjukkan makna gramatikal yang menyatakan lebih dari satu buku, meskipun makna leksikal dari kata "buku" tetap mengacu pada benda berbentuk kumpulan halaman. para ahli bahasa menjelaskan bahwa makna gramatikal adalah makna yang ditimbulkan oleh relasi gramatikal atau proses morfologis, bukan makna yang dibawa oleh kata secara lepas. oleh karena itu, pemahaman terhadap makna gramatikal sangat penting dalam analisis linguistik karena memungkinkan kita untuk memahami bagaimana bentuk kata dan struktur kalimat mempengaruhi makna yang disampaikan. dalam komunikasi sehari-hari, makna gramatikal menjadi kunci dalam menyusun kalimat yang efektif dan sesuai dengan maksud pembicara, karena pilihan bentuk kata yang tepat akan mencerminkan informasi, waktu, jumlah, dan relasi antar unsur bahasa secara lebih akurat (kridalaksana, 2001).

c. makna kontekstual

makna kontekstual adalah makna yang diperoleh atau dipahami berdasarkan konteks penggunaan suatu kata, frasa, atau kalimat dalam situasi komunikasi tertentu. berbeda dengan makna leksikal yang bersifat tetap dan dapat ditemukan dalam kamus, makna kontekstual bersifat dinamis karena bergantung pada berbagai unsur situasional, seperti siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam kondisi apa, serta tujuan komunikasinya. dalam hal ini, satu kata bisa memiliki makna berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. misalnya, kata "panas" dalam kalimat "hari ini panas sekali" merujuk pada suhu udara yang tinggi, namun dalam kalimat "dia sedang panas hati" kata tersebut bermakna marah atau kesal. artinya, konteks sangat menentukan bagaimana makna dipahami oleh pembicara

maupun pendengar. menurut chaer dan agustina (2010), makna kontekstual adalah makna yang muncul atau ditafsirkan sesuai dengan konteks kalimat tempat satuan bahasa itu berada, dan makna tersebut bisa berubah sesuai perubahan konteks.

makna kontekstual mencerminkan fungsi sosial dan pragmatik bahasa, sebab dalam kehidupan nyata, manusia tidak hanya berbicara dengan kata-kata yang bermakna secara leksikal, tetapi juga menyesuaikannya dengan situasi, hubungan sosial, bahkan ekspresi emosi. dalam praktiknya, makna kontekstual sering kali lebih penting dari makna leksikal karena menentukan makna sesungguhnya yang dimaksud dalam suatu pernyataan. oleh karena itu, memahami makna kontekstual sangat penting dalam analisis wacana, pragmatik, sosiolinguistik, dan dalam interaksi sosial secara umum, karena bahasa tidak pernah digunakan dalam ruang hampa, melainkan selalu dalam konteks tertentu yang memengaruhi bagaimana makna dibentuk dan ditafsirkan.

#### d. makna kiasan

makna kiasan adalah makna yang tidak ditafsirkan secara harfiah atau leksikal, melainkan dipahami melalui penggunaan gaya bahasa atau majas yang bersifat simbolik, imajinatif, dan bersandar pada asosiasi makna tertentu di luar arti sebenarnya dari kata atau ungkapan. dalam makna kiasan, kata-kata digunakan untuk menyampaikan maksud atau pesan secara tidak langsung, dengan menyiratkan arti yang lebih dalam daripada yang tampak di permukaan.

makna kiasan umum ditemukan dalam bahasa sastra, puisi, peribahasa, atau percakapan sehari-hari yang penuh dengan ungkapan simbolis dan analogis. contoh makna kiasan misalnya dalam ungkapan “buah hati” yang bukan berarti buah secara fisik, tetapi bermakna anak tercinta; atau “ringan tangan” yang bukan berarti tangannya ringan dalam arti fisik, melainkan bermakna seseorang yang suka membantu. ungkapan-ungkapan semacam ini memiliki makna yang dipahami secara budaya dan sosial oleh masyarakat pengguna bahasa.

makna kiasan berkaitan erat dengan daya kreativitas penutur dalam menciptakan ungkapan-ungkapan yang bersifat estetis, simbolik, dan penuh makna, sehingga bahasa menjadi lebih ekspresif dan komunikatif (keraf, 2006). makna kiasan juga dapat memperhalus ujaran (eufemisme), menguatkan kesan (hiperbola), atau bahkan menyindir (ironi) tanpa menyampaikan secara eksplisit. oleh karena itu, pemahaman terhadap makna kiasan sangat penting tidak hanya dalam kajian sastra, tetapi juga dalam memahami komunikasi sehari-hari, karena manusia sering menggunakan bahasa secara metaforis untuk menyampaikan perasaan, kritik, atau nilai-nilai budaya secara halus namun mendalam. kesadaran terhadap makna kiasan memungkinkan kita untuk menafsirkan bahasa tidak secara literal saja, tetapi juga menangkap maksud tersembunyi dan keindahan di balik penggunaan bahasa yang kreatif.

#### e. makna denotatif

makna denotatif adalah makna dasar, objektif, dan literal dari suatu kata sebagaimana tercantum dalam kamus, tanpa melibatkan unsur perasaan, asosiasi, atau nilai emosional tertentu. makna ini merupakan makna yang paling langsung dan umum diterima oleh masyarakat, serta tidak tergantung pada konteks sosial, budaya, atau psikologis pengguna bahasa. dengan kata lain, makna denotatif adalah makna yang menunjuk pada referen secara nyata dan konkret. misalnya, kata “rumah” dalam makna denotatif merujuk pada bangunan fisik yang berfungsi sebagai tempat tinggal manusia; begitu pula kata “anjing” merujuk pada sejenis binatang berkaki empat dari spesies *canis familiaris*. dalam penggunaannya, makna denotatif bersifat netral dan tidak mengandung penilaian, sikap, atau interpretasi tambahan. karena itu, makna denotatif sangat penting dalam komunikasi ilmiah, hukum, dan administratif, di mana kejelasan dan ketepatan makna sangat dibutuhkan.

makna denotatif adalah makna kognitif atau referensial, yaitu makna yang digunakan untuk menunjuk objek, peristiwa, atau tindakan secara langsung dalam dunia nyata (leech, 1981). ia menjadi dasar dari pemahaman bahasa sebelum masuk ke wilayah makna lain seperti konotatif, kiasan, atau emotif. dengan memahami makna denotatif, pembicara dan pendengar memiliki titik awal yang sama dalam memahami pesan secara lugas dan apa adanya. dalam kajian semantik, makna ini sering dibandingkan dengan makna konotatif yang lebih subjektif dan kontekstual. oleh sebab itu, memahami makna denotatif sangat penting untuk membangun komunikasi yang objektif dan bebas dari ambiguitas emosional atau kultural.

#### f. makna konotatif

makna konotatif adalah makna tambahan atau makna emosional yang melekat pada suatu kata di luar makna dasarnya (denotatif), yang muncul sebagai hasil dari pengalaman pribadi, nilai budaya, sikap sosial, serta perasaan yang diasosiasikan oleh masyarakat terhadap kata tersebut. makna konotatif bersifat subjektif dan tidak tetap, karena sangat bergantung pada latar belakang sosial, budaya, bahkan psikologis penutur dan pendengar. misalnya, kata “mawar” secara denotatif berarti sejenis bunga dengan kelopak indah dan harum, namun secara konotatif dapat bermakna cinta, keindahan, atau kelembutan, tergantung konteks dan pengalaman kolektif masyarakat. demikian pula, kata “penjilat” secara denotatif mungkin merujuk pada seseorang yang menjilat, tetapi secara konotatif berarti seseorang yang suka mencari muka atau mengambil hati atasan secara tidak jujur, sehingga menimbulkan kesan negatif. dalam hal ini, makna konotatif dapat bersifat positif, negatif, atau netral, tergantung pada nilai yang dilekatkan oleh masyarakat.

makna konotatif merupakan aspek makna yang melampaui makna konseptual (denotatif), yaitu makna yang bersifat asosiatif dan mencerminkan nilai sosial serta sikap emosional penutur terhadap objek yang dimaksud (leech, 1981). leech menjelaskan bahwa makna konotatif berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dalam masyarakat, sehingga kata yang dulunya netral bisa memiliki makna negatif atau positif dalam konteks budaya tertentu. oleh karena itu, makna konotatif memainkan peran penting dalam komunikasi yang bersifat persuasif, ekspresif, dan simbolis, seperti dalam iklan, politik, media, maupun karya sastra. memahami makna konotatif membantu kita menangkap pesan yang tersembunyi di balik kata, serta menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya. dengan kata lain, makna konotatif menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya alat untuk menyampaikan fakta, tetapi juga untuk mengekspresikan sikap, nilai, dan emosi.

### 2.2.3 faktor yang mempengaruhi makna

#### a. konteks

konteks merupakan salah satu faktor terpenting dalam memahami makna karena memberikan latar belakang situasi yang menjadi dasar terjadinya komunikasi. konteks mencakup konteks situasional, sosial, dan budaya yang membantu penutur dan pendengar memahami makna di balik ujaran. misalnya, ungkapan *“rumah saya terbuka untukmu”* tidak hanya bermakna literal, tetapi juga simbolik tentang kepercayaan dan keakraban sosial. **halliday dan hasan (1985)** menekankan bahwa makna tidak dapat dipahami secara utuh jika dipisahkan dari konteks karena bahasa merupakan sistem semiotik yang sangat bergantung pada lingkungan sosialnya. oleh karena itu, kesalahan dalam menangkap konteks dapat menyebabkan penyimpangan makna atau konflik dalam komunikasi.

#### b. pilihan kata dan struktur kalimat

makna sangat dipengaruhi oleh pilihan kata (diksi) dan struktur kalimat yang digunakan oleh penutur. setiap kata memiliki makna leksikal (makna kamus) serta makna konotatif yang berkaitan dengan nuansa emosional atau nilai tertentu. pemilihan kata dapat mencerminkan sikap, nilai, dan niat pembicara. misalnya, kata *“perempuan”*, *“wanita”*, dan *“cewek”* memiliki makna denotatif yang sama, yaitu merujuk pada jenis kelamin, tetapi berbeda dalam tingkat keformalan dan konotasinya.

selain itu, struktur sintaksis dalam kalimat turut menentukan bagaimana informasi disampaikan dan dipahami. perubahan posisi subjek, predikat, dan objek dapat mengubah fokus atau bahkan keseluruhan makna kalimat. kalimat *“dia memarahi anaknya”* memiliki makna yang berbeda dengan *“anaknya memarahi dia”*, meskipun menggunakan unsur kata yang sama. hal ini menunjukkan bahwa

pemahaman terhadap struktur gramatikal sangat penting dalam menentukan makna suatu pesan.

c. intonasi dan nada bicara

dalam komunikasi lisan, unsur prosodik seperti intonasi, tekanan, dan jeda memainkan peran penting dalam menafsirkan makna. intonasi dapat menunjukkan emosi, niat, atau sikap pembicara terhadap topik atau lawan bicaranya. sebuah kalimat yang sama dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada cara pengucapannya. misalnya, kalimat "*kamu datang juga akhirnya*" dapat bermakna netral, senang, atau bahkan sarkastik tergantung pada nada suara penutur. tarigan (1990) menyebutkan bahwa aspek suprasegmental dalam ujaran lisan, seperti nada tinggi - rendah, keras - lembut suara, dan kecepatan bicara, dapat memengaruhi bagaimana pesan dipahami oleh pendengar. oleh karena itu, dalam komunikasi tatap muka, makna tidak hanya terbentuk dari kata-kata saja, tetapi juga dari bagaimana kata-kata itu diucapkan.

d. latar belakang penutur dan pendengar

pengetahuan, pengalaman, tingkat pendidikan, latar belakang budaya, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh penutur maupun pendengar sangat memengaruhi bagaimana makna ditafsirkan. misalnya, istilah "*gotong royong*" memiliki makna yang kaya dan bernilai luhur bagi masyarakat indonesia, tetapi bagi individu dari budaya yang lebih individualistik, istilah ini dapat terasa asing atau kurang relevan. kridalaksana (2001) menjelaskan bahwa maknakata atau kalimat sangat ditentukan oleh kompetensi semantik dan pragmatik individu yang bersangkutan. oleh karena itu, dua orang dapat menangkap makna yang berbeda dari kalimat yang sama karena perbedaan pengalaman dan latar belakang kognitif. dalam praktik komunikasi, kesadaran terhadap latar belakang lawan bicara menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman.

e. tujuan dan niat komunikatif

pragmatik sebagai cabang ilmu linguistik berusaha memahami makna dari sudut pandang fungsi komunikasi dan niat penutur. yule (1996) menjelaskan bahwa dalam komunikasi, makna tidak hanya terletak pada struktur kalimat, tetapi juga pada maksud di balik tuturan tersebut. kalimat seperti "*bisa tutup pintunya?*" secara sintaksis berbentuk pertanyaan, tetapi secara pragmatis berfungsi sebagai permintaan. dengan demikian, niat atau tujuan komunikasi menentukan bagaimana makna seharusnya ditafsirkan. penutur dapat menggunakan strategi bahasa seperti eufemisme, ironi, metafora, atau sindiran untuk menyampaikan makna yang tidak eksplisit. oleh karena itu, pemahaman terhadap niat komunikatif menjadi kunci dalam menafsirkan makna secara tepat.

f. media atau saluran komunikasi

saluran komunikasi, baik lisan, tulisan, maupun digital, turut menentukan bagaimana makna dikonstruksi dan dipahami. dalam komunikasi tatap muka, makna disampaikan tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara. sementara itu, dalam komunikasi tulis atau digital, makna sangat bergantung pada kejelasan struktur kalimat, tanda baca, serta penggunaan simbol seperti emotikon. McLuhan (1964) melalui konsep *the medium is the message* menyatakan bahwa media itu sendiri memengaruhi bagaimana pesan dipersepsikan. artinya, makna tidak hanya dibentuk oleh isi pesan, tetapi juga oleh bentuk dan karakteristik saluran penyampaiannya. komunikasi melalui media sosial, misalnya, kerap mengandung ambiguitas akibat keterbatasan ekspresi nonverbal, sehingga pemahaman makna sangat bergantung pada interpretasi masing-masing individu.

#### 2.2.4 pentingnya makna dalam keberhasilan program pemerintah

makna memegang peranan sentral dalam keberhasilan suatu program karena menjadi fondasi bagi pemahaman, penerimaan, dan partisipasi para pelaku program, khususnya masyarakat sebagai sasaran utama. setiap program, terutama yang berkaitan dengan pembangunan sosial seperti pemberdayaan, kesehatan, atau perumahan, tidak hanya bergantung pada perencanaan teknis dan alokasi sumber daya, tetapi juga pada cara masyarakat menafsirkan maksud, tujuan, dan nilai yang terkandung di dalamnya. ketika makna program tidak dipahami secara tepat oleh penerima manfaat, akan muncul kesenjangan antara harapan perencana dan realitas pelaksanaan. sebagai contoh, program yang dimaknai masyarakat semata-mata sebagai “proyek pemerintah” cenderung menimbulkan sikap pasif, sedangkan program yang dimaknai sebagai ruang kolaborasi untuk perubahan mendorong partisipasi yang lebih aktif.

makna dalam konteks ini bukan hanya merupakan hasil dari komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat, melainkan terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang melibatkan interaksi, simbol, dan pengalaman bersama. Berger dan Luckmann (1966) menyebut proses ini sebagai *social construction of reality*, yaitu bagaimana masyarakat secara kolektif membentuk realitas sosial melalui proses maknaterhadap pengalaman, kebijakan, dan tindakan. dalam konteks program pembangunan, ketika aktor-aktor kunci seperti fasilitator, tokoh masyarakat, dan penerima program, membangun pemahaman yang relatif seragam mengenai tujuan dan nilai suatu program, maka akan tercipta legitimasi serta penerimaan program di tingkat lokal.

lebih jauh, dalam pendekatan interaksionisme simbolik, tindakan manusia terhadap suatu program ditentukan oleh makna yang mereka lekatkan pada program tersebut (Blumer, 1969; Umiarso & Elbadiansyah, 2014). makna tersebut

dibentuk dan dinegosiasikan melalui interaksi sosial. oleh karena itu, program yang berhasil bukan hanya program yang mencapai target kuantitatif, tetapi juga program yang mampu membangun kesepahaman makna antara pelaksana dan penerima. dengan demikian, program menjadi bagian dari proses pemberdayaan, bukan sekadar intervensi. aspek komunikasi, simbol, dan dialog partisipatif menjadi sangat penting dalam membangun makna yang tepat terhadap suatu program.

makna juga berkaitan erat dengan keberlanjutan (*sustainability*) hasil-hasil program. program yang dipahami dan dimaknai secara mendalam oleh masyarakat sebagai bagian dari kebutuhan dan cita-cita bersama akan memiliki kemungkinan besar untuk dipelihara dan dilanjutkan secara mandiri, bahkan setelah pendampingan dan dukungan teknis dari pihak luar berakhir. haryanto (2012) menyebut bahwa pemberdayaan yang berkelanjutan hanya bisa tercapai jika masyarakat memahami dan meyakini bahwa mereka adalah bagian dari proses perubahan, bukan sekadar penerima manfaat. hal ini menegaskan bahwa keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh capaian fisik atau laporan administratif, tetapi oleh keberhasilan membangun makna kolektif yang mendorong keterlibatan emosional dan sosial masyarakat terhadap program tersebut.

### **2.2.5 pengertian swadaya**

swadaya secara umum merupakan kemampuan, kemauan, dan usaha yang muncul dari individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan mereka sendiri dengan mengandalkan potensi yang dimiliki, tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pihak luar. konsep ini menekankan pentingnya kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun fisik (soetomo, 2011). swadaya dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti sumbangan tenaga melalui kerja bakti, kontribusi materi seperti uang atau bahan bangunan, serta partisipasi dalam bentuk ide, gagasan, atau keahlian. pendapat ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh bappenas (2004), yang menekankan bahwa swadaya mencakup sumbangan dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu, hingga materi, yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat sendiri sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam pembangunan.

dalam konteks pembangunan, terutama di tingkat lokal atau pedesaan, swadaya menjadi salah satu pilar utama yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program-program yang dijalankan, karena masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai (haryanto, 2012). nilai-nilai yang terkandung dalam swadaya mencakup kemandirian, gotong royong, kepedulian sosial, solidaritas, dan rasa memiliki, yang semuanya menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan bersama yang berkelanjutan.

swadaya tidak hanya mencerminkan tindakan praktis masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi juga merupakan manifestasi dari kesadaran sosial dan budaya yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. dalam konteks ini, swadaya menjadi wujud nyata dari semangat kolektivitas, di mana setiap individu merasa terikat dalam sistem sosial yang saling mendukung (koentjaraningrat, 2009). masyarakat tidak semata-mata menjadi objek pembangunan, tetapi bertindak sebagai subjek aktif yang memiliki peran penting dalam merancang, melaksanakan, dan menjaga keberlangsungan program pembangunan. selain itu, swadaya juga dapat menjadi indikator tingkat kesadaran kritis masyarakat terhadap kondisi lingkungannya, serta menunjukkan adanya kapasitas sosial yang terbangun melalui interaksi dan jaringan sosial yang kuat di antara anggotanya.

### **2.2.6 bentuk-bentuk swadaya**

swadaya merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik dalam bentuk tenaga, dana, maupun pemikiran. untuk memahami sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif, penting untuk menguraikan berbagai bentuk swadaya yang biasa muncul dalam pelaksanaan program-program sosial dan pembangunan.

#### **a. swadaya tenaga : gotong royong**

gotong royong merupakan salah satu nilai luhur budaya Indonesia yang mencerminkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. gotong royong tidak hanya dipahami sebagai kegiatan bekerja bersama-sama, tetapi lebih jauh merupakan wujud kesadaran kolektif bahwa setiap anggota masyarakat memiliki peran dalam menjaga keseimbangan dan kemajuan bersama. dalam konteks pembangunan, gotong royong menjadi kekuatan sosial yang mempercepat tercapainya tujuan bersama, terutama dalam kegiatan yang membutuhkan dukungan banyak pihak seperti pembangunan rumah warga, perbaikan fasilitas umum, atau pelaksanaan kegiatan sosial.

nilai gotong royong juga memperkuat hubungan sosial antarwarga karena di dalamnya terkandung sikap saling membantu tanpa pamrih, saling percaya, dan saling menghargai. oleh karena itu, gotong royong bukan hanya aktivitas fisik semata, tetapi juga bagian dari sistem nilai yang membentuk karakter masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kearifan lokal (koentjaraningrat, 2009; nasikun, 2007; suyanto, 2012).

#### **b. swadaya material**

swadaya material merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam

pembangunan dengan menyumbangkan barang atau bahan fisik yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. kontribusi ini dapat berupa bahan bangunan seperti batu, pasir, semen, kayu, atau peralatan kerja lainnya yang digunakan untuk keperluan pembangunan rumah, jalan, fasilitas umum, dan sebagainya. dalam konteks program seperti bps (bantuan stimulan perumahan swadaya), swadaya material menjadi pelengkap penting dari bantuan yang diberikan pemerintah.

tidak semua kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi oleh dana stimulan, sehingga penerima bantuan sering kali berinisiatif untuk menambahkan sendiri bahan-bahan material yang masih kurang, baik secara mandiri maupun melalui bantuan kerabat dan tetangga. swadaya material mencerminkan semangat gotong royong yang tidak hanya berbentuk tenaga dan dana, tetapi juga kepedulian dalam bentuk sumber daya nyata. masyarakat yang memberikan kontribusi material menunjukkan komitmen terhadap keberhasilan program serta keberlanjutan pembangunan di lingkungannya (syarifuddin, 2016).

#### c. swadaya finansial

pemberian dana merupakan bentuk swadaya yang dilakukan masyarakat dengan menyumbangkan sebagian harta atau uang mereka untuk mendukung kegiatan pembangunan bersama. meskipun kontribusi ini bersifat sukarela, pemberian dana sering kali dianggap sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kemajuan lingkungan (minantasari, 2008). dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk program bps, pemberian dana bisa digunakan untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan rumah atau fasilitas umum yang tidak tercakup dalam bantuan pemerintah. besarnya sumbangan dana yang diberikan biasanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu, dan dilakukan atas dasar kesadaran serta keinginan untuk turut serta dalam proses pembangunan.

#### d. swadaya pikiran & organisasi

swadaya pikiran dan organisasi merupakan bentuk partisipasi nonmaterial yang berfokus pada kontribusi ide, pemikiran strategis, serta kemampuan dalam mengatur dan mengoordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan. swadaya pikiran mencakup gagasan, masukan, dan pertimbangan masyarakat dalam proses musyawarah, perencanaan, hingga evaluasi program. individu yang terlibat dalam swadaya ini biasanya memberikan kontribusi berupa pengetahuan teknis, pengalaman lapangan, atau pandangan kritis yang membantu menyempurnakan program pembangunan agar lebih tepat sasaran.

sementara itu, swadaya organisasi menekankan keterlibatan masyarakat dalam membentuk dan mengelola kelompok atau lembaga, seperti kelompok penerima bantuan (kpb), kelompok swadaya masyarakat (ksm), atau panitia pelaksana lokal. organisasi-organisasi tersebut berperan sebagai penggerak,

pengelola, sekaligus pengawas pelaksanaan kegiatan secara kolektif (goffman & putro, 2014).

## **2.2.7 konsep swadaya dalam program bsps**

swadaya dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) merupakan konsep fundamental yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya penerima bantuan, dalam proses pembangunan rumah layak huni. program bsps sendiri diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) yang belum memiliki rumah yang memenuhi standar kelayakan. namun, berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat hibah penuh, bsps dirancang sebagai bantuan stimulan, yaitu bantuan yang diberikan untuk mendorong dan memotivasi penerima agar mampu membangun atau memperbaiki rumahnya sendiri dengan cara swadaya. dalam hal ini, swadaya diartikan sebagai kontribusi penerima bantuan dalam bentuk tenaga, dana, bahan bangunan tambahan, serta keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

masyarakat yang menerima bantuan bsps diharapkan tidak hanya menunggu dan menerima, tetapi ikut aktif terlibat, baik secara fisik maupun non-fisik. misalnya, mereka dapat mengerjakan pembangunan rumah sendiri bersama keluarga atau tetangga secara gotong royong, menambahkan dana pribadi jika bantuan tidak mencukupi, menyumbangkan material yang dimiliki, atau turut serta dalam merancang dan mengawasi pembangunan agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan mereka.

konsep swadaya ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan rasa tanggung jawab penerima bantuan terhadap hunian yang dibangun, sehingga tercipta rasa memiliki yang kuat dan menjaga keberlanjutan dari rumah yang telah dibangun. di sisi lain, penerapan prinsip swadaya dalam bsps juga merupakan bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat agar mereka tidak tergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah, melainkan tumbuh menjadi komunitas yang mandiri dan mampu mengatasi permasalahan perumahan dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan mereka sendiri.

keberhasilan program bsps sangat dipengaruhi oleh sejauh mana penerima bantuan memahami bahwa mereka adalah subjek aktif dalam proses pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan. dengan begitu, melalui prinsip swadaya, program bsps tidak hanya membangun rumah secara fisik, tetapi juga membangun kesadaran, kemampuan, dan solidaritas sosial masyarakat dalam menghadapi permasalahan perumahan secara partisipatif dan berkelanjutan.

## **2.3 metode penelitian**

### **2.3.1 pendekatan dan jenis metode**

untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna memahami permasalahan penelitian secara mendalam dan kontekstual. pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas fenomena sosial dalam konteks kehidupan nyata, khususnya dalam memahami makna masyarakat terhadap konsep swadaya dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) setelah program tersebut selesai dilaksanakan.

pendekatan kualitatif dan studi kasus relevan digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alaminya. penelitian kualitatif memungkinkan penggalan data berbasis teks, wawancara, dan observasi (miles & huberman, 1994), sementara studi kasus berfokus pada pengkajian fenomena spesifik dalam konteks kehidupan nyata secara komprehensif (creswell, 2013; stake, 2006).

penelitian ini bersifat non-partisipatif dan dilakukan secara pasca pelaksanaan program, di mana peneliti tidak terlibat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program bps pada saat kegiatan berlangsung. peran peneliti terbatas sebagai pengamat dan pengumpul data yang dilakukan setelah program selesai, melalui wawancara, observasi kondisi hasil pembangunan, dan dokumentasi. pendekatan ini bertujuan untuk menjaga objektivitas penelitian serta memperoleh gambaran reflektif mengenai pengalaman dan penilaian informan terhadap program yang telah dijalankan.

### **2.3.2 lokasi penelitian**

lokasi penelitian ini dipilih di kelurahan pattallassang, kecamatan pattallassang, kabupaten takalar, sulawesi selatan, karena wilayah ini memiliki relevansi yang kuat dengan fokus penelitian mengenai makna swadaya dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps). pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan empiris dan sosiologis yang memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang mendalam mengenai bagaimana konsep swadaya dipahami, ditafsirkan, dan dipraktikkan oleh masyarakat penerima bantuan. *pertama*, kelurahan pattallassang merupakan salah satu wilayah yang secara konsisten menerima dan melaksanakan program bps dalam beberapa tahun terakhir, sehingga program tersebut tidak hanya hadir sebagai kebijakan administratif, tetapi telah menjadi bagian dari pengalaman sosial masyarakat. keberlanjutan pelaksanaan program ini memunculkan berbagai dinamika sosial, khususnya terkait tingkat partisipasi masyarakat, bentuk kontribusi swadaya yang dilakukan, serta beragam respons penerima bantuan terhadap

tuntutan dan mekanisme program.

*kedua*, dalam praktik pelaksanaan bps di kelurahan pattallassang ditemukan adanya variasi pemahaman masyarakat terhadap konsep swadaya, baik yang dimaknai sebagai bentuk kemandirian, gotong royong, kewajiban moral, strategi bertahan hidup, maupun sebagai beban tambahan di tengah keterbatasan ekonomi. perbedaan makna ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang heterogen, di mana terdapat perbedaan tingkat pendapatan, kepemilikan aset, dan akses terhadap sumber daya. kondisi tersebut menciptakan ruang interaksi sosial yang dinamis antara penerima bantuan, aparat kelurahan, fasilitator program, dan masyarakat sekitar, sehingga proses negosiasi makna swadaya berlangsung secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. dengan demikian, kelurahan pattallassang menjadi konteks yang tepat untuk mengkaji bagaimana makna swadaya dikonstruksi melalui pengalaman, interaksi, dan interpretasi masyarakat terhadap kebijakan negara.

a. kondisi geografis

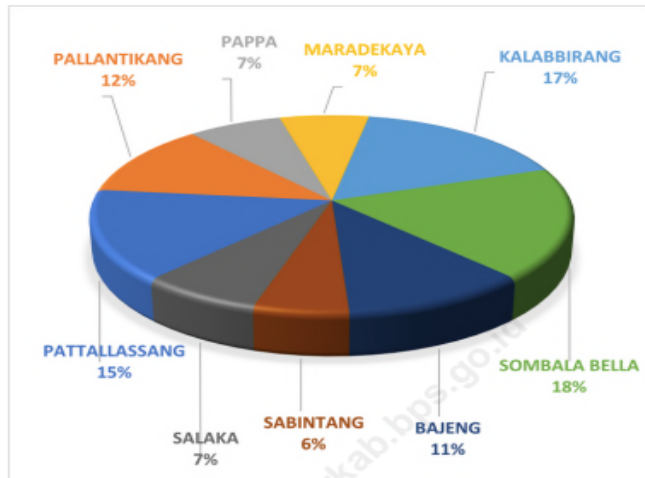
luas wilayah kecamatan pattallassang tercatat sebesar 25,31 km<sup>2</sup>. kecamatan ini terdiri atas sembilan kelurahan. wilayah kelurahan terluas di kecamatan pattallassang adalah kelurahan pappa dengan luas mencapai 4,35 km<sup>2</sup>, sedangkan kelurahan dengan luas wilayah terkecil adalah kelurahan sabintang dengan luas 1,74 km<sup>2</sup>.



gambar 2.1 peta wilayah kecamatan pattallassang kabupaten takalar

b. kondisi demografis

pada tahun 2024, jumlah penduduk di kecamatan pattallassang tercatat sebanyak 42.373 jiwa. jika dirinci menurut jenis kelamin, terdapat 20.593 jiwa penduduk laki-laki dan 21.780 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,55.



gambar 2.2 persentase penduduk menurut desa/kelurahan di kecamatan pattallassang tahun 2024

penduduk di kecamatan pattallassang tersebar di sembilan kelurahan. kelurahan dengan persentase penduduk tertinggi pada tahun 2024 adalah kelurahan sombala bella dengan proporsi sebesar 18,30 persen, sementara persentase penduduk terendah tercatat di kelurahan sabintang sebesar 5,68 persen.

tabel 2.1 penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk menurut desa/ kelurahan di kecamatan pattallassang, 2024

Desa/Kelurahan Village/Subdistrict	Penduduk/Population		
	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kelurahan/Subdistrict</b>			
Pattallassang	3.021	3.265	6.286
Pallantikang	2.456	2.598	5.054
Pappa	1.519	1.567	3.086
Maradekaya	1.398	1.499	2.897
Kalabbirang	3.429	3.662	7.091
Sombala Bella	3.750	4.004	7.754
Bajeng	2.333	2.383	4.716
Sabintang	1.178	1.227	2.405
Salaka	1.509	1.575	3.084
<b>Pattallassang</b>	<b>20.593</b>	<b>21.780</b>	<b>42.373</b>

sumber: badan pusat statistik kabupaten takalar tahun 2025

c. gambaran umum implementasi program bsps di kelurahan pattallassang

pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kelurahan pattallassang menunjukkan pola yang relatif konsisten dari tahun ke tahun. hampir setiap tahun, kelurahan ini memperoleh alokasi program, meskipun dengan jumlah penerima yang terbatas. dalam satu tahun pelaksanaan, penerima bantuan umumnya berkisar antara 7 hingga 10 rumah tangga, sehingga program bersifat selektif dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah.

karakter utama pelaksanaan bsps terletak pada bentuk bantuannya yang non-tunai, sehingga menuntut keterlibatan aktif penerima bantuan. masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima program, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan rumahnya sendiri. kesiapan swadaya menjadi syarat penting, yang mencakup kontribusi tenaga kerja, penyediaan material tambahan, sumbangan pemikiran dalam proses perencanaan, serta komitmen waktu selama proses pembangunan berlangsung. dengan demikian, bsps tidak hanya dipahami sebagai bantuan fisik, tetapi juga sebagai proses pembelajaran partisipatif bagi masyarakat.

namun, dinamika pelaksanaan program menunjukkan bahwa tidak semua penerima berada dalam kondisi yang sama untuk memenuhi tuntutan swadaya tersebut. keterbatasan dana swadaya menjadi kendala yang paling sering dihadapi, terutama bagi penerima yang berada pada kondisi ekonomi sangat terbatas. situasi ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan rumah mengalami keterlambatan atau penyesuaian terhadap rencana awal, sehingga capaian program belum sepenuhnya optimal di semua kasus.

meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, program bsps tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat kelurahan pattallassang. perbaikan kualitas hunian tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keamanan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat nilai gotong royong dan keterlibatan sosial di tingkat komunitas. oleh karena itu, bsps di pattallassang dapat dipandang sebagai program yang tidak hanya berorientasi pada hasil fisik bangunan, tetapi juga pada proses sosial yang membentuk partisipasi dan kemandirian masyarakat. ke depan, penguatan dukungan terhadap penerima dengan keterbatasan swadaya menjadi aspek penting agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata.

### **2.3.3 tahap-tahap penelitian**

#### **a. tahap observasi awal**

tahap pertama peneliti melakukan observasi lapangan yang berkaitan dengan masalah serta fenomena atau kasus yang ditemukan pada lokasi penelitian, yaitu makna konsep swadaya pada penerima bantuan program bsps. berdasarkan observasi awal di lokasi pelaksanaan program bsps, tampak adanya variasi makna di kalangan penerima bantuan terhadap konsep swadaya. makna tersebut mencakup penafsiran swadaya sebagai praktik gotong royong yang berakar dalam kehidupan sosial, serta penafsiran yang memandang swadaya sebagai beban tambahan. perbedaan makna ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi penerima bantuan yang relatif rendah, sehingga kemampuan material yang terbatas memengaruhi cara mereka memahami dan merespons tuntutan swadaya dalam program. interaksi antara penerima bantuan dan pendamping program menunjukkan berlangsungnya proses negosiasi makna, di mana konsep kebijakan yang diperkenalkan pemerintah ditafsirkan ulang sesuai dengan pengalaman hidup dan realitas sosial penerima bantuan.

#### **b. tahap pengurusan surat izin penelitian**

tahap kedua peneliti melakukan pengurusan surat izin dari pihak-pihak yang terkait untuk melengkapi dokumen penelitian dan menghindari segala permasalahan yang kemungkinan akan timbul di lapangan pada proses pelaksanaan penelitian. pengurusan surat izin penelitian terdiri atas beberapa tahapan yaitu:

1. pembuatan surat izin penelitian oleh pihak universitas hasanuddin dengan tujuan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi sulawesi selatan
2. memasukkan berkas ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi sulawesi selatan, kemudian diberikan surat pengantar ke ptsp kabupaten takalar
3. memasukkan berkas permohonan izin penelitian ke kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten takalar

c. tahap pelaksanaan

tahap ini peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk meneliti dan mendapatkan data, informasi, serta fakta dari informan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini mengenai persepsi penerima bantuan mengenai konsep swadaya dalam program bsps.

d. tahap evaluasi dan pelaporan

pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data dilapangan, maka dilakukan evaluasi terhadap data informasi yang diperoleh peneliti. kemudian data yang valid dapat dimasukkan ke dalam laporan untuk menjawab permasalahan tersebut.

### **2.3.4 jenis dan sumber data**

jenis dan sumber data adalah dua aspek penting yang menentukan bagaimana informasi dikumpulkan dan dianalisis. sugiyono (2019) mendiskripsikan sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu;

a. data primer

data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam (*depth interview*), dan dokumentasi. data dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sebagai instrumen kunci, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, serta penafsiran informan penelitian (rukmana, 2021). melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap dan memahami makna swadaya dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps), dengan menelaah bagaimana informan memaknai konsep swadaya, bagaimana pengalaman mereka dalam menjalankan swadaya selama mengikuti program, serta bagaimana interaksi sosial dan kondisi sosial ekonomi memengaruhi makna tersebut, sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian berdasarkan esensi pengalaman yang dialami dan dihayati oleh para informan.

b. data sekunder

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen, arsip, laporan, atau sumber lain yang telah ada sebelumnya. data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer yang telah dikumpulkan (sihombing, 2020).

### 2.3.5 informan penelitian

penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *proposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau karakteristik tertentu. pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiono, 2022). peneliti menyeleksi beberapa orang dan dipilih sebagai informan. jumlah informan dalam penelitian ini ialah sebanyak 7 orang. penentuan jumlah tersebut merujuk pada penerapan triangulasi data dan triangulasi subjek sebagai dasar verifikasi temuan. pada tahap ini, informasi yang diperoleh dari berbagai waktu dan situasi yang berbeda menunjukkan pola jawaban yang konsisten antar informan. konsistensi tersebut menandakan bahwa proses pengumpulan data telah mencapai titik kejenuhan (*data saturation*), sehingga penambahan informan tidak lagi memberikan variasi atau informasi baru yang relevan bagi kebutuhan analisis.

pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. pertimbangan utama dalam pemilihan informan adalah tingkat pengetahuan, pengalaman langsung, serta keterlibatan informan dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kelurahan Pattallassang. informan dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai makna swadaya, bentuk partisipasi masyarakat, serta dinamika sosial yang muncul selama pelaksanaan program.

#### 1. informan utama

informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima bantuan bsp di kelurahan Pattallassang. informan ini dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam menerima dan melaksanakan program bsp, mulai dari tahap perencanaan, pemenuhan swadaya, hingga proses pembangunan rumah. sebagai pelaku utama program, penerima bantuan memiliki pemahaman yang kaya mengenai bagaimana swadaya dimaknai dan dijalankan, baik sebagai kewajiban, bentuk partisipasi, gotong royong, maupun simbol kemandirian dalam memenuhi kebutuhan perumahan. pengalaman mereka juga memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai tantangan dan strategi yang dilakukan dalam menghadapi keterbatasan swadaya selama pelaksanaan program.

#### 2. informan kunci

sementara itu, informan kunci adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan luas, posisi strategis, serta peran penting dalam pelaksanaan program bsp di tingkat kelurahan. informan kunci dalam penelitian ini meliputi perangkat

kelurahan, serta pendamping atau fasilitator bps. informan kunci dipilih karena mereka memiliki akses terhadap informasi kebijakan, mekanisme pelaksanaan program, serta pengalaman dalam mendampingi dan mengoordinasikan masyarakat penerima bantuan. selain itu, informan kunci berperan penting dalam memberikan perspektif yang lebih struktural dan komprehensif mengenai pelaksanaan bps, termasuk kebijakan, prosedur, serta kendala administratif dan sosial yang dihadapi.

perbedaan peran antara informan utama dan informan kunci dalam penelitian ini saling melengkapi. informan utama memberikan gambaran mengenai pengalaman subjektif dan makna swadaya dari sudut pandang masyarakat penerima bantuan, sedangkan informan kunci memberikan penjelasan kontekstual dan struktural terkait pelaksanaan program bps. dengan melibatkan kedua jenis informan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana makna swadaya dibentuk, dinegosiasikan, dan dijalankan dalam pelaksanaan program bps di kelurahan pattalassang.

berikut adalah informasi informan yang digunakan dalam penelitian ini :

a. informan i

informan pertama sr berusia 65 tahun yang mencari nafkah dengan pedagang eceran sepeda bekas. pada tahun 2023, ia menjadi penerima program bps. rumah yang ia tinggali sebelumnya dinilai tidak layak huni dan kurang memberikan kenyamanan, sehingga bantuan ini diberikan untuk memperbaiki kualitas huniannya agar lebih aman dan layak ditinggali.

b. informan ii

informan kedua sb berusia 54 tahun yang bekerja sebagai buruh harian lepas. pada tahun 2024, menjadi salah satu penerima program bps. penetapan sb sebagai penerima bantuan didasarkan pada kondisi rumahnya yang tidak layak huni, kurang nyaman dan berada di area rawan banjir. kondisi tersebut menimbulkan kerentanan bagi dirinya dan keluarganya, sehingga bantuan perbaikan rumah melalui bps menjadi sangat relevan dan mendesak untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal serta keamanan hunian.

c. informan iii

informan ketiga id adalah seorang yang bekerja sebagai jasa pengiriman barang. pada tahun 2021, ia ditetapkan sebagai penerima bps. ia menerima bantuan tersebut karena rumah yang ditempatinya dulu habis terbakar, sehingga ia kehilangan tempat tinggal yang layak. program bps menjadi solusi penting bagi ia untuk membangun kembali rumahnya dan memulihkan kondisi kehidupan

keluarganya setelah bencana tersebut.

d. informan iv

informan keempat rs berusia 65 tahun yang sehari-harinya sebagai pedagang eceran tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup. pada tahun 2024, ia memperoleh bantuan melalui program bsps. rumah yang ia tempati sebelumnya berada dalam kondisi sangat memprihatinkan dan tidak layak huni, sehingga penyaluran bantuan ini dipandang perlu untuk memperbaiki kualitas tempat tinggalnya dan memastikan ia memiliki hunian yang aman dan sehat di usia lanjutnya.

e. informan v

informan kelima st berusia 65 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. pada tahun 2024, ia mendapatkan bantuan melalui program bsps. ia di prioritaskan sebagai penerima karena selama ini hanya menumpang tinggal di rumah keluarganya, sehingga program ini menjadi kesempatan baginya untuk memiliki hunian sendiri yang lebih mandiri dan layak.

f. informan vi

informan keenam mu adalah lurah yang mulai menjabat sejak tahun 2021 hingga sekarang. sebagai pemimpin wilayah di kelurahan pattalassang ia memiliki peran penting dalam pelaksanaan program bsps di kelurahannya. ia berperan memverifikasi calon penerima, mensosialisasikan program, dan memastikan pelaksanaan bantuan berjalan sesuai aturan.

g. informan vii

informan ketujuh bernama ds yang merupakan fasilitator pendamping untuk wilayah kelurahan pattalassang yang telah bertugas sejak tahun 2021 hingga sekarang. ia mendampingi masyarakat dalam proses pengajuan bantuan, membantu melengkapi berkas administrasi, serta memantau pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan program.

tabel 2.2 informan penelitian

masyarakat penerima program bsps					
no.	nama	jenis kelamin	umur	pekerjaan	tahun menerima
1	sr	l	65 tahun	pedagang eceran barang	2023

				bekas	
2	sb	l	54 tahun	buruh harian lepas	2024
3	id	l	41 tahun	<b>jasa pengiriman barang</b>	2021
4	rs	p	65 tahun	pedagang eceran tradisional	2024
5	st	p	56 tahun	ibu rumah tangga	2024

aparatus pemerintah dan fasilitator bps				
no.	nama	jenis kelamin	jabatan	lama menjabat
6	mu	l	lurah	2021-sekarang
7	ds	l	fasilitator / pendamping	2021-sekarang

sumber: hasil olahan data primer tahun 2025

### 2.3.6 prosedur pengumpulan data

#### a. wawancara

dalam pendekatan studi kasus, wawancara mendalam merupakan metode utama untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti (miles et al., 2014). wawancara mendalam tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan fakta empiris, tetapi juga untuk memahami bagaimana masyarakat penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) mengalami, memaknai, dan merespons konsep swadaya dalam konteks sosial mereka. wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pengalaman informan dalam pelaksanaan program bps serta makna yang mereka berikan terhadap swadaya, baik sebagai kewajiban, bentuk partisipasi, gotong royong, maupun simbol kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.

teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan bentuk tidak terstruktur, sehingga peneliti memiliki fleksibilitas untuk menggali informasi secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan dinamika kasus yang diteliti. dalam studi kasus, fokus utama wawancara tidak hanya pada

peristiwa pelaksanaan program bsps, tetapi juga pada konteks, proses, serta interaksi sosial yang melingkupi praktik swadaya tersebut. oleh karena itu, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menjalin komunikasi secara empatik, mendengarkan secara aktif, serta menafsirkan makna pengalaman informan dalam konteks kehidupan sosial mereka. tujuan utama metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena melalui eksplorasi yang terbuka dan dinamis (hadi et al., 2021). pendekatan ini sejalan dengan prinsip *verstehen* yang dikemukakan oleh weber (1978), di mana peneliti berupaya memahami makna tindakan sosial dari sudut pandang pelaku.

proses wawancara dilakukan dengan informan utama yang terdiri atas masyarakat penerima program bsps di lokasi penelitian sebagai satu kasus yang ditelaah secara mendalam. selain itu, wawancara juga dilakukan dengan informan pendukung, seperti fasilitator bsps, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya, sebagai bentuk triangulasi sumber untuk memperkuat validitas data. sebelum wawancara dilaksanakan, peneliti menyusun pedoman wawancara terbuka yang memuat pertanyaan-pertanyaan panduan mengenai pengalaman mengikuti program bsps, bentuk dan praktik swadaya yang dilakukan, serta proses makna terhadap konsep swadaya dalam pelaksanaan program tersebut. pedoman wawancara bersifat fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan konteks dan temuan di lapangan.

pelaksanaan wawancara dilakukan dalam suasana yang kondusif dan santai, umumnya di rumah informan atau lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, guna membangun rasa nyaman dan kepercayaan. wawancara diawali dengan pertanyaan umum mengenai kondisi keluarga dan pengalaman awal menerima bantuan bsps, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan inti yang berfokus pada praktik swadaya dan makna yang dilekatkan informan terhadap pengalaman tersebut. selama proses wawancara, peneliti menggunakan alat bantu seperti perekam suara untuk merekam percakapan, catatan lapangan untuk mencatat situasi dan respons nonverbal, serta kamera untuk dokumentasi kegiatan. seluruh data hasil wawancara kemudian ditranskripsi dan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyusunan kategori, serta penarikan tema-tema utama yang merepresentasikan kasus makna swadaya dalam program bsps.

apabila terdapat data yang belum lengkap atau memerlukan pendalaman lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara lanjutan, baik secara langsung maupun melalui komunikasi jarak jauh seperti telepon atau pesan suara. dengan cara ini, peneliti memastikan bahwa gambaran kasus mengenai makna swadaya dalam program bsps tersusun secara utuh, mendalam, dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik pendekatan studi kasus yang menekankan pemahaman menyeluruh terhadap suatu fenomena dalam konteks sosial tertentu.

## b. dokumentasi

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai instrumen pendukung untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi non-partisipasi yang dilakukan setelah proses pembangunan rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) selesai dilaksanakan. teknik dokumentasi mencakup pengumpulan berbagai bahan tertulis, foto, dan rekaman audio selama proses penelitian berlangsung. dokumentasi berfungsi untuk memperkuat validitas data melalui triangulasi metode serta memberikan konteks visual dan deskriptif mengenai pelaksanaan program bspss dan praktik swadaya yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan.

dalam praktiknya, dokumentasi dilakukan terhadap kondisi fisik rumah penerima bantuan pasca-pembangunan, lingkungan permukiman, serta hasil nyata dari kontribusi swadaya masyarakat, baik dalam bentuk tenaga, material, maupun dukungan sosial dari lingkungan sekitar. peneliti juga mendokumentasikan proses wawancara menggunakan alat perekam suara serta mengambil foto rumah sesudah menerima bantuan bspss, dan kondisi lingkungan tempat tinggal informan untuk memberikan gambaran kontekstual yang lebih utuh terkait makna swadaya dalam kehidupan sehari-hari.

selain itu, peneliti mengumpulkan dokumen tertulis yang relevan dengan pelaksanaan program bspss, seperti petunjuk teknis, data penerima bantuan, laporan kegiatan, serta dokumen administratif lainnya yang diperoleh dari dinas sosial kabupaten takalar dan dinas pekerjaan umum (pu) kabupaten takalar. data dari kedua instansi tersebut digunakan untuk memahami kerangka kebijakan, mekanisme pelaksanaan program, serta peran pemerintah daerah dalam mendorong dan mengatur praktik swadaya masyarakat. seluruh bentuk dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap data empiris, tetapi juga membantu peneliti menafsirkan bagaimana konsep swadaya dikonstruksi dan diwujudkan dalam konteks kebijakan dan realitas sosial di tingkat lokal.

### **2.3.7 pengecekan keabsahan data**

pengecekan keabsahan data bertujuan untuk menguji validitas dan keandalan data yang diperoleh dalam penelitian ini. penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai upaya untuk menjamin keabsahan data, sehingga sumber data, metode pengumpulan data, dan kesesuaian teori dapat saling berkesinambungan dan melengkapi satu sama lain (miles et al., 2014). pengecekan keabsahan data melalui triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa bukti yang diperoleh dari berbagai sumber data, kemudian menggunakannya untuk membangun temuan yang koheren dan sesuai dengan fokus penelitian. apabila tema penelitian ditetapkan berdasarkan beragam sumber data dan perspektif informan, maka proses ini dapat meningkatkan validitas hasil

penelitian (creswell & creswell, 2023).

pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan pengalaman dan makna masyarakat terhadap swadaya dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps). dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai metode utama untuk menjamin keabsahan dan keandalan data. triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari informan utama maupun informan tambahan. selain itu, peneliti melakukan diskusi lanjutan dengan sumber data terkait untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi yang diperoleh (hazni et al., 2023).

penelitian ini menerapkan triangulasi metode dan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara mendalam, observasi non-partisipasi yang dilakukan setelah proses pembangunan rumah, serta dokumentasi berupa foto, catatan lapangan, dan dokumen resmi terkait program bsp. sumber data yang beragam, seperti masyarakat penerima bsp, fasilitator program, aparat kelurahan, serta pihak dinas sosial dan dinas pekerjaan umum kabupaten takalar, digunakan untuk saling melengkapi dan menguatkan validitas temuan penelitian. dengan demikian, data yang dikumpulkan tidak hanya bersumber dari satu perspektif, tetapi diverifikasi melalui pandangan berbagai aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program bsp.

### **2.3.8 analisis data**

analisis data adalah proses menyusun dan mengolah informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. proses ini dilakukan dengan mengelompokkan jawaban berdasarkan pertanyaan penelitian, memilah data yang paling relevan dengan rumusan masalah atau kerangka konsep, serta menjadikannya dasar dalam menarik kesimpulan agar lebih mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca. tahapan pengolahan data dimulai dengan mendokumentasikan hasil observasi, wawancara, atau rekaman, kemudian dilanjutkan dengan proses penyuntingan, klasifikasi, reduksi, dan penyajian data. dalam analisis ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

#### **a. reduksi data (*data reduction*)**

tahap ini melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. tujuannya adalah menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang data yang tidak relevan, sehingga data yang tersisa lebih terorganisir dan bermakna. reduksi data merupakan proses menyaring, memfokuskan perhatian, menyederhanakan,

mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, maka data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas (radjab, 2014). proses ini berlangsung secara berkelanjutan sepanjang penelitian, bahkan sudah dimulai sebelum seluruh data terkumpul, terlihat dari kerangka konseptual, rumusan masalah, serta metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti.

b. penyajian data (*data display*)

setelah direduksi, data disusun secara sistematis dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti teks naratif, matriks, grafik, atau bagan. data primer dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, atau visualisasi lainnya. sementara itu, data sekunder umumnya disajikan dalam bentuk narasi atau teks deskriptif (radjab, 2014). penyajian ini membantu peneliti dalam melihat pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu, sehingga memudahkan proses analisis lebih lanjut.

c. penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

pada tahap ini, peneliti menafsirkan data yang telah disajikan untuk mencari makna, hubungan, atau pola yang muncul. kesimpulan awal yang ditarik bersifat sementara dan perlu diverifikasi melalui pengecekan ulang terhadap data yang ada untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan (rijali, 2019). kesimpulan dibuat untuk menerjemahkan hasil analisis ke dalam jawaban atas rumusan masalah secara ringkas, serta menjelaskan pola dan hubungan antar berbagai aspek yang telah dibahas. proses ini dilakukan setelah semua data disajikan dan dianalisis menggunakan teori yang relevan. data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diverifikasi melalui metode triangulasi untuk memastikan keakuratannya.

## **2.4 hasil dan pembahasan**

penelitian ini menyajikan dan membahas hasil penelitian mengenai makna swadaya oleh masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kelurahan pattalassang. penyajian hasil dilakukan secara integratif, yaitu memaparkan temuan empiris yang diperoleh dari data lapangan bersamaan dengan analisis dan interpretasinya. pembahasan disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian, khususnya terkait makna masyarakat terhadap konsep swadaya dalam program bsp.

hasil penelitian menunjukkan bahwa maknaswadaya bersifat beragam, meliputi swadaya sebagai kemandirian, tanggung jawab, investasi, gotong royong dan solidaritas sosial, identitas dan harga diri, serta sebagai beban ekonomi. setiap

bentuk makna tersebut dianalisis dengan mengaitkannya pada konteks sosial masyarakat, kerangka teoritis, dan kebijakan pelaksanaan program bsps.

#### **2.4.1 swadaya sebagai bentuk kemandirian**

subbagian ini menguraikan hasil penelitian mengenai makna swadaya sebagai bentuk kemandirian oleh masyarakat penerima program bsps di kelurahan pattalassang. swadaya dipahami sebagai upaya masyarakat untuk berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan perbaikan rumah melalui kontribusi tenaga, material, maupun biaya, dengan memandang bantuan bsps sebagai stimulus, bukan bantuan penuh. makna ini dianalisis dalam kaitannya dengan konsep pemberdayaan masyarakat dan tujuan program bsps dalam mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. pandangan tersebut diungkapkan oleh id penerima bantuan bsps pada tahun 2021 berumur 41 tahun mengatakan bahwa :

*“wattuna kujama anne ballaka ia annambaika ka tidak cukup kalau 20 juta, jari riolo nakkeji kale-kalengku anjamai siangang se're tukangku, nakke ngangka kerikil, semen, pasir, dan semuanya, karena dari pada anjo 2,5 juta ya untuk tukang mending nakke mo anjamai jari kullea seng ampaballi bahan”.* (wawancara pada sabtu 16 agustus 2025).

artinya :

“saat pembangunan rumah ini, saya ikut menambah tenaga karena kalau hanya mengandalkan dana 20 juta tentu tidak cukup. jadi dulu saya sendiri yang ikut mengerjakan bersama satu orang tukang. saya yang mengangkat kerikil, semen, pasir, dan bahan lainnya. saya berpikir daripada mengeluarkan rp2,5 juta untuk ongkos tukang, lebih baik saya membantu sendiri sehingga uangnya bisa dipakai membeli material tambahan”(wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).

sr penerima program bsps pada tahun 2023 berumur 65 tahun juga mengatakan bahwa :

*“...nakke anjo pammatinna kungai pamarenta, riolo nakke tongji balla kayu anrinni, balla batu terus wara, ka'de tenamo anjo bantuan tena tongmo ki balla batu ka apa nani paballi manna dibalukan nenek taganna, jari sanna sukkuruku anne bantuan battu ripamarenta, ganna ta ganna yang penting anjo tenamo na jai dudu di tambai, ribokopi tawwa na ki usaha a'boya tambangna. punna anne bantuan diharapkan ampa'lebbaki anne ballaka tenamo kapang anjo na le'ba le'ba”* (wawancara pada jumat, 8 agustus 2025).

artinya :

“...saya sangat bersyukur dengan adanya perhatian dari pemerintah. dulu hanya saya yang masih tinggal di rumah kayu, sementara di sepanjang jalan

ini orang-orang sudah memiliki rumah batu. kalau bukan karena bantuan ini, mungkin sampai sekarang saya belum punya rumah batu, karena apa yang bisa dijual misalnya harta peninggalan orang tua tidak akan cukup untuk membangunnya. jadi saya benar-benar berterima kasih atas bantuan ini. meskipun jumlahnya tidak besar, setidaknya kami tidak perlu lagi mengeluarkan terlalu banyak biaya. ke depan, kami tetap akan berusaha mencari tambahan sendiri, karena kalau hanya mengandalkan bantuan, rumah ini tidak akan pernah selesai” (wawancara pada jumat, 8 agustus 2025).

sb penerima bantuan bps pada tahun 2024 berumur 54 tahun lebih lanjut mengatakan bahwa :

“...anjo bantuan bps riparenta sebenarnya ten ana ganna sanna jauhna, itu saja saya tambah ane tenamo bulaengna istriku karena 20 jt ji, jari punna eroki baji minimal tambaiki lagi 30 jt, sekarang gaji tukang itu 150 ribu satu hari jadi kalau dikali 2 tukang 300 memang 1 hari” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).

artinya :

“...dana bantuan ini sebenarnya sangat jauh dari cukup. karena itu, saya menambah biaya dengan menjual perhiasan istri saya, sebab bantuan yang diberikan hanya sebesar 20 juta. agar rumah bisa lebih layak, setidaknya harus ada tambahan sekitar 30 juta. apalagi sekarang upah tukang sudah 150 ribu per hari, sehingga bila mempekerjakan dua orang tukang biayanya mencapai 300 ribu per hari (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).

dalam perspektif interaksionisme simbolik, pernyataan ini menunjukkan proses *definition of situation*, di mana penerima bantuan mendefinisikan program bps bukan sekadar sebagai bantuan pemerintah, melainkan sebagai situasi yang menuntut keterlibatan aktif agar pembangunan rumah dapat berjalan. definisi situasi tersebut tidak muncul secara spontan, tetapi terbentuk melalui pengalaman hidup informan serta interaksi dengan fasilitator dan lingkungan sosial yang menekankan nilai tanggung jawab individu dalam pelaksanaan program.

melalui interaksi sosial yang berulang, makna tersebut berkembang menjadi *shared meaning* di antara penerima bantuan bahwa swadaya merupakan simbol kemandirian dan harga diri. makna bersama ini kemudian memandu tindakan sosial mereka, seperti kesediaan menyumbangkan tenaga sendiri dan mengatur sumber daya secara mandiri dalam proses pembangunan rumah.

makna serupa juga diungkapkan oleh sr, penerima program bps tahun 2023 berusia 65 tahun, yang menyatakan rasa syukur atas bantuan pemerintah namun menyadari perlunya usaha tambahan agar pembangunan rumah dapat selesai. kesadaran ini menunjukkan bahwa bantuan bps dipahami sebagai pemicu awal, bukan sebagai solusi akhir, sehingga swadaya menjadi strategi utama dalam

menghadapi keterbatasan dana.

dalam kerangka interaksionisme simbolik, kondisi tersebut mencerminkan adanya proses *role-taking*, di mana penerima bantuan menyesuaikan perilaku mereka dengan peran sosial sebagai “penerima program yang bertanggung jawab”. individu membayangkan ekspektasi pemerintah dan lingkungan sosial, sehingga terdorong untuk bertindak aktif dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan negara.

temuan ini diperkuat oleh pernyataan sb, penerima bantuan bpsps tahun 2024 berusia 54 tahun, yang mengungkapkan keputusan untuk menambah biaya pembangunan dengan menjual perhiasan keluarga demi mendapatkan rumah yang lebih layak. keputusan tersebut menunjukkan bahwa swadaya dimaknai sebagai pengorbanan yang bernilai dan rasional dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang.

berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa swadaya sebagai bentuk kemandirian tidak sekadar dimaknai sebagai tambahan biaya atau tenaga, tetapi sebagai hasil dari proses makna sosial yang melibatkan definisi situasi, pembentukan makna bersama, dan pengambilan peran sosial. swadaya menjadi simbol kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap keterbatasan, sekaligus cerminan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga dalam mewujudkan hunian yang layak.

berbeda dengan penelitian andika et al. (2023) dan aprianus (2021) yang lebih menekankan pada dampak program bpsps terhadap perbaikan kondisi fisik rumah dan perubahan sosial ekonomi penerima bantuan, penelitian ini secara khusus mengkaji proses makna swadaya dari sudut pandang subjektif masyarakat. sementara itu, penelitian pambuditama dan priyanto (2023) memposisikan keterbatasan sumber daya penerima sebagai risiko pelaksanaan program yang berdampak pada penjualan atau penggadaian aset, penelitian ini menafsirkan tindakan tersebut sebagai bagian dari konstruksi makna swadaya sebagai bentuk kemandirian yang dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial selama proses pembangunan rumah. berikut dokumentasi swadaya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan material pembangunan rumah.

dokumentasi ini disajikan sebagai penguat temuan penelitian mengenai makna swadaya sebagai bentuk kemandirian masyarakat penerima program bpsps. swadaya tidak hanya dipahami melalui narasi subjektif informan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata berupa penambahan biaya pribadi untuk pembelian material bangunan di luar dana bantuan pemerintah. slip pembelian bahan bangunan yang ditampilkan menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam memastikan pembangunan rumah dapat terus berlangsung dan selesai meskipun terdapat keterbatasan dana bantuan.

dalam perspektif interaksionisme simbolik, dokumentasi tersebut memperlihatkan bagaimana bantuan bpsps dimaknai sebagai stimulus awal, bukan sebagai sumber yang sepenuhnya mencukupi. makna ini kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan swadaya sebagai bentuk kemandirian dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehingga masyarakat tidak memosisikan diri sebagai penerima pasif, melainkan sebagai aktor aktif dalam proses pembangunan rumahnya.



gambar 2.3 slip pembelian material bangunan oleh penerima program bpsps sebagai bentuk swadaya dalam pembangunan rumah  
(sumber: dokumentasi peneliti, 2025)

#### **2.4.2 swadaya sebagai bentuk tanggung jawab**

makna swadaya sebagai bentuk tanggung jawab dalam program bpsps menunjukkan adanya kesadaran masyarakat penerima bantuan terhadap peran dan kewajibannya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program. swadaya tidak hanya dipahami sebagai kontribusi material atau finansial, tetapi juga sebagai komitmen moral untuk menyelesaikan pembangunan rumah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. tanggung jawab tersebut tercermin dalam sikap kehati-hatian masyarakat dalam menyesuaikan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan ekonomi, serta kesediaan untuk menanggung kekurangan biaya agar proses pembangunan tetap berjalan. makna ini menegaskan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menggantungkan pelaksanaan program pada bantuan pemerintah, melainkan menempatkan diri sebagai subjek yang bertanggung jawab atas keberlanjutan dan hasil pembangunan rumahnya. gambaran tersebut dapat dilihat dari pernyataan id penerima bantuan bpsps pada tahun 2021 berumur 41 tahun mengatakan bahwa :

*“tidak adaji kesulitan kalau berbicara kesulitan selama dibangun ini rumah karena semua kujalani dengan hati yang ikhlas dan tulus, karena kapan kita tidak mempunyai hati yang ikhlas pasti tidak selesai, jadi kutanya memang mama berapaji dana ta tersedia untuk tambai ini rumah, haruski disesuaikan karena kalau tidak pasti dapatki beban. sebelumnya natanya jaki memang nabilang anggarannya ini 20 juta ji kalau di pikir-pikir memang tidak cukupki*

*makanya dipersiapkan juga, makanya setelah ku taumi kemampuan sampe dimana ya itu tong mo janganmi mau berubah-ubah karena memang berat” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).*

artinya :

“sebenarnya tidak ada kesulitan dalam pembangunan rumah ini, karena semua saya jalani dengan hati yang ikhlas dan tulus. kalau kita tidak ikhlas, pasti tidak akan selesai. jadi saya selalu bertanya kepada ibu saya, berapa dana yang tersedia untuk menambah pembangunan rumah ini. harus disesuaikan, karena kalau dipaksakan bisa jadi beban. sebelumnya juga sudah diberitahu bahwa anggaran dari bantuan hanya sekitar 20 juta, dan kalau dipikir-pikir memang tidak cukup, makanya kami harus mempersiapkan tambahan sendiri. setelah saya tahu kemampuan kami sampai sejauh mana, ya itulah yang dijalani, jangan terlalu memaksakan diri karena memang berat” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).

sb penerima bantuan bps pada tahun 2024 berumur 54 tahun mengatakan bahwa :

*“...nia kapang anne 20 allo dijama anne ballaka, cinimi anjo punna 150 iami anjo ambalassiki jari kukanamo ammantangko lakbusuki doekku, jadi minimal mati 600 siagadangmi anjo uang makanna tukang, untuk antutupi anjo kekuranganna gaji tukang ku tambai andi kateama anjo mate sirik” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).*

artinya :

“...perkiraan waktu pengerjaan rumah ini sekitar 20 hari. dengan upah tukang sebesar 150 ribu per orang per hari, maka biaya minimal yang dikeluarkan mencapai 600 ribu, termasuk akumulasi uang makan dua kali sehari. semua kekurangan biaya tersebut saya yang menutupi, karena daripada menanggung rasa malu jika tidak mampu membayar tukang, lebih baik saya berusaha mencukupinya” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).

temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat penerima bantuan bps memaknai swadaya sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung keberhasilan pembangunan rumah. swadaya tidak hanya diwujudkan melalui penambahan dana atau tenaga, tetapi juga melalui sikap kehati hatian dalam menyesuaikan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan ekonomi agar proses pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan beban yang berlebihan.

makna swadaya sebagai tanggung jawab mencerminkan kesadaran masyarakat bahwa keberhasilan program tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah. masyarakat menempatkan diri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberlanjutan pembangunan rumahnya, baik dalam mengelola keterbatasan dana, menjaga komitmen terhadap pekerja bangunan,

maupun dalam mengendalikan keinginan agar tidak melampaui kemampuan finansial yang dimiliki. dengan demikian, swadaya dimaknai sebagai komitmen moral dan etis, bukan sekadar kewajiban material.

dalam perspektif interaksionisme simbolik herbert blumer, makna swadaya sebagai tanggung jawab terbentuk melalui proses interpretasi individu terhadap situasi sosial yang dihadapinya. bantuan bsps dipahami sebagai simbol yang mengandung harapan, tetapi sekaligus keterbatasan. melalui proses *self interaction*, masyarakat menafsirkan kondisi tersebut dan menentukan tindakan yang dianggap paling bertanggung jawab, yaitu mengatur pembangunan sesuai kemampuan dan menanggung kekurangan biaya agar pembangunan tetap berjalan. tindakan ini menunjukkan bahwa swadaya menjadi simbol tanggung jawab yang dibentuk dari interaksi antara kebijakan, pengalaman pembangunan, dan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat.

berbeda dengan penelitian andika et al. (2023) dan aprianus (2021) yang lebih menekankan pada dampak program bsps terhadap perbaikan kondisi rumah dan perubahan sosial ekonomi penerima bantuan, penelitian ini secara khusus menyoroti dimensi makna swadaya sebagai tanggung jawab personal masyarakat. sementara itu, penelitian pambuditama dan priyanto (2023) memposisikan keterbatasan sumber daya penerima bantuan sebagai risiko program yang dapat mendorong pengorbanan ekonomi, seperti penjualan atau penggadaian aset. penelitian ini melampaui sudut pandang tersebut dengan menunjukkan bahwa pengorbanan tersebut dimaknai oleh masyarakat bukan semata sebagai risiko atau beban, melainkan sebagai wujud tanggung jawab moral untuk menyelesaikan pembangunan rumah dan menjaga komitmen sosial selama proses pembangunan berlangsung

implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa program bsps tidak hanya menghasilkan perbaikan fisik hunian, tetapi juga membentuk kesadaran tanggung jawab di kalangan penerima bantuan. oleh karena itu, kebijakan bsps perlu mempertimbangkan dimensi makna ini dengan memberikan pendampingan yang lebih sensitif terhadap kemampuan ekonomi penerima, agar tanggung jawab yang dipikul masyarakat tidak berubah menjadi beban finansial yang berlebihan. berikut dokumentasi kondisi rumah penerima bantuan yang belum selesai.

dokumentasi ini menyajikan kondisi fisik rumah masyarakat penerima bantuan bsps yang belum sepenuhnya selesai dibangun. pada beberapa bagian bangunan, khususnya dinding, masih terlihat belum dilakukan tahapan penyelesaian akhir seperti plesteran. hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan rumah masih berlangsung dan dilakukan secara bertahap. kondisi ini mencerminkan bahwa setelah bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan program, penyempurnaan dan penuntasan pembangunan rumah menjadi tanggung jawab masyarakat penerima bantuan. masyarakat secara mandiri melanjutkan proses

pembangunan sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan perencanaan masing-masing, sebagai bagian dari upaya mewujudkan hunian yang layak. dokumentasi ini memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan program di lapangan, sekaligus menunjukkan peran aktif dan kemandirian masyarakat penerima bantuan dalam menyelesaikan pembangunan rumahnya hingga dapat digunakan secara optimal.



gambar 2.4 kondisi rumah penerima bantuan bps yang belum diplester akibat keterbatasan kemampuan ekonomi  
(sumber: dokumentasi peneliti, 2025)

### 2.4.3 swadaya sebagai investasi jangka panjang

makna swadaya sebagai investasi jangka panjang mencerminkan kesadaran masyarakat penerima program bps akan pentingnya membangun rumah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat bertahan dan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lebih lama. dalam konteks ini, masyarakat mengambil langkah-langkah strategis seperti meninggikan bangunan untuk mengantisipasi risiko banjir dan memilih material bangunan yang lebih kuat dan tahan lama, meskipun memerlukan biaya tambahan di luar bantuan yang diterima. pendekatan ini menunjukkan bahwa swadaya bukan sekadar pelengkap kekurangan dana bantuan, melainkan sebuah investasi yang diperhitungkan secara matang untuk meningkatkan kualitas hunian dan mengurangi potensi kerusakan di masa depan. dengan demikian, swadaya berfungsi sebagai upaya proaktif masyarakat untuk menciptakan ketahanan rumah dan kesejahteraan jangka panjang bagi keluarga mereka. makna ini tercermin dalam pengalaman sb penerima bantuan bps pada tahun 2024 berumur 54 tahun mengatakan bahwa :

*“...dulunya inikan rendah sekali ini rumah tidak cukup satu jengkal dari pintu jadi panas sekali kebawa. jadi saya bilang sama tukang kasi tinggi memang mi sempat kedepan saya ada rejeki saya bisa lanjut perbaiki, karena disini juga rawan banjir, ada saluran air tapi tidak berfungsi makanya itumi yang sering buntu, jadi biar bukan banjir umum istilahnya kita disini sudah*

*kebanjiran, sekitar sampai lutut tingginya air kalau banjir. jadi ini rumah sudah dikasi tinggi ke atas nantilah saya kalau ada uang saya lanjut lagi pengerjaannya” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).*

artinya :

“...dulu rumah ini sangat rendah, jarak dari pintu ke atap tidak sampai satu jengkal, jadi rumah ini sangat panas ke bawah. makanya saya bilang ke tukang supaya rumah ini ditinggikan. saya pikir nanti kalau ada rezeki, saya bisa lanjutkan perbaikan lagi. apalagi di sini rawan banjir, saluran air ada tapi tidak berfungsi dengan baik sehingga sering tersumbat. jadi meskipun bukan banjir besar, di sini kami sudah kebanjiran. air bisa setinggi lutut kalau banjir datang. sekarang rumah ini sudah agak ditinggikan ke atas, nanti kalau ada uang lagi akan saya lanjutkan pengerjaannya” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).

rs penerima bantuan bsps pada tahun 2024 berumur 65 tahun lebih lanjut mengatakan bahwa :

*“...pertama dikutaknanga rong kana balla apa di keroki jari kukana balla batu tapi sarei naik cor bentangna ka punna sappu tena na sallo panrakmi seng conthnami anjo ballaka bakleang kana nakbiring roboh bentengna iami antu na di cor benteng ballaka, ka naiki jekneka ka anne ri boko ballaka rawa-rawa jari punna bosu naiki jekneka, kukanaja daripada ammajiki pinruangki mending di cormi supaya kassaki naik di pake” (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).*

artinya :

“...pertama saya ditanya, rumah seperti apa yang ingin dibangun. saya jawab rumah batu, tetapi tiangnya harus dicor. sebab, kalau menggunakan kayu ulin tidak akan bertahan lama. contohnya rumah di samping yang menggunakan kayu ulin, kini sudah mulai rusak. karena itu, rumah ini saya pilih menggunakan tiang cor, apalagi di belakang rumah terdapat rawa-rawa sehingga ketika hujan air sering naik. jadi menurut saya, daripada harus memperbaiki berkali-kali, lebih baik dibuat dengan tiang cor agar kuat dan tahan lama digunakan.” (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).

temuan penelitian menunjukkan bahwa sejumlah kelompok masyarakat penerima bantuan bsps memaknai swadaya sebagai investasi jangka panjang yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan rumah. swadaya diwujudkan melalui keputusan strategis, seperti meninggikan bangunan untuk mengantisipasi banjir dan memilih material yang lebih kuat dan tahan lama, meskipun membutuhkan tambahan biaya di luar dana bantuan. keputusan tersebut didasarkan pada pengalaman langsung masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan risiko kerusakan rumah di masa depan.

berbeda dengan makna swadaya sebagai kemandirian dan tanggung jawab yang berfokus pada keberlangsungan pembangunan, subtema ini menyoroti swadaya sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada ketahanan dan manfaat hunian di masa depan. makna swadaya sebagai investasi jangka panjang mencerminkan orientasi masyarakat yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan hunian saat ini, tetapi juga pada keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi keluarga. swadaya dipahami sebagai upaya proaktif untuk meminimalkan risiko kerusakan, mengurangi biaya perbaikan di kemudian hari, serta menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam jangka panjang. dengan demikian, swadaya tidak dipersepsikan sebagai beban semata, melainkan sebagai keputusan rasional yang diperhitungkan secara matang.

dalam perspektif interaksionisme simbolik herbert blumer, makna swadaya sebagai investasi jangka panjang terbentuk melalui proses interpretasi masyarakat terhadap pengalaman hidup dan kondisi lingkungan sekitarnya. risiko banjir, kualitas material bangunan, dan pengalaman melihat kerusakan rumah lain menjadi simbol-simbol yang dimaknai oleh masyarakat dalam menentukan tindakan pembangunan. melalui proses *self interaction*, individu menafsirkan situasi tersebut dan mengambil keputusan untuk berinvestasi pada kualitas bangunan sebagai tindakan yang dianggap paling bermakna dan rasional. swadaya, dalam konteks ini, menjadi simbol upaya perlindungan diri dan keluarga terhadap ketidakpastian di masa depan.

berbeda dengan penelitian andika et al. (2023) dan aprianus (2021) yang lebih menekankan dampak program bpsps terhadap peningkatan kondisi fisik rumah dan kesejahteraan sosial penerima bantuan, penelitian ini secara khusus mengungkap dimensi makna swadaya sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada ketahanan hunian. sementara itu, penelitian pambuditama dan priyanto (2023) mengidentifikasi keterbatasan sumber daya penerima bantuan sebagai faktor risiko yang mendorong pengorbanan ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa pengorbanan tersebut dimaknai secara positif sebagai strategi investasi untuk menghindari kerusakan berulang dan biaya perbaikan di masa depan. dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian bpsps dari sekadar evaluasi program dan risiko pelaksanaan menuju pemahaman tentang cara masyarakat membangun makna swadaya berdasarkan pengalaman dan pertimbangan jangka panjang

implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat penerima bpsps memiliki kapasitas reflektif dalam merencanakan pembangunan rumah secara berkelanjutan. oleh karena itu, pelaksanaan program bpsps perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan dan risiko lokal, serta memberikan ruang fleksibilitas agar swadaya yang dilakukan masyarakat dapat diarahkan pada peningkatan ketahanan hunian jangka panjang tanpa menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan.

#### 2.4.4 swadaya sebagai gotong royong dan solidaritas sosial

makna swadaya sebagai bentuk gotong royong dan solidaritas sosial menggambarkan bagaimana masyarakat penerima program bps di kelurahan pattalasang tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah secara individual, tetapi juga melibatkan keluarga, tetangga, dan komunitas sekitar dalam proses pembangunan rumah. swadaya dalam konteks ini mencakup bentuk partisipasi kolektif, seperti bantuan tenaga kerja dari anggota keluarga dan kerabat, serta dukungan material tambahan yang bersifat sukarela dan saling membantu. sikap solidaritas ini memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial yang saling menopang, sekaligus menjadi strategi untuk mengatasi keterbatasan dana dan tenaga. dengan demikian, gotong royong bukan sekadar tradisi sosial, melainkan juga manifestasi praktis dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program bps. gambaran tersebut dapat dilihat dari pernyataan sb penerima bantuan bps pada tahun 2024 berumur 54 tahun mengatakan bahwa :

*"...kemarin itu ada anak, sepupu juga yang bantu kerja ini rumah karena sudah di prediksi bilang kalau sekian ji ongkos kerjanya yang dikasiki mana bisa cukup makanya ini rumah sebenarnya masih terbengkalai yang di atas tapi syukur ini sudah bisami tinggi, jadi ya kami senang karena ada ini bantuan"* (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).

artinya :

"...kemarin ada anak dan sepupu yang membantu pengerjaan rumah, karena memang dari awal sudah diprediksi bahwa ongkos kerja yang diberikan tidak akan cukup. makanya rumah ini sebenarnya masih terbengkalai di bagian atas, tapi syukur alhamdulillah setidaknya sudah bisa berdiri lebih tinggi. jadi kami sangat senang adanya bantuan ini" (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).

st penerima program bps pada tahun 2024 berumur 56 tahun mengatakan bahwa :

*"waktu niamo arengku di suruhma abboyo tukang jari kukiomi saribattangku, kakangku siagang adekku di bali tongmi siagang anaka, nakkeji tanggungi kanrena kodong soal gajina adapi itu uang dari pemerintah baru dii kasih, jadi bertahap anne gajina tukanga 2,5 jt na dua kali tahap"* (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).

artinya :

"setelah mengetahui nama saya tercatat sebagai penerima bantuan adalah memanggil saudara, kakak, dan adik saya, serta dibantu juga oleh anak saya. persoalan biaya makan saya pribadi yang menanggung, sedangkan upah kerja baru diberikan setelah pencairan dana dari bank, yaitu sebesar

2,5 juta dalam dua tahap pencairan” (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).

rs penerima bantuan bps pada tahun 2024 berumur 65 tahun lebih lanjut mengatakan bahwa :

*“...anne tukanga nakkeji antentukangi, jari ku kiomi anjo anak katuoku anak angka arena, nakanaji nakkemo anjamngki ballatta amma supaya tena na jai dudu di pasuluk doe, tapi manna mammo anakku iya kusare tongi sekre juta ku balliang tomi pole kaluruk”* (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).

artinya :

“...untuk tukang kan saya yang menentukan jadi saya serahkan pada anak asuh saya. dia bilang, biar dia saja yang mengerjakan rumah saya supaya saya tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan biaya. namun, meskipun dia anak asuh saya, tetap saya beri uang sebesar satu juta rupiah dan juga saya belikan rokok sebagai bentuk penghargaan atas bantuannya” (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).

sr penerima program bps pada tahun 2023 berumur 65 tahun juga mengatakan bahwa :

*“...riolo wattunna anne dibajiki ballaka sangnging sa’ribatangkuji ambalia, ka anne sampingna anne ballaka siagang riboko ballaka sangnging sa’ribatangkuji jari ia ngaseng mi anjo antambaia ammali bahan, jari punna nia tawwa akkana ngapa nalompo kamma anjo ballana ia nampa bantuan bedah rumah ja, ka nambaia antu nakkulle lompo kamma anne ballakku”* (wawancara pada jumat, 8 agustus 2025).

artinya :

“...dulu, saat proses perbaikan rumah ini, saya banyak dibantu oleh saudara-saudara saya. kebetulan rumah di samping dan di belakang juga milik saudara saya, sehingga merekalah yang membantu menambah dana untuk membeli material tambahan. jadi, jika ada orang yang bertanya mengapa rumah saya bisa sebesar ini padahal berasal dari rumah bantuan, saya akan jawab bahwa saya menambah dana sendiri sehingga rumah ini bisa terbangun lebih besar” (wawancara pada jumat, 8 agustus 2025).

temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat penerima bantuan bps memaknai swadaya sebagai bentuk gotong royong dan solidaritas sosial yang melibatkan keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar. swadaya tidak hanya diwujudkan dalam bentuk dana tambahan, tetapi juga melalui bantuan tenaga kerja, dukungan material, serta pengaturan kerja secara kolektif untuk mengatasi keterbatasan biaya dan tenaga selama pembangunan rumah. keterlibatan keluarga dan komunitas menjadi strategi penting agar pembangunan tetap dapat berlangsung

meskipun dana bantuan dan kemampuan ekonomi penerima terbatas.

berbeda dengan subbagian sebelumnya yang menempatkan swadaya sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada ketahanan hunian di masa depan, subbagian ini menyoroti swadaya sebagai praktik kolektif yang berakar pada nilai gotong royong dan solidaritas sosial dalam proses pembangunan rumah. makna swadaya sebagai gotong royong dan solidaritas sosial mencerminkan pandangan masyarakat bahwa pembangunan rumah bukan semata urusan individu penerima bantuan, melainkan tanggung jawab sosial yang dijalani bersama. bantuan dari anak, saudara, tetangga, dan kerabat dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan yang memperkuat ikatan sosial di tengah keterbatasan. dalam konteks ini, swadaya dipahami sebagai mekanisme sosial untuk saling menopang, menjaga keharmonisan hubungan, serta mengurangi beban ekonomi yang harus ditanggung secara individual.

dalam perspektif interaksionisme simbolik herbert blumer, makna gotong royong dalam swadaya terbentuk melalui interaksi sosial yang berulang antara individu dan lingkungan sosialnya. bantuan tenaga, material, dan keterlibatan keluarga menjadi simbol solidaritas yang dimaknai secara kolektif sebagai tindakan wajar dan bernilai moral. melalui proses *self-interaction*, individu menafsirkan keterbatasan yang dihadapi dan memaknai keterlibatan orang lain sebagai bentuk dukungan sosial yang sah dan bermakna. dengan demikian, swadaya berfungsi sebagai simbol kebersamaan yang lahir dari pengalaman bersama dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

berbeda dengan penelitian andika et al. (2023) dan zulfachry et al. (2023) yang menempatkan gotong royong sebagai faktor pendukung efektivitas dan kelancaran implementasi program bsps, penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana gotong royong tersebut dimaknai oleh masyarakat penerima bantuan sebagai bagian dari strategi bertahan dan solidaritas sosial. sementara itu, penelitian julianto (2020) menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat non-penerima dalam program bsps, penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat keluarga dan kerabat dekat, solidaritas sosial justru berperan signifikan dalam menopang pelaksanaan pembangunan rumah. dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menempatkan gotong royong bukan hanya sebagai variabel partisipasi program, tetapi sebagai konstruksi makna sosial yang lahir dari interaksi dan pengalaman kolektif masyarakat penerima bantuan.

implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program bsps tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan atau mekanisme teknis program, tetapi juga oleh kuatnya modal sosial berupa gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat. oleh karena itu, pelaksanaan bsps perlu mempertimbangkan dan memperkuat dimensi sosial ini melalui pendekatan pendampingan yang sensitif terhadap jaringan keluarga dan komunitas, agar swadaya kolektif yang muncul dapat

menjadi sumber daya pendukung tanpa menimbulkan ketergantungan atau konflik sosial.

#### 2.4.5 swadaya sebagai identitas dan harga diri penerima bantuan

makna swadaya dalam konteks program bpsps tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas sosial dan harga diri masyarakat penerima bantuan. swadaya di sini mencerminkan usaha dan komitmen individu dalam mengupayakan perbaikan rumah sebagai simbol keberhasilan, martabat, dan pengakuan sosial di lingkungan sekitar. melalui keterlibatan aktif dalam pembangunan dan tambahan dana pribadi, masyarakat merasa memiliki rumah mereka secara sah, bukan sekadar sebagai penerima bantuan semata. hal ini turut membangun rasa percaya diri dan status sosial yang lebih baik, sekaligus mengurangi stigma negatif terkait penerimaan bantuan. selain itu, perbedaan perspektif gender juga terlihat pada makna swadaya, di mana perempuan menekankan aspek stabilitas dan keamanan keluarga, sedangkan laki-laki lebih menonjolkan prestise dan penghormatan sosial. dengan demikian, swadaya menjadi wujud nyata dari harga diri dan identitas yang melekat pada keberhasilan memiliki rumah layak huni. cara pandang tersebut tergambar dalam pernyataan sr penerima program bpsps pada tahun 2023, berumur 65 tahun mengatakan bahwa :

*“...alhamdulillah, baji anjo ka nia pamarenta ero bantuki manna mammo dikana anjo doe battu ripamarenta tena naganna, ditambah mami tapi anjo poeng sanna mo di sukurinna ka nia pamarenta angnunguluanga ero ambajiki ballaku. sebenarna tena rencanaku ero ambajiki balla mingka nia informasi kana anggappaya bantuan alhamdulillah akkulle tongma a'balla batu, punna anu battu ngaseng poeng ripamarenta kamma tong teai katte pata balla jari manna mammo ditambah ka anne ballaka anunta ji”* (bahasa makkassar, jumat, 8 agustus 2025).

artinya :

*“...alhamdulillah, kami beruntung ada pemerintah yang ingin membantu kami walaupun dana dari pemerintah itu kurang sehingga kami harus menambah dana tapi semua itu kami syukuri karena ada pemerintah yang mendahului proses perbaikan rumah saya. sebenarnya saya tidak punya rencana dalam memperbaiki rumah tapi karena ada informasi bahwa saya mendapatkan bantuan ini sekarang saya bisa membangun rumah, jika semua bantuan ini dari pemerintah rasanya ini rumah bukan punya kita walaupun harus menambah uang karena memang ini rumah punya kita”* (wawancara pada jumat 8 agustus 2025).

sb penerima bantuan bpsps pada tahun 2024 berumur 54 tahun lebih lanjut mengatakan bahwa :

*“...saya juga baggakan beliau berkat pak hamka bisa begini rumah bahkan saya minta terima kasi sama krunya yang datang kesini yang survei saya*

*terima kasih sekali. istilahnya tena mo na tuna dudu ballaka karena kita liat itu mereka kodong yang tidak layak itu” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).*

artinya :

*“...saya sangat membanggakan beliau karena berkat pak hamka rumah saya kini jauh lebih baik. saya juga berterima kasih kepada tim yang telah datang melakukan survei. sekarang kami tidak lagi merasa hina di masyarakat, sebab di luar sana masih banyak masyarakat yang masih mempunyai rumah yang tidak layak” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).*

st penerima program bsps pada tahun 2024 berumur 56 tahun mengatakan bahwa :

*“jadi tenang tenangmi anne perasaannya karena adami rumah yang di tempati, jadi kuanggap anne ballaka sebaagai bentuk keberhasilan, beruntung sekalia karena ada ini bantuan kadde nakketong tenamo ka kemaia ngalle doe sikamma anjo, riolo ammantanga ri ballana andika jari niamo anne alhaamdulillah ammantang tomma ri ballakkui, walaupun ilalangna anne tenapa na lekba di pelester tapi mudah-mudahan anaka sallang antampaki anne na kulle na pelester” (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).*

artinya :

*“sekarang perasaan saya sudah lebih tenang karena saya sudah memiliki rumah sendiri yang bisa saya tempati. saya menganggap rumah ini sebagai bentuk keberhasilan dan merasa sangat beruntung mendapatkan bantuan. seandainya hanya mengandalkan usaha saya sendiri, mungkin hal ini tidak akan tercapai karena saya tidak memiliki pemasukan tetap. dulu saya hanya menumpang di rumah adik saya, tetapi sekarang saya sudah memiliki rumah sendiri, meskipun belum sepenuhnya selesai karena temboknya belum diplester. saya berharap suatu saat nanti anak saya bisa memperbaikinya” (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).*

jika dibandingkan dengan informan laki-laki, narasi st lebih menekankan pada rasa aman, kepastian tempat tinggal, dan keberhasilan keluarga. hal ini berbeda dengan laki-laki yang cenderung menekankan martabat dan prestise sosial. perbedaan ini menunjukkan bahwa makna swadaya juga dipengaruhi oleh perspektif gender: bagi perempuan, rumah adalah simbol stabilitas keluarga, sedangkan bagi laki-laki rumah lebih terkait dengan harga diri sosial.

rs penerima bantuan bsps pada tahun 2024 berumur 65 tahun lebih lanjut mengatakan bahwa :

*“jadi selama lekbname anne di bangun ballaka alhamdullilah manna mamo*

*lekkakki anne di operasi kulle tong jaki ampaklebbaki anne ballaka di bangun percaya diri tong maki anne ri tetangga-tetanggya ka kulle tongja akbangung balla manna mamu battu ri pamarentah tapi annambai tongja, niamo antu mae akkana anu nakkke siratang anggappa tapi kukana teako salahkanngia ka nakke anu di data tongja, tapi kang ia tena sertifiikatna jari tena na anggap, kadde kapang nakke pamarentah ku sarei, tapi selama anne na agangja appau iya tenaja na larro ante kamma, ngiri matangnaji” (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).*

artinya :

“saya sangat bersyukur rumah ini sudah selesai dibangun. meskipun kondisi kaki saya sudah pernah dioperasi, saya tetap bisa menyelesaikan pembangunan rumah ini. dengan adanya bantuan ini, saya merasa lebih percaya diri di hadapan tetangga, karena saya juga bisa membangun rumah. memang rumah ini dibangun dari bantuan pemerintah, tetapi saya juga menambah dana pribadi. ada sejumlah kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa merekalah yang lebih pantas mendapatkan bantuan ini, namun saya selalu katakan bahwa jangan salahkan saya, karena saya hanya didata dan kebetulan terpilih sebagai penerima. mereka tidak bisa mendapatkan bantuan karena tidak memiliki sertifikat. seandainya saya yang menjadi pemerintah, saya akan memberikan bantuan ini kepada semua masyarakat. selama ini mereka tidak membenci saya, hanya saja ada rasa iri terhadap bantuan yang saya terima” (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).

temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat penerima program bpsp memaknai swadaya tidak hanya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga sebagai sarana membangun identitas sosial dan harga diri. keterlibatan aktif dalam pembangunan rumah serta penambahan dana pribadi membuat masyarakat merasa memiliki rumah tersebut secara utuh, bukan sekadar sebagai penerima bantuan pemerintah. swadaya dipersepsikan sebagai bukti usaha, komitmen, dan keberhasilan pribadi yang berdampak pada meningkatnya rasa percaya diri serta pengakuan sosial di lingkungan sekitar. selain itu, ditemukan adanya perbedaan perspektif gender dalam memaknai swadaya, di mana perempuan lebih menekankan aspek rasa aman dan stabilitas keluarga, sementara laki-laki cenderung menekankan martabat dan prestise sosial.

jika pada subbagian sebelumnya swadaya dipahami sebagai praktik kolektif yang berakar pada nilai gotong royong dan solidaritas sosial, subbagian ini menyoroti swadaya sebagai proses pembentukan identitas sosial dan harga diri masyarakat penerima bantuan. makna swadaya sebagai identitas sosial dan harga diri menunjukkan bahwa rumah tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol keberhasilan dan martabat. dengan menambah dana dan terlibat langsung dalam proses pembangunan, masyarakat menegaskan bahwa rumah tersebut adalah hasil usaha mereka sendiri. makna ini turut mengurangi stigma negatif sebagai penerima bantuan dan memperkuat posisi sosial mereka di

tengah masyarakat. bagi perempuan, rumah dimaknai sebagai sumber ketenangan, keamanan, dan kepastian masa depan keluarga, sedangkan bagi laki-laki, rumah menjadi simbol penghormatan sosial dan legitimasi status sebagai kepala keluarga yang mampu membangun hunian layak.

dalam perspektif interaksionisme simbolik herbert blumer, makna rumah dan swadaya terbentuk melalui proses interaksi sosial dan interpretasi individu terhadap respons lingkungan sekitarnya. rumah yang dibangun melalui swadaya menjadi simbol identitas yang dimaknai secara personal dan sosial. melalui proses *self-interaction*, masyarakat menafsirkan keterlibatan mereka dalam pembangunan sebagai bukti kemampuan dan kelayakan sosial. pengakuan, rasa bangga, maupun respons lingkungan—termasuk rasa iri atau penghormatan—menjadi bagian dari proses pembentukan makna tersebut. perbedaan perspektif gender dalam memaknai swadaya juga menunjukkan bahwa makna sosial dibentuk oleh peran, pengalaman, dan ekspektasi sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

berbeda dengan penelitian andika et al. (2023) dan aprianus (2021) yang lebih menekankan dampak program bps terhadap perbaikan kondisi fisik rumah dan perubahan sosial ekonomi penerima bantuan, penelitian ini secara khusus mengungkap dimensi simbolik swadaya sebagai pembentuk identitas sosial dan harga diri. sementara itu, penelitian julianto (2020) membahas partisipasi masyarakat dalam program bps dari sisi keterlibatan dan pemanfaatan bantuan, penelitian ini melampaui aspek tersebut dengan menunjukkan bagaimana partisipasi dan swadaya dimaknai sebagai sarana memperoleh pengakuan sosial dan mengurangi stigma sebagai penerima bantuan. dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian bps dengan menempatkan swadaya sebagai konstruksi makna yang berkaitan erat dengan identitas, martabat, dan relasi sosial masyarakat penerima bantuan.

implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bps memiliki dampak sosial yang lebih luas dari sekadar perbaikan fisik hunian. program ini turut memengaruhi pembentukan identitas dan harga diri penerima bantuan. oleh karena itu, kebijakan bps perlu mempertimbangkan dimensi simbolik dan psikososial penerima, termasuk sensitivitas terhadap perbedaan perspektif gender, agar program tidak hanya meningkatkan kualitas rumah, tetapi juga memperkuat martabat dan kepercayaan diri masyarakat tanpa menimbulkan stigma sosial.

#### **2.4.6 swadaya sebagai beban ekonomi**

makna swadaya dalam program bps tidak selalu dipandang positif oleh masyarakat; bagi sejumlah kelompok penerima bantuan, swadaya juga menimbulkan beban ekonomi. masyarakat harus menanggung biaya tambahan di luar bantuan pemerintah, termasuk untuk membeli material, membayar upah tukang, serta kebutuhan logistik lain selama pembangunan rumah. beban ini kadang

memaksa mereka meminjam uang, menjual aset pribadi, atau mengandalkan bantuan keluarga untuk menutupi kekurangan dana. kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun swadaya memperkuat partisipasi dan tanggung jawab penerima bantuan, secara ekonomi hal itu tetap menjadi tekanan yang nyata, yang memerlukan perencanaan, pengorbanan, dan manajemen keuangan yang cermat. dengan demikian, swadaya memiliki dimensi ganda: sebagai bentuk kontribusi dan tanggung jawab sosial, sekaligus sebagai tekanan finansial bagi masyarakat penerima bantuan. makna ini tercermin dalam pengalaman rs penerima bantuan bspis pada tahun 2024 berumur 65 tahun mengatakan bahwa :

*“anne ballaka caritangna di karo2i ka eroki di foto untuk laporanna kulleji antu dicinik rateang kana tenapa na lekba bajik, sukkuruja anne kana nia bantuang tapi susah tongja pode ka annambai tong jaki, jari punna tena ku nginrang tena tongja pode na lekba, jari mau tidak mau nginrangi tawwa ri tetanggaiya”* (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).

artinya :

“pembangunan rumah ini dipercepat karena harus difoto untuk laporan. bisa dilihat, bagian atasnya memang belum selesai. namun, saya tetap bersyukur ada bantuan ini. hanya saja, ada juga beban karena kami harus menambah biaya pengerjaan. kalau tidak meminjam uang, rumah ini tidak akan selesai. jadi, mau tidak mau kami harus meminjam kepada tetangga” (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).

lebih lanjut beliau menuturkan :

*“...teapi anjo kanrena tukang katte asengmi anjo tanggongoi kebutuhanna, kalurukna pode tena naganna punna dikana 2,5 juta ji, jari walaupun dikana anne programnga saling membantu tapi kammami anjo na sare tong jaki beban, tapi anne akhirnya lappasami anakku ta' sikedde na bayara”* (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).

artinya :

“...belum lagi biaya makan para tukang yang juga harus kami tanggung, termasuk kebutuhan seperti rokok. karena kalau hanya mengandalkan dana rp2,5 juta saja, itu jelas tidak cukup, jadi, meskipun bantuan ini disebut sebagai bentuk saling membantu, tetap saja ada beban yang kami rasakan. namun pada akhirnya, utang saya bisa lunas karena sudah dibayarkan oleh anak saya” (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).

sb penerima bantuan bspis pada tahun 2024 berumur 54 tahun lebih lanjut mengatakan bahwa :

*“...tena anne naku siri siri ampau andi nia inja anne 5 juta inrangku anne kamma kamma anne tenapa nalappasa, lakbusumi rante ku lakbusumi ponto ku cincinku tena mentong mo”* (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).

artinya :

“...saya tidak malu-malu mengatakan dek, bahwa saya masih punya pinjaman sebesar rp5 juta yang sampai sekarang belum lunas. semua perhiasan saya, baik itu kalung, gelang, maupun cincin, sudah habis terjual” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).

dalam perspektif interaksionisme simbolik, pernyataan ini menunjukkan proses *definition of situation*, di mana penerima bantuan mendefinisikan program bps sebagai situasi yang menuntut pengeluaran tambahan yang sulit dipenuhi. bps tidak dimaknai sebagai peluang pemberdayaan, melainkan sebagai kewajiban yang menghadirkan tekanan ekonomi baru. definisi situasi ini terbentuk melalui pengalaman langsung menghadapi keterbatasan dana, kenaikan harga material, serta kebutuhan untuk membayar upah tukang selama proses pembangunan.

melalui interaksi sosial dengan fasilitator, aparat kelurahan, dan sesama penerima bantuan, makna tersebut berkembang menjadi *shared meaning* bahwa swadaya merupakan kewajiban administratif yang tidak dapat dihindari. makna bersama ini beredar dalam percakapan sehari-hari antar penerima bantuan, terutama ketika mereka saling berbagi pengalaman mengenai kekurangan dana dan kesulitan memenuhi standar pembangunan yang ditetapkan program. dalam konteks ini, swadaya dipahami bukan sebagai partisipasi sukarela, melainkan sebagai tuntutan yang harus dipenuhi agar bantuan tetap berlanjut.

makna swadaya sebagai beban ekonomi juga tercermin dari tindakan konkret masyarakat, seperti menjual aset, menggadaikan perhiasan, atau meminjam uang kepada kerabat dan tetangga. tindakan-tindakan tersebut bukan semata-mata keputusan ekonomi rasional, tetapi merupakan respons terhadap makna swadaya yang telah terbangun secara sosial sebagai kewajiban yang menekan.

dalam kerangka interaksionisme simbolik, kondisi ini menunjukkan adanya proses *role taking*, di mana penerima bantuan menyesuaikan perilaku mereka dengan peran sosial sebagai “penerima program yang patuh”. individu membayangkan ekspektasi fasilitator dan aparat pemerintah yang mengharapkan pembangunan rumah berjalan sesuai ketentuan, sehingga meskipun merasa terbebani secara ekonomi, mereka tetap berupaya memenuhi tuntutan swadaya agar tidak dianggap gagal atau tidak layak menerima bantuan.

namun demikian, proses *role taking* ini tidak selalu menghasilkan partisipasi yang bermakna. pada beberapa kasus, tekanan ekonomi yang kuat justru melahirkan partisipasi yang bersifat semu, di mana masyarakat secara formal mengikuti aturan program, tetapi secara psikologis mengalami kecemasan, rasa tertekan, dan ketakutan tidak mampu menyelesaikan pembangunan rumah. hal ini menunjukkan bahwa ketika swadaya dimaknai sebagai beban ekonomi, tujuan pemberdayaan dalam program bps berpotensi melemah.

berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa maknaswadaya sebagai beban ekonomi merupakan hasil dari proses konstruksi makna yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan interaksi sosial di tingkat lokal. melalui *definition of situation*, masyarakat menafsirkan bsps sebagai tuntutan tambahan; melalui *shared meaning*, makna tersebut dilembagakan sebagai kewajiban kolektif; dan melalui *role taking*, individu menyesuaikan tindakan mereka meskipun berada dalam tekanan ekonomi. proses ini menegaskan bahwa beban ekonomi yang dirasakan masyarakat bukan semata-mata persoalan finansial, tetapi juga persoalan makna sosial yang hidup dalam implementasi program.

berbeda dengan penelitian andika et al. (2023) dan aprianus (2021) yang lebih menekankan pada keberhasilan program bsps dalam meningkatkan kualitas rumah dan kondisi sosial ekonomi penerima, penelitian ini menyoroti pengalaman subjektif masyarakat terkait beban ekonomi yang menyertai swadaya. sementara itu, penelitian pambuditama dan priyanto (2023) mengidentifikasi keterbatasan sumber daya penerima bantuan sebagai faktor risiko pelaksanaan program, termasuk praktik menjual atau menggadaikan aset. penelitian ini memperdalam temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya dipandang sebagai risiko program, tetapi dimaknai langsung oleh masyarakat sebagai beban finansial yang harus ditanggung demi menyelesaikan pembangunan rumah. dengan demikian, penelitian ini menambahkan dimensi makna subjektif yang belum banyak diungkap dalam kajian bsps sebelumnya.

adapun matriks hasil penelitian masyarakat memaknai konsep swadaya pada program bsps di kelurahan pattallassang dapat dilihat dalam tabel berikut :

tabel 2.3 matriks hasil penelitian

tema	makna subyektif	bukti empiris kunci
swadaya sebagai kemandirian	swadaya dimaknai sebagai hasil interpretasi masyarakat terhadap bantuan bsps sebagai stimulus awal. makna terbentuk melalui pengalaman langsung menghadapi keterbatasan dana.	<i>"kalau hanya mengandalkan dana 20 juta tentu tidak cukup... lebih baik saya membantu sendiri supaya uangnya bisa dipakai beli bahan"</i> (id, 2021).
swadaya sebagai tanggung jawab	makna swadaya terbentuk melalui proses refleksi diri ketika individu menilai kemampuan ekonomi dan memilih tindakan yang dianggap paling bertanggung jawab.	<i>"harus disesuaikan dengan kemampuan, karena kalau dipaksakan bisa jadi beban... janganmi mau berubah-ubah karena memang berat"</i> (id, 2021).

swadaya sebagai investasi jangka panjang	swadaya dimaknai sebagai keputusan untuk melindungi diri dari risiko masa depan berdasarkan pengalaman lingkungan.	<i>“saya bilang sama tukang kasi tinggi karena di sini rawan banjir... daripada perbaiki berkali-kali lebih baik kuat dari awal” (sb, 2024).</i>
swadaya sebagai gotong royong dan solidaritas sosial	swadaya dimaknai sebagai gotong royong dan solidaritas sosial yang menempatkan pembangunan rumah sebagai tanggung jawab kolektif yang dijalankan melalui keterlibatan keluarga dan kerabat dalam bentuk bantuan tenaga dan dukungan sosial.	<i>“anak dan sepupu ikut bantu kerja rumah ini karena ongkos tukang tidak cukup” (sb, 2024).</i>
swadaya sebagai identitas dan harga diri	swadaya dimaknai sebagai simbol martabat dan pengakuan sosial.	<i>“sekarang saya lebih percaya diri di hadapan tetangga, karena saya juga bisa bangun rumah walaupun dari bantuan” (rs, 2024).</i>
swadaya sebagai beban ekonomi	makna swadaya berubah ketika pengalaman utang dan tekanan finansial mendominasi proses pembangunan.	<i>“kalau tidak meminjam uang, rumah ini tidak akan selesai... mau tidak mau pinjam ke tetangga” (rs, 2024).</i>

sumber: hasil olahan data primer 2025

## 2.5 kesimpulan

berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di kelurahan pattallassang memaknai swadaya dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) secara beragam dan tidak tunggal. swadaya dimaknai sebagai bentuk kemandirian dan tanggung jawab, di mana masyarakat berperan aktif dalam melengkapi keterbatasan bantuan pemerintah agar pembangunan rumah dapat diselesaikan sesuai kebutuhan keluarga.

selain itu, swadaya juga dipahami sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan hunian, serta sebagai wujud gotong royong dan solidaritas sosial yang melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar. di sisi lain, swadaya turut dimaknai sebagai identitas dan harga diri, karena keterlibatan aktif dalam pembangunan rumah meningkatkan rasa memiliki, kepercayaan diri, dan

pengakuan sosial penerima bantuan.

namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa swadaya dapat dimaknai sebagai beban ekonomi, terutama bagi penerima bantuan dengan keterbatasan sumber daya. kewajiban menambah biaya di luar bantuan pemerintah menimbulkan tekanan finansial yang harus dihadapi masyarakat. dengan demikian, swadaya dalam program bsps merupakan konstruksi makna sosial yang bersifat dinamis dan kontekstual, terbentuk melalui pengalaman, interaksi sosial, serta kondisi ekonomi masyarakat penerima bantuan.

## 2.6 daftar pustaka

- alfansyur & mariyani. (2020). seni mengelola data: penerapan triangulasi, teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *historis: jurnal kajian, penelitian dan pengembangan pendidikan sejarah*, 5(2), 146–150.
- bappenas. (2004). *pedoman perencanaan partisipatif pembangunan daerah*. jakarta: bappenas.
- berger, p. l., & luckmann, t. (1966). *the social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge*. doubleday.
- blumer, h. (1969). *symbolic interactionism: perspective and method*. berkeley: university of california press.
- chaer, a. (2009). *linguistik umum*. jakarta: rineka cipta.
- chaer, a., & agustina, l. (2010). *sosiolinguistik: pengenalan awal*. jakarta: rineka cipta.
- creswell, j. w. (2013). *qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches* (3rd ed.). sage publications.
- damsar. (2015) *pengantar sosiologi pendidikan*. jakarta : kencana prenada media grub.
- soekanto, s. (2007). *sosiologi suatu pengantar*. jakarta: raja grafindo persada.
- goffman, e. (1959). *the presentation of self in everyday life*. garden city, ny: doubleday anchor books.
- hadi, s., sutopo, h. b., & widodo, s. (2021). *metodologi penelitian kualitatif: teori dan praktik*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- halliday, m. a. k., & hasan, r. (1985). *language, context, and text: aspects of language in a social-semiotic perspective*. oxford university press.
- haris, a., & amalia, a. (2018). makna dan simbol dalam proses interaksi sosial: sebuah tinjauan komunikasi. *jurnal dakwah risalah*, 29(2), 139–150.
- hazni, hayati, f., & mutiawati, y. (2023). analisis kegiatan main peran makro untuk menstimulasi percaya diri pada anak usia 4-5 tahun di tk cinta ananda banda aceh. *jurnal ilmiah mahasiswa*, 4(1), 1–10.
- kaharuddin. (2021). *metode penelitian kualitatif: panduan untuk penelitian lapangan*. jakarta: rajawali pers.
- kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. (2021). *petunjuk teknis pelaksanaan bsps tahun 2021*. direktorat jenderal perumahan, jakarta.
- kementerian pupr. (2020). *buku panduan bsps: bantuan stimulan perumahan*

- swadaya tahun 2020. jakarta: direktorat jenderal perumahan.
- keraf, g. (2006). diksi dan gaya bahasa. jakarta: gramedia.
- koentjaraningrat. (2009). pengantar ilmu antropologi. jakarta: rineka cipta.
- kridalaksana, h. (2001). kamus linguistik. jakarta: gramedia pustaka utama.
- khalawati, a. (2023). konstruksi sosial penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) sebagai identitas sosial: studi kasus desa pendem, kecamatan mojogedang, kabupaten karanganyar. *development and social change*, 6(2), 92-110
- leech, g. n. (1981). *semantics: the study of meaning*. london: penguin books.
- mcluhan, m. (1964). *understanding media: the extensions of man*. new york: mcgraw-hill.
- miles, m. b., & huberman, a. m. (1994). *qualitative data analysis: an expanded sourcebook*. thousand oaks, ca: sage publications.
- miles, m. b., huberman, a. m., & saldana, j. (2014). *qualitative data analysis: a methods sourcebook*. sage publications, inc.
- minantasari, w. i. (2008). swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa: suatu tinjauan pembangunan fisik di desa kayen lor, kecamatan plemahan, kabupaten kediri (skripsi sarjana, universitas brawijaya, malang).
- nasikun. (2007). *sistem sosial indonesia*. jakarta: rajagrafindo persada.
- radjab, m. (2014). bahan ajar metode penelitian kualitatif. jurusan sosiologi fisip unhas.
- rijali, a. (2019). analisis data kualitatif. *alhadharah: jurnal ilmu dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- rukmana, t. (2021). jurnal edu research indonesian institute for corporate learning and studies (iicls) page 25. *jurnal edu research : indonesian institute for corporate learning and studies (iicls)*, 2(2), 28–33.
- sihombing, r. (2020). metode penelitian. *metode penelitian kualitatif*, 17, 43.
- soetomo. (2011). pemberdayaan masyarakat: membangun masyarakat, memberdayakan rakyat. jakarta: pustaka pelajar.
- stake, r. e. (2006). *multiple case study analysis*. Guilford Press.
- sugiyono. 2019. *metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta.

sumaya, f. (2020). makna sosial dalam pendidikan bagi masyarakat di desa sungai jaga b kecamatan sungai raya kabupaten bengkayang. jurnal pendidikan dan kemasyarakatan, 7(2), 101–112.

suyanto, b. (2012). *sosiologi ekonomi: kapitalisme dan konsumsi di era masyarakat post-modernisme*. jakarta: kencana prenatal media group.

syarifuddin. (2016). swadaya masyarakat dalam pembangunan gampong aweek kecamatan kota jantho kabupaten aceh besar (skripsi sarjana, universitas islam negeri ar-raniry, banda aceh).

tarigan, h. g. (1990). pengajaran pragmatik. bandung: angkasa.

umiarso, & elbadiansyah. (2014). interaksionisme simbolik dari era klasik hingga modern. jakarta: rajagrafindo persada.

wulansari, d. (2009). sosiologi (konsep dan teori). bandung : pt refika aditama.

yule, g. (1996). pragmatics. oxford: oxford university press.

### **bab iii**

## **makna yang dibangun masyarakat mempengaruhi implementasi program bps di kelurahan pattalassang**

### **3.1 abstrak**

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna swadaya yang dibangun masyarakat dalam implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) di kelurahan pattalassang, kabupaten takalar. pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari penerima bantuan, masyarakat non-penerima, aparat pemerintah, serta fasilitator program. hasil penelitian menunjukkan bahwa makna swadaya yang dibangun masyarakat sangat beragam dan memengaruhi jalannya implementasi bps. sejumlah kelompok penerima bantuan memaknai swadaya sebagai bentuk kemandirian, tanggung jawab, dan gotong royong, sehingga mendorong percepatan pembangunan rumah dan peningkatan kualitas bangunan. namun, ada pula yang menafsirkan swadaya sebagai beban ekonomi dan tekanan administratif, yang berpotensi menghambat partisipasi. temuan ini menegaskan bahwa implementasi bps tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan, tetapi juga oleh konstruksi makna sosial yang dilekatkan masyarakat pada konsep swadaya. oleh karena itu, kebijakan perumahan perlu memperhatikan aspek makna sosial agar program lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi kelompok miskin.

**kata kunci:** swadaya, bantuan stimulan perumahan swadaya (bps), konstruksi makna, partisipasi masyarakat.

### **3.2 pendahuluan**

makna yang dibangun masyarakat menjadi salah satu elemen kunci dalam keberhasilan implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (bps). dalam kajian sosiologi, makna dipahami sebagai konstruksi sosial yang lahir melalui proses interaksi, negosiasi, dan pengalaman hidup sehari-hari. berger & luckmann (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial merupakan hasil konstruksi bersama melalui dialektika antara pengalaman subjektif individu dan struktur sosial yang mengatur kehidupannya. dalam konteks bps, makna yang dilekatkan masyarakat terhadap program ini tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, ekspektasi terhadap pemerintah, nilai-nilai budaya, serta dinamika sosial-ekonomi yang ada di lingkungan mereka.

blumer (1969) melalui perspektif interaksionisme simbolik menegaskan bahwa tindakan manusia didasarkan pada makna yang mereka berikan terhadap sesuatu, makna tersebut muncul dari interaksi sosial, dan senantiasa diubah melalui proses interpretasi. artinya, jika masyarakat memaknai bps sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan peluang untuk memperbaiki kualitas hidup, mereka akan cenderung berpartisipasi aktif, menambah dana swadaya, serta menjaga hasil

pembangunan. sebaliknya, jika program dipersepsikan sebagai kewajiban yang membebani atau sekadar janji politik, partisipasi dapat menjadi minimal, bahkan memunculkan resistensi sosial.

maknanya terkait erat dengan konsep partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. chambers (1997) menekankan bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang memberikan akses terhadap sumber daya, tetapi juga tentang membangun kesadaran kritis dan rasa kepemilikan terhadap proses pembangunan. makna yang positif akan memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*), sehingga rumah hasil bps dipandang sebagai hasil kolektif yang layak dipelihara. hal ini sejalan dengan pendapat uphoff (1992) yang menyatakan bahwa partisipasi yang didorong oleh kesadaran dan kemauan sendiri lebih berkelanjutan dibanding partisipasi yang dipaksakan dari luar.

lebih jauh, makna yang dibangun masyarakat memengaruhi cara mereka melakukan swadaya. dalam penelitian ini ditemukan bahwa sejumlah kelompok penerima bantuan menganggap swadaya sebagai wujud kemandirian dan tanggung jawab moral, sehingga rela meminjam uang, menjual aset, atau mengerahkan keluarga untuk membantu pembangunan. di sisi lain, ada kelompok yang memaknai swadaya sebagai beban ekonomi yang memaksa mereka mengorbankan kebutuhan lain. hal ini menunjukkan bahwa makna dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat keberhasilan program (miles huberman dan saldana, 2014).

pentingnya memahami makna yang dibangun masyarakat juga ditegaskan oleh creswell (2018), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana individu memberikan makna terhadap pengalaman hidup mereka. dengan memahami cara masyarakat menafsirkan bps, pemerintah dapat merancang strategi komunikasi dan pendampingan yang lebih kontekstual. misalnya, sosialisasi yang menekankan manfaat jangka panjang dan peran aktif masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dan mengurangi persepsi negatif.

dalam konteks kebijakan perumahan, makna yang dibangun masyarakat juga berdampak pada keberlanjutan hasil program. turner (1976) menyebutkan bahwa perumahan yang dikelola oleh masyarakat sendiri lebih tahan lama dan sesuai kebutuhan jika dibandingkan dengan model top-down yang sepenuhnya dikontrol pemerintah. oleh karena itu, keberhasilan bps tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang selesai dibangun, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa memiliki, puas dengan hasilnya, dan mampu mempertahankan kualitas rumah di masa mendatang.

dengan demikian, analisis makna yang dibangun masyarakat bukan hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam perbaikan kebijakan. jika pemerintah memahami persepsi, ekspektasi, dan kekhawatiran masyarakat, maka kebijakan dapat diarahkan untuk meminimalkan hambatan,

memperkuat motivasi partisipasi, dan mengurangi potensi ketidaksetaraan. hal ini akan memastikan bahwa bspis tidak hanya menjadi program bantuan sesaat, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat miskin yang berkelanjutan.

### **3.2.1 konstruksi makna swadaya**

memahami bagaimana makna dikonstruksi adalah inti dari banyak disiplin ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan psikologis sosial. konsep ini menyoroti bahwa makna dari segala sesuatu mulai dari objek sehari-hari hingga ide-ide abstrak bukanlah sesuatu yang inheren atau ditemukan, melainkan dibangun secara aktif melalui interaksi sosial dan interpretasi. material-material yang relevan dalam studi ini sering kali berakar pada perspektif yang menekankan peran bahasa, simbol, dan proses sosial dalam membentuk realitas kita.

salah satu landasan utamanya datang dari interaksionisme simbolik, sebuah aliran pemikiran yang berpendapat bahwa manusia bertindak terhadap suatu hal berdasarkan makna yang mereka berikan padanya, dan makna-makna ini muncul dari interaksi sosial (blumer, 1969) ; umiarso dan elbaniansyah, 2014). tokoh kunci seperti george herbert mead juga menunjukkan bagaimana pikiran, diri, dan masyarakat berkembang dari interaksi simbolik, di mana kemampuan individu untuk memahami perspektif orang lain sangat penting dalam membangun makna bersama (mead, 1934) ; umiarso dan elbaniansyah, 2014).

lebih lanjut, konsep konstruksionisme sosial secara eksplisit membahas bagaimana seluruh aspek realitas sosial diciptakan dan dipertahankan melalui konsensus dan interaksi manusia. peter l. berger dan thomas luckmann dalam karya seminal mereka, *the social construction of reality*, menjelaskan tiga proses utama: eksternalisasi (penciptaan produk sosial), objektivasi (produk tersebut menjadi seolah-olah objektif), dan internalisasi (individu belajar dan menerima realitas yang diobjektivasi). ini menunjukkan bagaimana makna yang kita konstruksi menjadi bagian dari "kebenaran" yang kita terima dalam masyarakat (berger dan luckmann, 1966).

pada konteks program bantuan stimulan perumahan swadaya (bps), konstruksi makna merujuk pada bagaimana arti dari "swadaya" yaitu partisipasi dan usaha mandiri penerima bantuan dalam membangun atau memperbaiki rumah mereka dibangun, ditafsirkan, dan dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat. konsep ini melampaui definisi formal program dan menggali bagaimana makna tersebut menjadi hidup dalam pengalaman dan interaksi sosial.

### **3.2.2 interaksi sosial**

interaksi sosial merupakan fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, merujuk pada hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan individu,

individu dengan kelompok, atau antar kelompok itu sendiri. sebagai makhluk sosial, manusia secara inheren saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri, sehingga interaksi ini menjadi esensial bagi kelangsungan proses sosial. para ahli seperti walgito (2003) menekankan bahwa interaksi sosial adalah proses yang melibatkan saling memengaruhi satu sama lain untuk membentuk sistem dalam hubungan sosial.

interaksi sosial memainkan peran krusial dalam membentuk makna swadaya pada program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps). program bps tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga memperkuat partisipasi dan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat. interaksi yang terjalin selama program berlangsung memengaruhi bagaimana penerima bantuan memandang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka dipandang oleh masyarakat sekitar (khalawati, 2023).

a. swadaya sebagai hasil negosiasi sosial

makna swadaya tidak bersifat tetap, tetapi hasil dari negosiasi sosial antara anggota masyarakat. dalam interaksi sehari-hari, individu berbagi pengalaman, nilai, dan pandangan mengenai apa itu swadaya, siapa yang dianggap "mandiri", dan apa batas bantuan dari luar yang masih bisa dikategorikan sebagai bagian dari swadaya. proses ini membentuk pemahaman kolektif tentang swadaya dalam komunitas tertentu.

b. peran nilai dan norma sosial

proses ini juga dipengaruhi oleh norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat. nilai-nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah, dan kepedulian sosial diwariskan melalui interaksi antar generasi dan dilembagakan dalam kehidupan sehari-hari. seiring waktu, nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk memahami tindakan swadaya sebagai kewajiban moral dan sosial, bukan sekadar pilihan individu (geertz, 1983). dalam kerangka ini, interaksi sosial tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang dan kerangka berpikir masyarakat terhadap konsep swadaya.

c. interaksi dengan institusi dan pemerintah

interaksi dengan institusi formal seperti pemerintah, lsm, atau program bantuan juga turut membentuk konstruksi makna swadaya. misalnya, dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps), pemerintah mensyaratkan keterlibatan aktif warga dalam pembangunan rumah, baik melalui tenaga kerja, bahan bangunan lokal, maupun partisipasi kelompok. kondisi ini menyebabkan masyarakat membangun maknabaru terhadap swadaya, yaitu sebagai sinergi antara bantuan eksternal dan kontribusi internal. dengan kata lain, interaksi antara

warga dan kebijakan publik membentuk ruang negosiasi makna, di mana swadaya tidak lagi hanya berarti mandiri sepenuhnya, tetapi juga mencakup kolaborasi dengan pihak luar selama masyarakat tetap menjadi aktor utama (kusnadi, 2010).

d. pengaruh pemimpin dan tokoh masyarakat

tokoh masyarakat seperti kepala desa, pemuka agama, atau tokoh adat memainkan peran penting dalam memperkuat makna swadaya melalui interaksi simbolik dan kepemimpinan sosial. mereka berfungsi sebagai agen makna yang memberikan arah, contoh, dan justifikasi moral terhadap tindakan swadaya. dalam banyak kasus, keterlibatan tokoh ini meningkatkan legitimasi kegiatan swadaya dan mendorong keterlibatan warga lain, sehingga makna swadaya menjadi lebih luas dan berlapis: sebagai tindakan mandiri, kolektif, dan bermuatan nilai (berger dan luckmann, 1966).

### 3.2.3 identitas sosial

identitas sosial tidak dapat dipahami sebagai konsep yang tunggal dan statis, melainkan terdiri dari berbagai dimensi yang saling berinteraksi dan bersifat kontekstual. secara umum, identitas sosial mencakup dua dimensi utama, yaitu identitas yang diklaim (*claimed identity*) dan identitas yang disematkan atau dikaitkan (*ascribed identity*). identitas yang diklaim merujuk pada bagaimana individu atau kelompok mendefinisikan dirinya sendiri berdasarkan pengalaman, nilai, dan afiliasi sosial yang dianggap penting. sebaliknya, identitas yang disematkan adalah identitas yang diberikan oleh pihak lain baik masyarakat, negara, maupun institusi sosial yang sering kali tidak sesuai dengan cara individu melihat dirinya sendiri (jenkins, 2008). ketegangan antara keduanya dapat melahirkan konflik atau negosiasi makna, terutama ketika label sosial yang diberikan berkonotasi negatif, seperti dalam kasus stigma terhadap penerima bantuan sosial (goffman, 1963).

selain itu, identitas sosial bersifat kontekstual dan dinamis, yang berarti bahwa seseorang dapat memiliki dan menjalankan berbagai identitas secara simultan maupun bergantian, tergantung pada situasi dan peran sosial yang dihadapi. hal ini menunjukkan bahwa identitas sosial tidak bersifat esensial, tetapi selalu dalam proses pembentukan dan perundingan makna secara terus-menerus (hall, 1996). dimensi lain yang penting adalah identitas performatif, yakni bagaimana individu secara aktif "memainkan" identitasnya di ruang sosial untuk memperoleh pengakuan, otoritas, atau strategi untuk bertahan hidup (butler, 1990). dengan demikian, identitas sosial mencakup aspek internal (bagaimana seseorang melihat dirinya) dan eksternal (bagaimana ia dilihat dan diposisikan oleh orang lain), serta aspek performatif yang menekankan tindakan dan ekspresi dalam praktik sosial sehari-hari.

perspektif interaksionisme simbolik, identitas sosial dipahami sebagai hasil

konstruksi yang muncul melalui proses interaksi sosial yang bersifat simbolik. identitas tidak dianggap sebagai sesuatu yang tetap, bawaan, atau semata-mata ditentukan oleh struktur sosial seperti kelas, etnis, atau status ekonomi. sebaliknya, identitas sosial terbentuk dan terus berkembang melalui pengalaman interaksi sehari-hari di mana individu saling bertukar makna melalui simbol, bahasa, dan tindakan. melalui proses ini, individu belajar memahami siapa dirinya, serta bagaimana ia diposisikan oleh orang lain dalam lingkungan sosialnya (blumer, 1969).

george herbert mead (1934), menjelaskan bahwa konsep diri (*self*) terbentuk melalui proses sosial yang ia sebut sebagai "*role-taking*", yaitu kemampuan individu untuk mengambil peran orang lain dalam interaksi, guna memahami ekspektasi sosial terhadap dirinya. dalam pandangan mead, identitas sosial adalah refleksi dari kesadaran diri yang muncul karena individu melihat dirinya melalui kacamata orang lain dalam masyarakat. dengan kata lain, identitas tidak bisa terbentuk tanpa interaksi sosial yang memediasi makna tersebut.

sementara itu, cooley (1902) memperkenalkan konsep *looking glass self*, yang menggambarkan bahwa individu membentuk identitas sosialnya melalui proses "bercermin" pada persepsi orang lain. dalam proses ini, individu membayangkan bagaimana ia dilihat oleh orang lain, bagaimana penilaian orang lain terhadap dirinya, dan dari situ membentuk perasaan dan penilaian tentang dirinya sendiri. konsep ini menegaskan bahwa identitas sosial bukan hanya dibentuk oleh diri sendiri, tetapi juga oleh pengaruh sosial yang bersifat simbolik dan interpretatif.

berger dan luckmann (1966) menjelaskan bahwa identitas sosial dibentuk melalui proses konstruksi sosial yang berlangsung dalam interaksi sehari-hari. mereka menyatakan bahwa identitas adalah produk dari internalisasi peran sosial yang diterima melalui sosialisasi. meskipun pendekatannya lebih luas dari interaksionisme simbolik, konsep mereka sangat relevan karena menekankan proses simbolik dan sosial dalam pembentukan realitas dan identitas.

### **3.2.4 pengenalan program bsps**

program bsps mulai dikenal secara luas sejak awal dekade 2000-an sebagai respons atas meningkatnya *backlog* perumahan dan besarnya proporsi rumah yang tidak memenuhi syarat sebagai hunian layak. dalam perkembangannya, bsps ditetapkan sebagai program nasional yang terstruktur dan masuk dalam agenda prioritas pembangunan perumahan nasional. seiring dengan meningkatnya komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, bsps menjadi salah satu instrumen utama dalam menjamin hak dasar warga negara atas tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat (maswandhani dan victor, 2024).

bsps berfokus pada pemberian bantuan dalam bentuk stimulan dana, bukan hibah penuh, sehingga pelaksanaannya mengandalkan partisipasi aktif masyarakat melalui pendekatan swadaya. swadaya di sini mencakup kontribusi tenaga, pemanfaatan bahan lokal, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan rumah. pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk membangun fisik rumah, tetapi juga memperkuat modal sosial dan kemandirian komunitas penerima bantuan (nurhaya, 2024).

pelaksanaan program ini didasarkan pada berbagai kerangka hukum dan kebijakan strategis, di antaranya:

- a. undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman

undang-undang ini menjadi dasar yuridis utama penyelenggaraan perumahan di indonesia. dalam pasal 5, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk menempati dan/atau menikmati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan teratur. pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan kemudahan dan/atau bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat memperoleh rumah yang layak huni. program bspis merupakan bentuk konkret dari amanat undang-undang ini.

- b. peraturan menteri pupr nomor 13/prt/m/2016 dan (revisi-revisi berikutnya)

peraturan ini mengatur secara teknis tentang pelaksanaan program bspis, mulai dari kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, mekanisme penyaluran, hingga pendampingan teknis dan sosial oleh fasilitator. revisi terhadap regulasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan, termasuk penyesuaian jumlah bantuan dan penekanan pada keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan program.

- c. rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2020–2024

dalam dokumen rpjmn, bspis ditempatkan sebagai bagian dari prioritas nasional dalam pembangunan infrastruktur perumahan. salah satu indikator kinerja utama yang ingin dicapai melalui bspis adalah menurunnya jumlah rumah tidak layak huni di indonesia secara signifikan, serta terciptanya kawasan permukiman yang layak, inklusif, dan berkelanjutan. hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (tpb/sdgs), khususnya tpb 11: kota dan permukiman yang berkelanjutan.

d. peraturan presiden nomor 59 tahun 2017

peraturan ini mengatur pelaksanaan pencapaian sdgs di indonesia. program bps secara langsung mendukung pencapaian beberapa target sdgs, antara lain mengurangi proporsi penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dan meningkatkan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.

e. undang-undang apbn (tahunan)

melalui apbn yang disahkan setiap tahun, alokasi anggaran untuk bps terus dijaga agar program ini bisa menjangkau rumah tangga miskin secara merata. besaran bantuan biasanya disesuaikan dengan inflasi, harga bahan bangunan lokal, dan tingkat keterjangkauan masyarakat.

secara keseluruhan, program bps merupakan wujud nyata dari keberpihakan negara terhadap masyarakat miskin melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pemberdayaan. dengan pijakan hukum yang kuat dan dukungan kebijakan pembangunan nasional, program ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah hunian secara fisik, tetapi juga mendorong kemandirian dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

1. proses dan mekanisme program bps

proses dan mekanisme implementasi bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) dirancang secara sistematis untuk memastikan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tepat sasaran, transparan, dan partisipatif. setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat penerima bantuan (direktorat jenderal perumahan, 2020). adapun tahapan mekanisme program bps sebagai berikut :

a. tahap perencanaan

perencanaan program bps dilakukan secara terpadu oleh direktorat jenderal perumahan, kementerian pupr, bersama dengan pemerintah daerah. proses ini mencakup:

- 1) identifikasi lokasi prioritas: lokasi program diprioritaskan di daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni yang tinggi, berdasarkan data dari bps dan usulan pemerintah daerah.
- 2) koordinasi dengan pemda: pemerintah pusat meminta usulan lokasi dan calon penerima bantuan dari pemerintah daerah, yang kemudian diverifikasi.
- 3) penetapan lokasi: lokasi program bps ditetapkan oleh kementerian pupr berdasarkan hasil verifikasi data dan kesiapan infrastruktur pendukung.

b. pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan

pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. tahapan ini meliputi:

kriteria calon penerima bantuan:

- 1) warga negara indonesia (wni).
- 2) berpenghasilan rendah.
- 3) tidak memiliki rumah atau rumah yang tidak layak huni.
- 4) menguasai tanah dengan bukti legalitas yang sah (sertifikat, akta jual beli, surat keterangan lurah/kepala desa).
- 5) bersedia berswadaya membangun rumah.
- 6) verifikasi lapangan: tim dari dinas perumahan daerah bersama tenaga fasilitator lapangan (tfl) melakukan kunjungan ke rumah calon penerima untuk memverifikasi kondisi rumah, legalitas tanah, dan kemampuan swadaya.

c. pembentukan kelompok penerima bantuan (kpb)

calon penerima bantuan yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat akan dibentuk dalam kelompok penerima bantuan (kpb). kelompok ini berfungsi untuk:

- 1) memudahkan koordinasi dan pengawasan.
- 2) menumbuhkan semangat gotong royong antar warga penerima.
- 3) menyusun rencana kerja pelaksanaan pembangunan rumah.
- 4) membantu distribusi material dan pengelolaan logistik.

d. penyaluran dana bantuan

bantuan disalurkan secara non-tunai melalui bank penyalur ke rekening masing-masing cpb. jumlah bantuan tergantung pada jenis kegiatan:

- 1) peningkatan kualitas rumah (pkr): rp 17,5 juta per rumah (sekitar rp 15 juta untuk material dan rp 2,5 juta untuk upah kerja).
- 2) pembangunan baru (pb): rp 35 juta per rumah (khusus untuk masyarakat terdampak bencana atau relokasi).

penyaluran dana dilakukan dalam dua tahap:

1. tahap i: sekitar 70% dari nilai bantuan, untuk memulai proses pembangunan.
2. tahap ii: sisa dana setelah verifikasi perkembangan pembangunan tahap pertama oleh tfl.

dana tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, dan pengelolaannya harus transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

e. pelaksanaan pembangunan rumah

pembangunan rumah dilakukan oleh cpb secara swadaya, artinya masyarakat sendiri yang mengelola, membangun, dan mengawasi progres rumah

mereka, dengan dukungan:

- 1) tenaga fasilitator lapangan (tfl): memberikan bimbingan teknis, penyusunan rencana anggaran biaya (rab), perencanaan desain rumah, serta pengawasan teknis.
  - 2) pemerintah daerah: melalui dinas perumahan, mendukung dengan kemudahan perizinan dan pengawasan administrasi.
- prinsip swadaya mendorong masyarakat untuk terlibat aktif, baik melalui tenaga kerja sendiri maupun gotong royong dengan anggota kpb.

f. monitoring, evaluasi dan pelaporan

proses pelaksanaan akan dimonitor secara berkala oleh:

- 1) tim fasilitator lapangan dan satuan kerja provinsi/kabupaten.
- 2) kementerian pupr melalui balai pelaksana penyediaan perumahan (bp2p).
- 3) tim pengawas independen, jika diperlukan.

evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun benar-benar telah memenuhi standar rumah layak huni sesuai sni 03-1733-2004 dan ketentuan teknis lainnya. setelah selesai, hasil pembangunan akan dilaporkan dan didokumentasikan melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan kementerian pupr (misalnya: *sibaru/sipetruk*) wibowo dan ramadhan (2019).

2. aktor yang terlibat dalam kebijakan bsps

program bsps melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, hingga masyarakat. setiap aktor memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran (direktorat jenderal perumahan, 2020).

a. kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr)

kementerian pupr berperan menyusun kebijakan, pedoman teknis, alokasi anggaran, dan pengawasan nasional program bsps. adapun unit terkait dari kementerian pupr adalah direktorat jenderal perumahan, khususnya direktorat rumah swadaya.

b. balai pelaksana penyediaan perumahan (bp2p)

balai pelaksana penyediaan perumahan berperan sebagai implementasi teknis di lapangan sesuai wilayah kerja (regional), termasuk seleksi lokasi dan verifikasi administrasi.

c. pemerintah daerah (pemda)

pemerintah daerah bertugas untuk mengusulkan lokasi dan calon penerima bantuan, mendampingi proses legalitas lahan dan perizinan, mendukung koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembangunan.

- d. tenaga fasilitator lapangan (tfl) peran:
  - 1) melakukan pendampingan teknis kepada masyarakat.
  - 2) menyusun rab dan desain rumah sederhana.
  - 3) memantau dan mengevaluasi progres pembangunan.
- e. kelompok penerima bantuan (kpb) peran:
  - 1) wadah koordinasi antar penerima bantuan.
  - 2) mengelola penggunaan dana dan material secara gotong royong.
  - 3) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan rumah.
- f. masyarakat penerima bantuan peran:
  - 1) subjek utama pembangunan rumah secara swadaya.
  - 2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan fisik rumah.
  - 3) menyediakan tenaga kerja dan sumber daya tambahan jika diperlukan.
- g. bank penyalur peran:
  - 1) menyalurkan dana bantuan ke rekening masing-masing penerima.
  - 2) menjamin transparansi dan ketepatan dalam proses transfer.

keterlibatan multiaktor dalam implementasi bsps menjadi bukti pendekatan kolaboratif dalam pembangunan sosial, yang mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat (kurniasih dan prasetyo, 2021).

### **3.2.5 alur sosialisasi dan proses penerimaan bantuan program bsps**

pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kelurahan pattallassang diawali dari proses pendataan calon penerima bantuan yang dilakukan oleh pihak kelurahan bersama fasilitator program. aparat kelurahan dan fasilitator dipandang sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, sehingga memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi rumah tangga yang layak diusulkan sebagai penerima bantuan.

pendataan tersebut tidak dilakukan secara terpisah, melainkan disesuaikan dengan data rumah tidak layak huni (rtlh) yang bersumber dari dinas sosial. data awal dari dinas kemudian dicocokkan dengan kondisi riil di lapangan. proses ini menunjukkan adanya integrasi antara data administratif dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh aparat kelurahan serta fasilitator.

setelah tahap pencocokan data, fasilitator bersama tim pelaksana program turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi kondisi rumah calon penerima. verifikasi dilakukan dengan memantau secara langsung kondisi fisik bangunan, meliputi atap, dinding, dan lantai rumah, serta memastikan status kepemilikan tanah. pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon

penerima benar-benar memenuhi kriteria sebagai rumah tidak layak huni sesuai standar program. selama proses verifikasi, kondisi rumah didokumentasikan melalui foto sebagai bagian dari kelengkapan administrasi, yang kemudian dikirim untuk proses validasi lebih lanjut.

setelah hasil verifikasi dan validasi keluar serta penetapan penerima ditentukan, pihak kelurahan dan fasilitator tidak hanya mengumumkan secara umum, tetapi mendatangi langsung rumah warga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan. penyampaian informasi dilakukan secara personal sebagai bentuk pemberitahuan resmi bahwa mereka terpilih sebagai penerima program bpsps.

tahap berikutnya adalah pengumpulan masyarakat penerima bantuan di kantor lurah serta di rumah fasilitator. pertemuan ini menjadi ruang penyampaian mekanisme pelaksanaan program. dalam forum tersebut dijelaskan prosedur pencairan dana, tahapan pembangunan, serta kewajiban penerima, termasuk prinsip swadaya yang menjadi bagian dari pelaksanaan program. selain itu, masyarakat juga diberitahukan mengenai pemilihan toko bahan bangunan tempat pembelian material serta kewajiban membuka rekening di bank bni sebagai bagian dari mekanisme pencairan bantuan. seluruh informasi tersebut disampaikan oleh pihak kelurahan dan fasilitator sebagai perpanjangan tangan program.

meskipun terdapat pertemuan untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan, berdasarkan keterangan informan, tidak ada proses sosialisasi khusus yang dilakukan sebelum penetapan penerima sebagai bentuk pengenalan awal terhadap konsep program. artinya, masyarakat tidak terlebih dahulu diberikan pemahaman komprehensif mengenai filosofi dan tujuan bpsps sebelum ditetapkan sebagai penerima. penjelasan yang diberikan lebih berfokus pada mekanisme teknis setelah keputusan administratif ditetapkan.

dalam perspektif interaksionisme simbolik, kondisi ini memiliki implikasi penting terhadap pembentukan makna swadaya. karena tidak ada ruang sosialisasi awal yang bersifat dialogis sebelum penetapan, simbol "swadaya" tidak dibangun melalui negosiasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat. sebaliknya, makna swadaya mulai dipahami ketika masyarakat sudah berada dalam posisi sebagai penerima bantuan dan dihadapkan pada kewajiban-kewajiban teknis program.

bagi sebagian penerima, mekanisme tersebut dimaknai sebagai bentuk kepercayaan pemerintah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. swadaya dipahami sebagai kontribusi wajar dalam memperbaiki rumah sendiri. namun, bagi kelompok lain, pemahaman mengenai kebutuhan tambahan biaya atau tenaga baru disadari ketika program telah berjalan, sehingga swadaya dipersepsikan sebagai beban ekonomi yang harus dipenuhi di tengah keterbatasan.

dengan demikian, alur sosialisasi dan proses penerimaan bantuan di kelurahan pattallassang memperlihatkan bahwa konstruksi makna swadaya tidak dimulai dari forum pengenalan konseptual, melainkan berkembang melalui pengalaman administratif, interaksi langsung dengan aparat, serta praktik pelaksanaan program di lapangan. proses inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa makna swadaya di antara penerima bps menjadi beragam dan berdampak pada dinamika implementasi program di tingkat lokal.

### **3.3 metode penelitian**

#### **3.3.1 pendekatan dan metode penelitian**

untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna memahami permasalahan penelitian secara mendalam dan kontekstual. pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas fenomena sosial dalam konteks kehidupan nyata, khususnya dalam memahami makna masyarakat terhadap konsep swadaya dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) setelah program tersebut selesai dilaksanakan.

pendekatan kualitatif dan studi kasus relevan digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alaminya. penelitian kualitatif memungkinkan penggalan data berbasis teks, wawancara, dan observasi (miles & huberman, 1994), sementara studi kasus berfokus pada pengkajian fenomena spesifik dalam konteks kehidupan nyata secara komprehensif (creswell, 2013; stake, 2006).

penelitian ini bersifat non-partisipatif dan dilakukan secara pasca pelaksanaan program, di mana peneliti tidak terlibat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program bps pada saat kegiatan berlangsung. peran peneliti terbatas sebagai pengamat dan pengumpul data yang dilakukan setelah program selesai, melalui wawancara, observasi kondisi hasil pembangunan, dan dokumentasi. pendekatan ini bertujuan untuk menjaga objektivitas penelitian serta memperoleh gambaran reflektif mengenai pengalaman dan penilaian informan terhadap program yang telah dijalankan.

#### **3.3.2 lokasi penelitian**

lokasi penelitian ini dipilih di kelurahan pattallassang, kecamatan pattallassang, kabupaten takalar, sulawesi selatan, karena wilayah ini memiliki relevansi yang kuat dengan fokus penelitian mengenai makna swadaya dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bps). pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan empiris dan sosiologis yang

memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang mendalam mengenai bagaimana konsep swadaya dipahami, ditafsirkan, dan dipraktikkan oleh masyarakat penerima bantuan. *pertama*, kelurahan pattallassang merupakan salah satu wilayah yang secara konsisten menerima dan melaksanakan program bpsps dalam beberapa tahun terakhir, sehingga program tersebut tidak hanya hadir sebagai kebijakan administratif, tetapi telah menjadi bagian dari pengalaman sosial masyarakat. keberlanjutan pelaksanaan program ini memunculkan berbagai dinamika sosial, khususnya terkait tingkat partisipasi masyarakat, bentuk kontribusi swadaya yang dilakukan, serta beragam respons penerima bantuan terhadap tuntutan dan mekanisme program.

*kedua*, dalam praktik pelaksanaan bpsps di kelurahan pattallassang ditemukan adanya variasi pemahaman masyarakat terhadap konsep swadaya, baik yang dimaknai sebagai bentuk kemandirian, gotong royong, kewajiban moral, strategi bertahan hidup, maupun sebagai beban tambahan di tengah keterbatasan ekonomi. perbedaan makna ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang heterogen, di mana terdapat perbedaan tingkat pendapatan, kepemilikan aset, dan akses terhadap sumber daya. kondisi tersebut menciptakan ruang interaksi sosial yang dinamis antara penerima bantuan, aparat kelurahan, fasilitator program, dan masyarakat sekitar, sehingga proses negosiasi makna swadaya berlangsung secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. dengan demikian, kelurahan pattallassang menjadi konteks yang tepat untuk mengkaji bagaimana makna swadaya dikonstruksi melalui pengalaman, interaksi, dan interpretasi masyarakat terhadap kebijakan negara.

#### 1. kondisi geografis

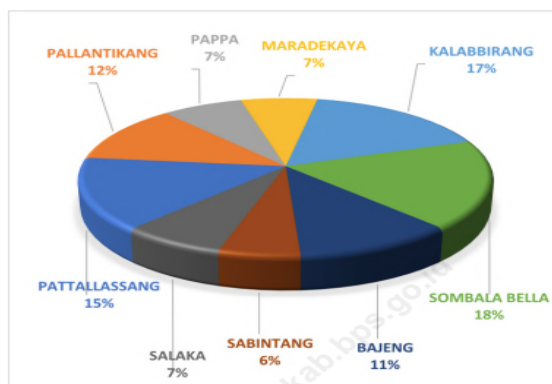
luas wilayah kecamatan pattallassang tercatat sebesar 25,31 km<sup>2</sup>. kecamatan ini terdiri atas sembilan kelurahan. wilayah kelurahan terluas di kecamatan pattallassang adalah kelurahan pappu dengan luas mencapai 4,35 km<sup>2</sup>, sedangkan kelurahan dengan luas wilayah terkecil adalah kelurahan sabintang dengan luas 1,74 km<sup>2</sup>.



gambar 3.1 peta wilayah kecamatan pattallassang

## 2. kondisi demografis

pada tahun 2024, jumlah penduduk di kecamatan pattallassang tercatat sebanyak 42.373 jiwa. jika dirinci menurut jenis kelamin, terdapat 20.593 jiwa penduduk laki-laki dan 21.780 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,55.



gambar 3.2 persentase penduduk di kecamatan pattallassang, 2024

penduduk di kecamatan pattallassang tersebar di sembilan kelurahan. kelurahan dengan persentase penduduk tertinggi pada tahun 2024 adalah kelurahan sombala bella dengan proporsi sebesar 18,30 persen, sementara persentase penduduk terendah tercatat di kelurahan sabintang sebesar 5,68 persen.

tabel 3.1 penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk menurut desa/ kelurahan di kecamatan pattallassang, 2024

Desa/Kelurahan <i>Village/Subdistrict</i>	Penduduk/Population		
	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah/Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kelurahan/Subdistrict</b>			
Pattallassang	3.021	3.265	6.286
Pallantikang	2.456	2.598	5.054
Pappa	1.519	1.567	3.086
Maradekaya	1.398	1.499	2.897
Kalabbirang	3.429	3.662	7.091
Sombala Bella	3.750	4.004	7.754
Bajeng	2.333	2.383	4.716
Sabintang	1.178	1.227	2.405
Salaka	1.509	1.575	3.084
<b>Pattallassang</b>	<b>20.593</b>	<b>21.780</b>	<b>42.373</b>

sumber: badan pusat statistik tahun 2025

### 3. gambaran umum implementasi program bsps di kelurahan pattallassang

pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kelurahan pattallassang menunjukkan pola yang relatif konsisten dari tahun ke tahun. hampir setiap tahun, kelurahan ini memperoleh alokasi program, meskipun dengan jumlah penerima yang terbatas. dalam satu tahun pelaksanaan, penerima bantuan umumnya berkisar antara 7 hingga 8 rumah tangga, sehingga program bersifat selektif dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah.

karakter utama pelaksanaan bsps di kelurahan pattallassang terletak pada bentuk bantuannya yang non-tunai, sehingga menuntut keterlibatan aktif penerima bantuan. masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima program, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan rumahnya sendiri. kesiapan swadaya menjadi syarat penting, yang mencakup kontribusi tenaga kerja, penyediaan material tambahan, sumbangan pemikiran dalam proses perencanaan, serta komitmen waktu selama proses pembangunan berlangsung. dengan demikian, bsps tidak

hanya dipahami sebagai bantuan fisik, tetapi juga sebagai proses pembelajaran partisipatif bagi masyarakat.

namun, dinamika pelaksanaan program menunjukkan bahwa tidak semua penerima berada dalam kondisi yang sama untuk memenuhi tuntutan swadaya tersebut. keterbatasan dana swadaya menjadi kendala yang paling sering dihadapi, terutama bagi penerima yang berada pada kondisi ekonomi sangat terbatas. situasi ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan rumah mengalami keterlambatan atau penyesuaian terhadap rencana awal, sehingga capaian program belum sepenuhnya optimal di semua kasus.

meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, program bpsps tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat kelurahan pattallassang. perbaikan kualitas hunian tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keamanan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat nilai gotong royong dan keterlibatan sosial di tingkat komunitas. oleh karena itu, bpsps di pattallassang dapat dipandang sebagai program yang tidak hanya berorientasi pada hasil fisik bangunan, tetapi juga pada proses sosial yang membentuk partisipasi dan kemandirian masyarakat. ke depan, penguatan dukungan terhadap penerima dengan keterbatasan swadaya menjadi aspek penting agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata.

### **3.3.3 tahap-tahap penelitian**

#### **a. tahap observasi awal**

tahap pertama peneliti melakukan observasi lapangan yang berkaitan dengan masalah serta fenomena atau kasus yang peneliti dapatkan dan lihat pada lokasi penelitian yaitu makna konsep swadaya pada penerima bantuan program bpsps. observasi awal dalam penelitian ini dilakukan setelah pembangunan rumah bantuan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (bpsps) telah selesai dilaksanakan. tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai hasil pelaksanaan program, termasuk kondisi fisik rumah bantuan, tingkat partisipasi masyarakat, serta bentuk swadaya yang telah diwujudkan oleh penerima bantuan.

dalam proses observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi rumah hasil program bpsps, baik dari segi struktur bangunan, kelayakan huni, maupun pemanfaatannya oleh penerima bantuan. peneliti juga memperhatikan lingkungan sekitar rumah, seperti keberadaan drainase, material yang digunakan. selain aspek fisik, peneliti juga mengamati interaksi sosial penerima bantuan dengan lingkungan sekitarnya, termasuk bagaimana program ini berdampak terhadap hubungan sosial, rasa gotong royong, dan sikap kemandirian masyarakat.

hasil observasi ini menjadi dasar penting dalam memahami sejauh mana

nilai swadaya benar-benar terimplementasi dalam tahap pembangunan, sekaligus menilai efektivitas program bpsps dalam meningkatkan kualitas hidup penerima bantuan. temuan dari observasi pasca-pembangunan ini kemudian digunakan untuk menyusun pedoman wawancara mendalam, serta menjadi bahan pembandingan (triangulasi) terhadap data yang diperoleh dari informan.

b. pengurusan surat izin penelitian

tahap kedua peneliti melakukan pengurusan surat izin dari pihak-pihak yang terkait untuk melengkapi dokumen penelitian dan menghindari segala permasalahan yang kemungkinan akan timbul di lapangan pada proses pelaksanaan penelitian. pengurusan surat izin penelitian terdiri atas beberapa tahapan yaitu:

1. pembuatan surat izin penelitian oleh pihak universitas hasanuddin dengan tujuan ke kelurahan pattallassang, kecamatan pattallassang kabupaten takalar.
2. memasukkan surat izin penelitian ke kantor kelurahan pattallassang, kecamatan pattallassang kabupaten takalar.

c. tahap pelaksanaan

tahap ini merupakan proses di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data, informasi, dan fakta yang relevan dari para informan. kegiatan ini dilakukan guna memahami secara mendalam bagaimana persepsi penerima bantuan terhadap konsep swadaya dalam pelaksanaan program bpsps, baik dari sisi pemahaman mereka tentang swadaya, bentuk partisipasi yang dilakukan, maupun faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam pembangunan rumah. melalui interaksi langsung dengan informan, peneliti dapat menangkap makna, pengalaman, dan pandangan subjektif masyarakat yang tidak bisa diperoleh hanya melalui data dokumen. dengan demikian, tahap ini menjadi bagian penting dalam menggali makna swadaya sebagai bentuk kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam program bpsps.

d. tahap evaluasi dan pelaporan

pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data di lapangan, kemudian dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar relevan, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengenai persepsi penerima bantuan terhadap konsep swadaya dalam program bpsps. data yang telah melalui proses validasi kemudian dianalisis dan diolah secara sistematis, agar hasilnya dapat memberikan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai pelaksanaan program. hanya data yang telah teruji keabsahannya yang dimasukkan ke dalam laporan penelitian, sehingga temuan yang dihasilkan benar-benar dapat menjawab permasalahan dan

tujuan penelitian secara ilmiah dan terpercaya.

### 3.3.4 jenis dan sumber data

menurut sumbernya, jenis data dalam penelitian kualitatif digolongkan menjadi dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

#### a. data primer

data primer merupakan data yang sering disebut sebagai data tangan pertama. data primer merupakan data yang langsung dan segera diperoleh dari data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian (samsu, 2017). data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*. untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### b. data sekunder

data sekunder merupakan data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. data sekunder berpusat suatu data dokumentasi atau data dalam bentuk laporan, buku, jurnal, artikel yang terkait dengan penelitian (samsu, 2017).

### 3.3.5 informan penelitian

penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *proposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau karakteristik tertentu. pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (sugiono, 2022). peneliti menyeleksi beberapa orang dan dipilih sebagai informan. dalam penelitian ini, jumlah informan ialah sebanyak 6 orang. penentuan jumlah tersebut didasarkan pada hasil triangulasi data dan triangulasi subjek, yang menunjukkan bahwa jawaban para informan sudah konsisten. pada titik ini, informasi yang diperoleh tidak lagi menghasilkan temuan baru, sehingga data dianggap telah mencapai kejenuhan. karena itu, penambahan informan tidak lagi diperlukan.

pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu

berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. pertimbangan utama dalam pemilihan informan adalah tingkat pengetahuan, pengalaman langsung, serta keterlibatan informan dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kelurahan pattallassang. informan dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai makna swadaya, bentuk partisipasi masyarakat, serta dinamika sosial yang muncul selama pelaksanaan program.

#### 1. informan utama

informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima bantuan bsp di kelurahan pattallassang. informan ini dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam menerima dan melaksanakan program bsp, mulai dari tahap perencanaan, pemenuhan swadaya, hingga proses pembangunan rumah. sebagai pelaku utama program, penerima bantuan memiliki pemahaman yang kaya mengenai bagaimana swadaya dimaknai dan dijalankan, baik sebagai kewajiban, bentuk partisipasi, gotong royong, maupun simbol kemandirian dalam memenuhi kebutuhan perumahan. pengalaman mereka juga memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai tantangan dan strategi yang dilakukan dalam menghadapi keterbatasan swadaya selama pelaksanaan program.

#### 2. informan kunci

sementara itu, informan kunci adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan luas, posisi strategis, serta peran penting dalam pelaksanaan program bsp. informan kunci dalam penelitian ini meliputi staf dinas pekerjaan umum kabupaten takalar, yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam perencanaan, pengawasan, serta koordinasi pelaksanaan program di tingkat daerah. informan kunci dipilih karena mereka memiliki akses terhadap informasi kebijakan, mekanisme pelaksanaan program, serta pemahaman mengenai regulasi dan prosedur teknis bsp. selain itu, staf dinas pekerjaan umum kabupaten takalar berperan penting dalam memberikan perspektif yang lebih struktural dan komprehensif terkait pelaksanaan bsp, termasuk kebijakan, prosedur, serta kendala administratif dan sosial yang dihadapi dalam implementasi program di lapangan.

perbedaan peran antara informan utama dan informan kunci dalam penelitian ini saling melengkapi. informan utama memberikan gambaran mengenai pengalaman subjektif dan makna swadaya dari sudut pandang masyarakat penerima bantuan, sedangkan informan kunci memberikan penjelasan kontekstual dan struktural terkait pelaksanaan program bsp. dengan melibatkan kedua jenis informan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana makna swadaya dibentuk, dinegosiasikan, dan dijalankan dalam pelaksanaan program bsp di kelurahan pattallassang.

berikut adalah informasi informan yang digunakan dalam penelitian ini :

a. informan i

informan pertama bernama sr adalah seorang laki-laki berusia 65 tahun yang mencari nafkah pedagang eceran barang bekas. pada tahun 2023, ia menjadi penerima program bsps. rumah yang ia tinggali sebelumnya dinilai tidak layak huni dan kurang memberikan kenyamanan, sehingga bantuan ini diberikan untuk memperbaiki kualitas huniannya agar lebih aman dan layak ditinggali.

b. informan ii

informan kedua bernama sb adalah seorang laki-laki berusia 54 tahun yang bekerja sebagai buruh harian lepas. pada tahun 2024, menjadi salah satu penerima program bsps. penetapan sb sebagai penerima bantuan didasarkan pada kondisi rumahnya yang tidak layak huni, kurang nyaman dan berada di area rawan banjir. kondisi tersebut menimbulkan kerentanan bagi dirinya dan keluarganya, sehingga bantuan perbaikan rumah melalui bsps menjadi sangat relevan dan mendesak untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal serta keamanan hunian.

c. informan iii

informan ketiga bernama id adalah seorang laki-laki yang bekerja sebagai jasa pengiriman barang. pada tahun 2021, ia ditetapkan sebagai penerima bsps. i menerima bantuan tersebut karena rumah yang ditempatinya dulu habis terbakar, sehingga ia kehilangan tempat tinggal yang layak. program bsps menjadi solusi penting bagi i untuk membangun kembali rumahnya dan memulihkan kondisi kehidupan keluarganya setelah bencana tersebut.

d. informan iv

informan keempat bernama rs ia adalah seorang perempuan yang berusia 65 tahun yang sehari-harinya sebagai pedagang eceran tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup. pada tahun 2024, ia memperoleh bantuan melalui program bsps. rumah yang ia tempati sebelumnya berada dalam kondisi sangat memprihatinkan dan tidak layak huni, sehingga penyaluran bantuan ini dipandang perlu untuk memperbaiki kualitas tempat tinggalnya dan memastikan ia memiliki hunian yang aman dan sehat di usia lanjutnya.

e. informan v

informan kelima bernama st seorang perempuan yang berusia 65 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. pada tahun 2024, ia mendapatkan bantuan melalui program bsps. ia di prioritaskan sebagai penerima karena selama ini hanya

menumpang tinggal di rumah keluarganya, sehingga program ini menjadi kesempatan baginya untuk memiliki hunian sendiri yang lebih mandiri dan layak.

f. informan vi

informan kesembilan bernama rk adalah staf bidang perumahan dan kawasan permukiman (pkp) pada dinas pekerjaan umum kabupaten takalar. ia berperan dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan teknis pelaksanaan program bsps di wilayahnya, serta memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran sesuai kebijakan pemerintah.

tabel 3.2  
informan penelitian

masyarakat penerima program bsps					
no.	nama	jenis kelamin	umur	pekerjaan	tahun menerima
1	sr	l	65 tahun	pedagang eceran barang bekas	2023
2	sb	l	54 tahun	buruh harian lepas	2024
3	id	l	41 tahun	jasa pengiriman barang	2021
4	rs	p	65 tahun	pedagang eceran tradisional	2024
5	st	p	65 tahun	ibu rumah tangga	2024

aparatus pemerintah dan fasilitator bsps				
no.	nama	jenis kelamin	jabatan	lama menjabat
6	rk	p	staf pu	2020-sekarang

sumber: hasil olahan data primer tahun 2025

### 3.3.6 prosedur pengumpulan data

#### 1. wawancara

dalam pendekatan studi kasus, wawancara mendalam merupakan metode utama untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti (miles et al., 2014). wawancara ini tidak hanya bertujuan mengumpulkan fakta empiris, tetapi juga menggali bagaimana masyarakat penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) sebagai informan utama mengalami, memaknai, dan merespons konsep swadaya berdasarkan pengalaman langsung mereka sebagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam tidak terstruktur, sehingga peneliti memiliki fleksibilitas untuk mengeksplorasi pengalaman, proses, serta makna swadaya sebagai kewajiban, partisipasi, gotong royong, dan simbol kemandirian secara terbuka dan dinamis. pendekatan ini sejalan dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena (hadi et al., 2021) serta prinsip *verstehen* max weber yang menekankan pemahaman makna tindakan sosial dari sudut pandang pelaku.

selain informan utama, penelitian ini juga melibatkan informan kunci, yaitu fasilitator bsp, lurah, serta staf dinas pekerjaan umum kabupaten takalar, yang dipilih karena memiliki jabatan, kewenangan, dan pengetahuan yang mendalam mengenai kebijakan, mekanisme, dan pelaksanaan program bsp. keterlibatan informan kunci berfungsi sebagai triangulasi sumber untuk memperkuat validitas data dan memberikan perspektif institusional terhadap praktik swadaya masyarakat. wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara terbuka yang bersifat fleksibel dan dilaksanakan dalam suasana kondusif, dengan bantuan perekam suara, catatan lapangan, dan dokumentasi visual. seluruh data wawancara kemudian ditranskripsi dan dianalisis melalui tahapan reduksi data, pengelompokan kategori, serta penarikan tema-tema utama. apabila diperlukan pendalaman, wawancara lanjutan dilakukan secara langsung maupun jarak jauh guna memastikan pemahaman yang utuh, mendalam, dan kontekstual mengenai makna swadaya dalam program bsp.

#### 2. dokumentasi

dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk melengkapi data hasil wawancara mendalam dan observasi non-partisipasi yang dilakukan setelah pembangunan rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsp) selesai. teknik dokumentasi meliputi pengumpulan bahan tertulis, foto, dan rekaman audio selama penelitian berlangsung, yang digunakan untuk memperkuat validitas data melalui triangulasi metode serta memberikan konteks visual dan deskriptif mengenai pelaksanaan program bsp dan praktik swadaya masyarakat penerima bantuan.

pelaksanaan dokumentasi mencakup pendataan kondisi fisik rumah pasca-pembangunan, lingkungan permukiman, serta kontribusi swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga, material, dan dukungan sosial. peneliti juga mendokumentasikan proses wawancara dan kondisi lingkungan tempat tinggal informan. selain itu, dokumen tertulis seperti petunjuk teknis, data penerima bantuan, laporan kegiatan, dan dokumen administratif dari dinas sosial dan dinas pekerjaan umum kabupaten takalar dikumpulkan untuk memahami kerangka kebijakan, mekanisme program, serta peran pemerintah daerah. seluruh dokumentasi ini membantu peneliti menafsirkan bagaimana konsep swadaya dikonstruksi dan diwujudkan dalam kebijakan dan realitas sosial di tingkat lokal.

### **3.3.7 pengecekan keabsahan data**

pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas dan keandalan data agar benar-benar mencerminkan pengalaman serta makna masyarakat terhadap swadaya dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps). untuk tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai upaya menjamin keabsahan data dengan mengaitkan sumber data, metode pengumpulan data, dan kesesuaian teori secara saling melengkapi (miles et al., 2014). proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa bukti dari berbagai sumber dan perspektif informan guna membangun temuan yang koheren dan selaras dengan fokus penelitian. penetapan tema berdasarkan beragam sumber data dan sudut pandang informan ini dinilai mampu meningkatkan validitas hasil penelitian (creswell & creswell, 2023).

penelitian ini menerapkan triangulasi metode dan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara mendalam, observasi non-partisipasi pasca pembangunan rumah, serta dokumentasi berupa foto, catatan lapangan, dan dokumen resmi program bpsps. verifikasi data dilakukan melalui informasi yang diperoleh dari masyarakat penerima bpsps sebagai informan utama serta fasilitator program, aparat kelurahan, dan pihak dinas sosial serta dinas pekerjaan umum kabupaten takalar sebagai informan tambahan. selain itu, diskusi lanjutan dengan sumber data terkait dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi (hazni et al., 2023). dengan demikian, data penelitian tidak hanya bersumber dari satu perspektif, tetapi diperkuat melalui pandangan berbagai aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program bpsps.

### **3.3.8 analisis data**

#### **a. reduksi data (*data reduction*)**

tahap ini melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. tujuannya adalah menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang data yang tidak relevan, sehingga data yang tersisa lebih terorganisir dan bermakna. reduksi data

merupakan proses menyaring, memfokuskan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, maka data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas (radjab, 2014). proses ini berlangsung secara berkelanjutan sepanjang penelitian, bahkan sudah dimulai sebelum seluruh data terkumpul, terlihat dari kerangka konseptual, rumusan masalah, serta metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti.

b. penyajian data (*data display*)

setelah direduksi, data disusun secara sistematis dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti teks naratif, matriks, grafik, atau bagan. data primer dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, atau visualisasi lainnya. sementara itu, data sekunder umumnya disajikan dalam bentuk narasi atau teks deskriptif (radjab, 2014). penyajian ini membantu peneliti dalam melihat pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu, sehingga memudahkan proses analisis lebih lanjut.

c. penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

pada tahap ini, peneliti menafsirkan data yang telah disajikan untuk mencari makna, hubungan, atau pola yang muncul. kesimpulan awal yang ditarik bersifat sementara dan perlu diverifikasi melalui pengecekan ulang terhadap data yang ada untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan (rijali, 2019). kesimpulan dibuat untuk menerjemahkan hasil analisis ke dalam jawaban atas rumusan masalah secara ringkas, serta menjelaskan pola dan hubungan antar berbagai aspek yang telah dibahas. proses ini dilakukan setelah semua data disajikan dan dianalisis menggunakan teori yang relevan. data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diverifikasi melalui metode triangulasi untuk memastikan keakuratannya.

### **3.4 hasil dan pembahasan**

hasil penelitian menunjukkan bahwa makna swadaya oleh masyarakat penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) tidak bersifat tunggal, melainkan beragam dan dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi serta pengalaman masing-masing penerima bantuan. perbedaan makna tersebut memengaruhi cara masyarakat merespons dan menjalankan program di tingkat praktik, sehingga berdampak langsung pada proses implementasi. berdasarkan temuan lapangan, makna swadaya menunjukkan dua kecenderungan utama, yaitu makna yang mendorong dukungan terhadap implementasi program bspss dan makna yang justru menghambat pelaksanaannya. oleh karena itu, hasil penelitian ini disajikan ke dalam dua subtema untuk menjelaskan variasi makna swadaya beserta

implikasinya terhadap implementasi program.

### **3.4.1. makna swadaya dalam mendukung implmentasi program bsp**

makna swadaya dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kontribusi masyarakat berimplikasi langsung pada implementasi program bsp. temuan menunjukkan bahwa swadaya dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab dan keterlibatan aktif penerima bantuan, yang berpengaruh terhadap percepatan pelaksanaan program, kepatuhan terhadap prosedur, peningkatan kualitas bangunan, serta terbentuknya kolaborasi dalam proses implementasi. makna ini juga mendorong munculnya motivasi yang kuat dalam pembangunan rumah, sehingga swadaya tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap kebijakan, tetapi menjadi faktor penting yang menopang keberhasilan implementasi program bsp di tingkat lokal.

#### **1. efisiensi waktu pelaksanaan pembangunan berbasis swadaya**

makna masyarakat terhadap swadaya sebagai bentuk kemandirian tercermin dalam praktik pelaksanaan pembangunan rumah yang mengutamakan inisiatif dan pengelolaan sumber daya secara mandiri. swadaya dipahami bukan sekadar kontribusi material, tetapi sebagai dorongan untuk segera bertindak, memanfaatkan waktu luang, serta mengoptimalkan tenaga pribadi dan dukungan keluarga agar proses pembangunan dapat berjalan tanpa banyak penundaan. makna tersebut membentuk strategi masyarakat dalam mengelola keterbatasan, yang berimplikasi pada efisiensi waktu pelaksanaan pembangunan, di mana pekerjaan dilakukan secara bertahap dan fleksibel tanpa ketergantungan penuh pada aktor eksternal. hal ini diungkapkan oleh id penerima bantuan bsp pada tahun 2021 berumur 41 tahun mengatakan bahwa :

*“...anjo riolo wattunna di jama ballaka termasuk intaki lekba, ka nakkeji poeng akjari tukang jari manna libur kujamaji tassikedde-tassikedde walaupun riolo bulan puasa”* (wawancara pada sabtu 16 agustus 2025).

artinya :

*“...dulu, saat rumah ini dikerjakan, proses pembangunannya tergolong cukup cepat karena saya sendiri yang menjadi tukang. bahkan pada hari libur saya tetap mengerjakan sedikit demi sedikit, meskipun pada waktu itu bertepatan dengan bulan puasa”* (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).

rs penerima bantuan bsp pada tahun 2024 berumur 65 tahun lebih lanjut juga mengatakan bahwa :

*“...nia kapang 4 juta kutambaiangi anne na lekba ballaka, kadde tena kapang kutambai tena na tettere lekba pasti ammantangi nampa nani laporok siagang ds”* (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).

artinya :

“...saya menambahkan sekitar empat juta rupiah untuk menyelesaikan pembangunan rumah ini. jika saya tidak menambahkan dana tersebut, kemungkinan besar pengerjaan rumah tidak akan cepat selesai, dan ds selaku fasilitator mungkin juga kesulitan membuat laporan” (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).

sr penerima program bspis pada tahun 2023 berumur 65 tahun juga mengatakan bahwa :

*“...anne ri samping kiri kananna ballaka siagang ri bokona sangnging keluargaji jari ku kio asengmi ambalia riolo supaya tena na jai dudu na alle ongkoso tukang ka punna tena nadi pakammai ten ana tettere lekba ballaka jaiangngang doe di pasulu punna sallo anne ballaka di paklekbba”* (wawancara pada jumat, 8 agustus 2025).

artinya :

“...di samping kiri, kanan, dan belakang rumah saya semuanya adalah keluarga. karena itu, saya memanggil mereka untuk membantu pengerjaan rumah agar tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya ongkos tukang. jika hal tersebut tidak dilakukan, maka rumah ini tidak akan cepat selesai dan justru akan membutuhkan biaya yang lebih besar” (wawancara pada jumat, 8 agustus 2025).

berdasarkan kerangka interaksionisme simbolik herbert blumer, tindakan sosial individu didasarkan pada makna yang mereka berikan terhadap suatu objek, yang makna nya terbentuk dan berubah melalui interaksi sosial. temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi waktu pelaksanaan pembangunan rumah dalam program bspis merupakan konsekuensi dari makna swadaya yang dikonstruksi masyarakat sebagai bentuk kemandirian dan tanggung jawab personal. makna tersebut bukan bawaan program, melainkan hasil pengalaman dan interaksi penerima bantuan dengan lingkungan sosialnya.

makna swadaya sebagai kemandirian tercermin dalam tindakan aktif penerima bantuan yang langsung terlibat dalam pembangunan rumah. keputusan mengerjakan sendiri, memanfaatkan waktu luang, dan tetap melanjutkan pekerjaan dalam berbagai kondisi menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan respons bermakna terhadap simbol “swadaya” sebagai dorongan untuk bertindak, bukan sekadar menunggu bantuan eksternal.

praktik penambahan dana pribadi juga merupakan hasil interpretasi atas keterbatasan bantuan yang diterima. melalui interaksi dengan fasilitator dan pengalaman proses pembangunan, penerima bantuan memaknai swadaya sebagai tanggung jawab mengelola kekurangan agar pembangunan berjalan. penambahan dana bukan sekadar usaha mempercepat pekerjaan, melainkan bentuk negosiasi

makna antara kebutuhan dan kemampuan sumber daya.

interaksi sosial berperan penting dalam pembentukan makna swadaya, terutama melalui jaringan kekerabatan. keterlibatan anggota keluarga dalam pembangunan tidak hanya menekan biaya, tetapi juga memungkinkan proses yang lebih fleksibel dan berkelanjutan. makna swadaya di sini bukan hanya milik individu, melainkan dibentuk dan diperkuat melalui interaksi dengan keluarga yang terlibat langsung.

secara keseluruhan, efisiensi waktu pelaksanaan pembangunan berbasis swadaya adalah hasil tindakan sosial yang didorong oleh makna swadaya yang terus dimaknai dan dimodifikasi dalam interaksi sehari-hari. efisiensi waktu bukan tujuan teknis program, melainkan konsekuensi dari cara masyarakat menafsirkan swadaya dan menerjemahkannya ke dalam tindakan konkret. dengan demikian, makna swadaya berperan sentral dalam membentuk dinamika implementasi program di tingkat lokal.

## **2. kepatuhan terhadap prosedur**

kepatuhan terhadap prosedur dalam pelaksanaan program bsps merupakan salah satu temuan yang menjawab rumusan masalah kedua dan memiliki keterhubungan erat dengan rumusan masalah pertama. temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural tidak muncul semata-mata sebagai akibat dari pengawasan atau aturan formal, melainkan berakar pada makna swadaya sebagai bentuk tanggung jawab moral penerima bantuan. swadaya yang dimaknai sebagai kewajiban untuk menjalankan amanah program mendorong masyarakat untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga kepatuhan terhadap prosedur menjadi ekspresi konkret dari makna swadaya dalam praktik implementasi program.

pandangan tersebut diungkapkan oleh rs penerima bantuan bsps pada tahun 2024 berumur 65 tahun kuning mengatakan juga bahwa :

*“...wattungku na suro ds anglengkapi berkasku kebetulan anne sertifikatka i rawai ri andikku jari naung memang ma ngallei ri mangkasarak, ka ammukona kammanjo niami anjo ds amboyai”* (wawancara pada jumat 15 agustus 2025).

artinya :

*“...ketika ds meminta saya untuk melengkapi berkas, kebetulan sertifikat rumah masih berada di rumah adik saya di makassar. karena itu, saya langsung pergi ke makassar untuk mengambilnya. keesokan harinya, ds kembali datang untuk mencari sertifikat tersebut”* (wawancara pada jumat 15 agustus 2025).

st penerima program bsps pada tahun 2024 berumur 56 tahun mengatakan

bahwa :

*“...anne naung tampaka punya orang tua jari di bagi appa ka appaka sa'ribattang jadi iami anne naung ku gappa nakke, mangema anjo anggurusuki sura' sura'na kaeromi anjo ni sareang fasilitatorka eromi di pa'nasa”* (wawancara pada jumat 15 agustus 2025).

artinya :

“...tanah ini sebenarnya milik orang tua, lalu dibagi menjadi empat bagian karena kami bersaudara empat orang. bagian inilah yang saya dapatkan. setelah itu, saya mengurus surat-surat tanahnya karena akan diberikan kepada fasilitator untuk dirampungkan sebagai salah satu syarat administrasi” (wawancara pada jumat 15 agustus 2025).

rk selaku anggota bidang pkp pu (perumahan dan kawasan permukiman) mengatakan bahwa :

“...dalam program ini, alas hak atau sertifikat tanah menjadi syarat yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan dapat membuktikannya dengan sertifikat tanah berpotensi besar untuk mendapatkan bantuan bps. dengan kata lain, sertifikat bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga dasar legal yang menentukan kelayakan penerima bantuan” (wawancara pada selasa, 19 agustus 2025)

temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap prosedur administrasi dalam pelaksanaan program bps memiliki keterhubungan erat dengan makna swadaya sebagai bentuk tanggung jawab moral penerima bantuan. kepatuhan tersebut tidak semata-mata muncul karena adanya pengawasan formal dari fasilitator atau tuntutan administratif program, melainkan berangkat dari kesadaran masyarakat untuk menjalankan amanah bantuan secara sungguh-sungguh. dengan demikian, temuan ini secara langsung menjawab rumusan masalah kedua, sekaligus merupakan turunan logis dari rumusan masalah pertama yang menempatkan swadaya sebagai wujud tanggung jawab.

makna swadaya sebagai tanggung jawab membentuk sikap masyarakat untuk bersikap kooperatif dan patuh terhadap ketentuan program, termasuk dalam pemenuhan persyaratan administrasi seperti kelengkapan sertifikat tanah dan dokumen pendukung lainnya. bagi penerima bantuan, kepatuhan terhadap prosedur dipahami sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap keberhasilan program, sekaligus sebagai cara untuk menjaga kepercayaan pemerintah dan fasilitator. dalam konteks ini, swadaya tidak hanya dimaknai dalam bentuk tenaga atau dana, tetapi juga diwujudkan melalui kesediaan meluangkan waktu, tenaga, dan biaya untuk memenuhi prosedur yang ditetapkan.

dalam perspektif interaksionisme simbolik herbert blumer, kepatuhan prosedural dapat dipahami sebagai hasil dari proses interpretasi masyarakat terhadap makna bantuan dan peran mereka sebagai penerima. bantuan bpsps dimaknai sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral, sehingga aturan, prosedur, dan dokumen administratif tidak dipersepsikan sebagai beban semata, melainkan sebagai simbol komitmen dan keseriusan dalam menjalankan program. melalui proses *self-interaction*, masyarakat menilai bahwa kepatuhan terhadap prosedur merupakan tindakan yang tepat dan bermakna untuk menunjukkan bahwa mereka layak dan bertanggung jawab sebagai penerima bantuan. dengan demikian, kepatuhan prosedural merupakan manifestasi simbolik dari makna swadaya sebagai tanggung jawab dalam praktik implementasi program.

namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan adanya ketegangan dalam praktik kepatuhan prosedural. bagi sejumlah kelompok masyarakat penerima, keterbatasan ekonomi dan status kepemilikan lahan menjadi hambatan dalam memenuhi persyaratan administrasi, khususnya terkait sertifikat tanah. kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun masyarakat memiliki kesadaran dan kemauan untuk patuh, kemampuan struktural dan ekonomi tetap menjadi faktor pembatas. dalam konteks ini, kepatuhan tidak semata ditentukan oleh makna tanggung jawab, tetapi juga oleh akses terhadap sumber daya yang memungkinkan masyarakat memenuhi prosedur yang ditetapkan.

implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural dalam program bpsps tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai ekspresi dari makna swadaya sebagai tanggung jawab moral. oleh karena itu, pelaksanaan program perlu mempertimbangkan dimensi makna ini dengan memberikan pendampingan yang lebih sensitif terhadap keterbatasan struktural masyarakat, khususnya dalam pemenuhan persyaratan legal. pendekatan tersebut penting agar tanggung jawab yang dimaknai masyarakat melalui swadaya tidak berubah menjadi beban yang justru menghambat akses terhadap bantuan.

### **3. peningkatan kualitas bangunan**

peningkatan kualitas bangunan merupakan salah satu temuan yang menjawab rumusan masalah kedua dan memiliki keterkaitan langsung dengan rumusan masalah pertama, khususnya makna swadaya sebagai investasi jangka panjang. temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memaknai swadaya semata sebagai pengeluaran tambahan selama proses pembangunan, tetapi sebagai upaya strategis untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan hunian di masa depan. makna tersebut mendorong penerima bantuan untuk melakukan penyesuaian teknis pembangunan, seperti memperkuat pondasi, meninggikan bangunan, atau menerima keterbatasan luasan rumah, dengan pertimbangan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari kualitas bangunan yang lebih baik. gambaran tersebut dapat dilihat dari pernyataan sb penerima

bantuan bsps pada tahun 2024 berumur 54 tahun mengatakan bahwa :

*“...alhamdulillah ini rumah kan sudah tinggi toh ke atas biar mamo itu yang bagian di atas belum selesai belumpi di plester tapi selama le'baki anne dijama tenamo na bambang dudu naung hawana tenamo na lakkung dudu ballaka poeng, kubilang mentong sama tukangku bilang kasi tinggi memang mi biar mi saya perbaiki lagi nanti kalau ada uang yang penting bagus tongmi dipake”* (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).

artinya :

*“...alhamdulillah, rumah ini sudah dibangun lebih tinggi meskipun bagian dinding atas belum selesai dipelester. namun setelah diperbaiki, rumah ini sudah tidak terasa panas lagi dan tidak lembab seperti sebelumnya. karena dulu saya menyampaikan kepada tukang agar bangunannya dibuat tinggi ke atas. jika dana bantuan habis dan bangunan belum sempurna, ke depannya saya akan melanjutkan perbaikan sedikit demi sedikit ketika ada uang yang terpenting rumah ini sudah nyaman untuk ditempati”* (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).

rs penerima bantuan bsps pada tahun 2024 berumur 65 tahun mengatakan juga bahwa :

*“...sebelumna dibangun anne ballaka disuroi rong tawwa appare pondasi, kusuromi anjo tukangku appare pondasi cor naik ka sai anjo riboko ballaka nia rawa rawa punna bosi naiki jekneka jari appasuluma doe nia kapang appa juta nale'ba anjo pondasia, kupikkiri anne punna teai cor napanraki jekne sallang”* (wawancara pada jumat 15 agustus 2025).

artinya :

*“...sebelum pembangunan rumah ini dimulai, kami diminta untuk membuat pondasi terlebih dahulu. saya kemudian menyuruh tukang membuat pondasi cor, karena di belakang rumah ada rawa yang berpotensi menyebabkan banjir saat hujan. untuk itu, saya mengeluarkan biaya sekitar empat juta rupiah hingga pondasi cor tersebut selesai. saya berpikir, jika tidak menggunakan cor, tiang rumah bisa saja rusak ketika banjir datang”* (wawancara pada jumat 15 agustus 2025).

st penerima program bsps pada tahun 2024 berumur 56 tahun mengatakan bahwa :

*“...ini rumah kecil sekali kita lihat nabilang ds juga nakke tongji cakdi ballakku di bandingkan agang-agangku anjo gappaiya tapi erokmi di apa tena pannambaian ka anakku anne bura'nea tena najama nakke poeng ibu rumah tanggaja, ukkurangna anne ballaka empat meterji luasna lima meter mae ri boko”* (wawancara pada jumat 15 agustus 2025).

artinya :

“...seperti yang bisa kita lihat, rumah ini sangat kecil. bahkan fasilitator (ds) juga mengatakan bahwa hanya saya yang memiliki rumah sekecil ini dibandingkan dengan penerima bantuan lainnya. namun apa boleh buat, karena saya tidak punya dana tambahan, anak saya juga penangguran dan saya hanya sebagai ibu rumah tangga. ukuran rumah ini hanya sekitar empat meter ke samping dan lima meter ke belakang” (wawancara pada jumat 15 agustus 2025).

temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas bangunan merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari makna swadaya sebagai investasi jangka panjang. temuan ini secara langsung menjawab rumusan masalah kedua dan memiliki keterkaitan erat dengan rumusan masalah pertama, yang menempatkan swadaya sebagai upaya strategis masyarakat dalam menjamin keberlanjutan hunian. masyarakat tidak memaknai swadaya semata sebagai pengeluaran tambahan selama proses pembangunan, melainkan sebagai keputusan sadar untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketahanan rumah dalam jangka panjang, meskipun harus mengorbankan luasan bangunan atau menunda penyempurnaan fisik rumah.

makna swadaya sebagai investasi jangka panjang membentuk orientasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. penerima bantuan lebih memilih memperkuat pondasi, meninggikan bangunan, atau memperbaiki sirkulasi udara dibandingkan memperbesar luasan rumah. keputusan tersebut menunjukkan bahwa kualitas hunian dipandang lebih penting daripada aspek kuantitatif semata. dalam konteks ini, swadaya dimaknai sebagai bentuk perencanaan masa depan, di mana masyarakat berupaya meminimalkan risiko kerusakan, banjir, atau ketidaknyamanan yang dapat menimbulkan biaya lebih besar di kemudian hari.

dalam perspektif interaksionisme simbolik herbert blumer, makna swadaya sebagai investasi jangka panjang terbentuk melalui proses interpretasi masyarakat terhadap pengalaman hidup dan kondisi lingkungan yang mereka hadapi. risiko banjir, kelembaban rumah, dan pengalaman melihat kerusakan bangunan lain menjadi simbol-simbol yang ditafsirkan secara reflektif oleh masyarakat. melalui proses *self-interaction*, individu menilai bahwa penguatan pondasi, peninggian bangunan, atau penerimaan terhadap keterbatasan luasan merupakan tindakan yang paling rasional dan bermakna. dengan demikian, swadaya tidak hanya berfungsi sebagai tindakan teknis pembangunan, tetapi sebagai simbol kehati-hatian, perhitungan jangka panjang, dan perlindungan terhadap keberlanjutan hunian keluarga.

namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan adanya ketegangan dalam makna swadaya sebagai investasi jangka panjang. tidak semua penerima bantuan memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk melakukan peningkatan kualitas bangunan secara optimal. dalam kondisi tertentu, keterbatasan dana memaksa masyarakat untuk menerima luasan rumah yang lebih kecil atau menunda

penyempurnaan bangunan. ketegangan ini menunjukkan bahwa meskipun swadaya dimaknai sebagai investasi, realisasi investasi tersebut sangat bergantung pada kapasitas ekonomi rumah tangga penerima bantuan.

implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas bangunan dalam program bps tidak dapat dilepaskan dari cara masyarakat memaknai swadaya sebagai investasi jangka panjang. oleh karena itu, implementasi program perlu lebih sensitif terhadap orientasi kualitas yang dimiliki masyarakat dengan memberikan fleksibilitas teknis dan pendampingan yang memungkinkan penerima bantuan memprioritaskan aspek ketahanan dan kenyamanan hunian tanpa harus terbebani secara ekonomi. pendekatan ini penting agar swadaya sebagai investasi tidak berubah menjadi beban, melainkan benar-benar berfungsi sebagai strategi keberlanjutan hunian.

#### **4. kolaborasi dalam implementasi**

kolaborasi dalam implementasi program bps merupakan salah satu temuan yang menjawab rumusan masalah kedua dan memiliki keterkaitan erat dengan rumusan masalah pertama, khususnya makna swadaya sebagai bentuk gotong royong dan solidaritas sosial. temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dan kerabat dalam proses pembangunan rumah tidak semata didorong oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga oleh nilai kebersamaan dan saling membantu yang hidup dalam relasi sosial masyarakat. swadaya dimaknai sebagai upaya kolektif untuk meringankan beban biaya dan pekerjaan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan kemampuan penerima bantuan. gambaran tersebut dapat dilihat dari pernyataan st penerima program bps pada tahun 2024 berumur 56 tahun mengatakan bahwa :

*“anjo waktunna niamo arengku di suruhma abboyo tau untuk anjamai anne ballaka jari kuupayakanggi anjo saribatangku, kakangku siagang andikku na anakku anjamai supaya tena na jai dudu ongkoso ku pasulu”* (wawancara pada jumat 15 agustus 2025).

artinya :

“waktu nama saya sudah ada, saya disuruh mencari tukang untuk mengerjakan rumah ini jadi saya usahakan saudara saya, kakak, adek dan juga anak agar dialah yang mengerjakan rumah ini agar tidak terlalu banyak memakan biaya” (wawancara pada jumat 15 agustus 2025).

sr penerima program bps pada tahun 2023 berumur 65 tahun juga mengatakan bahwa :

*“...dijamana anne ballaka sangning sa'ribatangkuji kukio ambalia ka ngisseng asengji akjari tukang, ka nakana anjo sa'rika nakkemo anjamai*

*ballaka ka ngissengja daripada tau maraeng jai di pasulu doe*" (wawancara pada jumat, 8 agustus 2025).

artinya :

"...pada pengerjaan rumah ini yang menjadi tukang semuanya ialah saudara saya karena kebetulan mereka pintar dalam pengerjaan rumah, karena saudara saya mengatakan dialah saja yang menjadi tukang dari pada mempekerjakan orang lain yang banyak mengeluarkan biaya upah" (wawancara pada jumat, 8 agustus 2025).

seperti yang dialami oleh id penerima bantuan bsps pada tahun 2021 berumur 41 mengatakan bahwa :

*"di rumah ini saya ji yang tinggal sama mama jadi waktu dibangun rumah saya ji yang kerja jadi tukanga toh dibantu sama satu buruh juga, kebetulan juga itu bapak dua kali menikah jadi saudaraku itu yang dari mama pergi berlayar jadi saya mami disini"* (wawancara pada sabtu 16 agustus 2025).

artinya :

"di rumah ini hanya saya dan ibu yang tinggal. jadi, saat rumah ini dibangun, saya sendiri yang mengerjakannya dengan bantuan satu orang buruh. kebetulan ayah saya menikah dua kali, dan saudara saya dari pihak ibu sedang merantau berlayar, jadi hanya saya yang tinggal di sini" (wawancara pada sabtu 16 agustus 2025).

temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam implementasi program bsps merupakan bentuk konkret dari makna swadaya sebagai gotong royong dan solidaritas sosial. temuan ini menjawab rumusan masalah kedua dan memiliki keterkaitan langsung dengan rumusan masalah pertama, yang menempatkan swadaya sebagai praktik kolektif berbasis nilai kebersamaan. keterlibatan keluarga dan kerabat dalam proses pembangunan rumah tidak semata-mata dipicu oleh keterbatasan ekonomi penerima bantuan, tetapi juga didorong oleh relasi sosial yang kuat serta norma saling membantu yang hidup dalam komunitas masyarakat.

makna swadaya sebagai gotong royong membentuk cara masyarakat mengorganisasi pelaksanaan pembangunan rumah secara kolaboratif. keluarga, saudara, dan kerabat diposisikan sebagai aktor utama dalam pengerjaan rumah, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai pendukung proses pembangunan. kolaborasi ini dimaknai sebagai strategi bersama untuk meringankan beban biaya dan pekerjaan, sekaligus sebagai wujud kepedulian sosial antaranggota keluarga. dengan demikian, swadaya tidak dipahami sebagai tanggung jawab individual semata, tetapi sebagai upaya kolektif yang dijalankan melalui kerja sama dan solidaritas sosial.

dalam perspektif interaksionisme simbolik herbert blumer, kolaborasi yang terbangun dalam pelaksanaan program bps merupakan hasil dari proses makna sosial yang terbentuk melalui interaksi antarindividu. bantuan tenaga dari keluarga dan kerabat dimaknai sebagai simbol solidaritas, kepedulian, dan kewajiban moral untuk saling membantu. melalui proses *self-interaction*, masyarakat menafsirkan keterlibatan orang-orang terdekat sebagai tindakan yang wajar dan bermakna dalam konteks keterbatasan yang dihadapi. dengan demikian, kolaborasi tidak hanya berfungsi secara teknis untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga menjadi simbol relasi sosial yang memperkuat nilai gotong royong dalam masyarakat penerima bantuan.

meskipun kolaborasi berbasis gotong royong memberikan manfaat dalam meringankan beban biaya dan tenaga, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan keluarga dan kerabat sangat bergantung pada ketersediaan dan kondisi sosial masing-masing penerima bantuan. dalam beberapa kasus, keterbatasan jumlah anggota keluarga yang dapat membantu menyebabkan penerima bantuan harus mengandalkan tenaga sendiri atau buruh tambahan. hal ini menunjukkan bahwa praktik gotong royong bersifat kontekstual dan tidak selalu dapat diwujudkan secara optimal oleh seluruh penerima bantuan.

implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program bps tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan atau mekanisme administrasi, tetapi juga oleh kuatnya modal sosial berupa gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat. oleh karena itu, pelaksanaan program bps perlu mempertimbangkan dan memfasilitasi pola kolaborasi sosial yang sudah ada, misalnya melalui fleksibilitas pelaksanaan dan pendampingan yang menghargai peran keluarga dan komunitas, sehingga swadaya sebagai gotong royong dapat berfungsi secara optimal tanpa menimbulkan ketimpangan beban antar penerima bantuan.

## **5. motivasi tinggi dalam pembangunan**

motivasi tinggi dalam proses pembangunan rumah merupakan salah satu temuan yang menjawab rumusan masalah kedua dan memiliki keterkaitan erat dengan rumusan masalah pertama, khususnya maknawadaya sebagai identitas dan harga diri. temuan ini menunjukkan bahwa penerima bantuan memaknai swadaya sebagai upaya mempertahankan martabat keluarga dan membangun hunian yang layak untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. makna tersebut mendorong semangat yang kuat dalam menyelesaikan pembangunan rumah, meskipun dengan keterbatasan bantuan dan kebutuhan akan tambahan biaya, sehingga implementasi program bps tidak hanya berlangsung secara teknis, tetapi juga dimaknai sebagai proses pembuktian diri dan penguatan harga diri penerima bantuan. gambaran tersebut dapat dilihat dari pernyataan sr penerima program bps pada tahun 2023 berumur 65 tahun mengatakan bahwa :

*“...wattuna kuisseng kana angngappaya anne bantuan, kukanamo mae risa’ribatangku ngaseng nipattojeng tojengi anne dijama ballaka manna mammo anjo bantuang sike’de ji jari massing massing katemo annambai nakke poeng annambai tong. ka kodi tong punna tena nale’ba le’ba anne ballaka ka muko membara ana anakaji nampammantangi. rannu ma anjo ka gappa tong ja bantuan battu rimarenta angngului anne ballaka jadi haruski dipa’lebba anne ballaka” (wawancara pada jumat, 8 agustus 2025).*

artinya :

*“...begini tahu rumah saya dapat bantuan bsp, saya langsung bilang ke keluarga bahwa kita harus serius kerjakan. walaupun uang dari pemerintah hanya sebagian, saya tambah bersama keluarga yang lain. saya tidak mau rumah ini setengah jadi, karena rumah ini akan jadi tempat tinggal anak cucu saya. justru bantuan ini bikin saya tambah semangat, karena merasa pemerintah sudah membantu duluan, jadi saya wajib melanjutkan” (wawancara pada jumat, 8 agustus 2025).*

sb penerima bantuan bsp pada tahun 2024 berumur 54 tahun juga mengatakan bahwa :

*“...sebenarna punna di rekeng rekeng anne anggaranna bantuannga tena na ganna tapi iami anne bantuannga ansareki semanga ambajiki balla. ka kodi tongi nacini tawwa punna nganu dudu ballaka, caritanna tenamo naki tuna dudu, jari mungkin nia rua pulo anne na le’ba ballaka nijama annambai tongma na inta le’ba” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).*

artinya:

*“...bantuan ini memang belum mencukupi semua kebutuhan, tetapi justru hal itu membuat saya semakin bersemangat. saya merasa malu jika rumah kami tidak layak huni, karena itu bantuan ini membuat kami tidak lagi terlalu hina di mata orang. proses pembangunan rumah ini selesai dalam waktu sekitar 20 hari, sambil saya juga menambahkan biaya agar pengerjaannya bisa lebih cepat” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).*

rs penerima bantuan bsp pada tahun 2024 berumur 65 tahun mengatakan juga bahwa :

*“sanna rannu ku iya wattungna nakana pak hamka na di sare tonga bantuang, jari kukana mo mange ri anakku punna nia sikedde doenu ammalliko bahang anjo kuranga supaya kassaki di pamantangi kulle i nu pake sallang podeng. anne bantuannga battu ri pammarentayya na passumanga’ki, ka sikedde mami usaha siagang tambahan biayana, anne kulle tommaki ammantang ri balla bajik dan menjadi kebanggangmi ri nakke” (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).*

artinya :

“saya sangat bahagia ketika pak hamka memberitahu bahwa saya juga mendapat bantuan. sejak itu, saya bilang ke anak saya, kalau ada sedikit uang, belilah bahan bangunan tambahan supaya rumah ini bisa lebih kuat untuk ditempati. bantuan dari pemerintah membuat kami semakin bersemangat, karena dengan sedikit usaha dan tambahan biaya, rumah ini bisa menjadi tempat tinggal yang lebih layak dan membanggakan bagi keluarga” (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).

temuan penelitian menunjukkan bahwa motivasi tinggi dalam proses pembangunan rumah merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari makna swadaya sebagai identitas dan harga diri masyarakat penerima bantuan bsp. temuan ini secara langsung menjawab rumusan masalah kedua dan memiliki keterkaitan erat dengan rumusan masalah pertama, yang menempatkan swadaya sebagai sarana pembentukan dan penguatan martabat sosial penerima bantuan. bagi masyarakat, keterlibatan aktif dan kesungguhan dalam menyelesaikan pembangunan rumah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menjadi upaya mempertahankan kehormatan keluarga dan meninggalkan hunian yang layak bagi generasi berikutnya.

makna swadaya sebagai identitas dan harga diri membentuk dorongan psikososial yang kuat bagi penerima bantuan untuk menyelesaikan pembangunan rumah secara optimal. rumah dipahami sebagai simbol keberhasilan, kelayakan sosial, dan bukti kemampuan keluarga untuk bangkit dari keterbatasan. oleh karena itu, meskipun dana bantuan terbatas dan memerlukan tambahan biaya pribadi, masyarakat tetap menunjukkan semangat tinggi untuk melanjutkan pembangunan. motivasi tersebut tidak lahir semata dari kebutuhan material, tetapi dari keinginan untuk menghindari stigma sosial, menjaga martabat keluarga, serta memperoleh pengakuan sebagai individu yang mampu mengelola bantuan secara bertanggung jawab.

dalam perspektif interaksionisme simbolik herbert blumer, motivasi tinggi dalam pembangunan rumah dapat dipahami sebagai hasil dari proses makna simbolik terhadap bantuan bsp. dan rumah itu sendiri. rumah yang dibangun melalui swadaya menjadi simbol identitas, keberhasilan, dan nilai diri di mata keluarga maupun lingkungan sosial. melalui proses *self-interaction*, individu menafsirkan bantuan pemerintah sebagai bentuk kepercayaan dan pengakuan awal, yang kemudian memicu kewajiban moral untuk melanjutkan pembangunan secara sungguh-sungguh. respons sosial dari lingkungan baik berupa penghargaan, rasa bangga, maupun potensi penilaian negatif turut memperkuat makna tersebut dan mendorong munculnya motivasi tinggi sebagai ekspresi dari upaya menjaga harga diri.

meskipun motivasi yang tinggi menjadi pendorong utama dalam

pembangunan rumah, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa semangat tersebut sering kali harus berhadapan dengan keterbatasan ekonomi. kondisi ini menuntut masyarakat untuk melakukan pengorbanan tambahan, seperti menambah dana secara bertahap atau melibatkan anggota keluarga. ketegangan ini memperlihatkan bahwa motivasi berbasis harga diri tidak selalu berjalan seiring dengan kapasitas ekonomi, namun justru mempertegas makna swadaya sebagai upaya mempertahankan martabat di tengah keterbatasan.

implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program bsps tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan finansial, tetapi juga pada dimensi psikososial penerima bantuan, khususnya motivasi yang bersumber dari identitas dan harga diri. oleh karena itu, pelaksanaan program bsps perlu mempertimbangkan aspek penguatan motivasi dan martabat penerima bantuan melalui pendekatan pendampingan yang menghargai usaha dan komitmen mereka. pendekatan tersebut penting agar semangat swadaya yang tinggi dapat terus terjaga tanpa berubah menjadi tekanan psikologis atau beban ekonomi yang berlebihan

### **3.4.2 pemahaman masyarakat yang menghambat implementasi program**

makna swadaya dalam program bsps tidak selalu berfungsi sebagai pendorong kelancaran implementasi program, tetapi dalam kondisi tertentu justru dapat menjadi faktor yang menghambat pelaksanaannya. ketika tuntutan swadaya tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi penerima bantuan, swadaya dapat memunculkan tekanan sosial dan psikologis yang signifikan. tekanan tersebut muncul dalam bentuk rasa malu, beban utang, kecemasan terhadap kewajiban membayar upah tukang, serta perasaan terpaksa untuk tetap melanjutkan pembangunan meskipun berada dalam keterbatasan. dalam konteks ini, swadaya tidak lagi dimaknai sebagai partisipasi yang memberdayakan, melainkan sebagai beban yang menimbulkan dilema dan tekanan emosional bagi penerima bantuan.

#### **tekanan sosial dan psikologis**

dalam praktik pelaksanaan program bsps, sejumlah kelompok masyarakat penerima bantuan menghadapi situasi sosial dan psikologis yang memengaruhi cara mereka menjalankan swadaya. tekanan ini muncul dari interaksi sosial dengan lingkungan sekitar serta tuntutan untuk memenuhi kewajiban pembangunan di tengah keterbatasan ekonomi. kondisi tersebut mendorong munculnya perasaan tertekan, dilema dalam mengambil keputusan, dan beban emosional yang memengaruhi keberlanjutan proses pembangunan rumah. dinamika ini terlihat jelas dalam pengalaman yang disampaikan oleh para informan berikut. pandangan tersebut diungkapkan oleh sb penerima bantuan bsps pada tahun 2024 berumur 54 tahun mengatakan bahwa :

*“...sebelumnya memang na pawwang jaki kana anne bantuanga 20 juta*

*siangngmi anjo gaji tukanga jadi memang punna di rekeng-rekeng tena na ganna jari nginranga ri tetangguya” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).*

artinya :

“...sebelumnya kami sudah diberitahu bahwa dana bantuan ini sebesar 20 juta rupiah dan sudah termasuk biaya untuk tukang. jadi, jika dihitung secara keseluruhan memang tidak mencukupi, sehingga kami terpaksa meminjam kepada tetangga” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).

lebih lanjut istri sb mengatakan bahwa :

*“...anne andi perhiasanku lakbusuki ku balukkang tenamo nia ammantang, nampa inrangku ritawwa tena tong pa nalappasa jari kukana ammari mako rong anjama katenamo anne nani pabayara, siri-siri tongki ri tukanga punna tena nibayarak” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).*

artinya :

“...dek, semua perhiasan saya sudah habis terjual, sementara utang saya kepada orang lain juga belum lunas. jadi saya katakan, lebih baik pembangunan ini dihentikan saja karena memang sudah tidak ada dana untuk melanjutkan. lagi pula, kita juga merasa malu kalau tidak mampu membayar ongkos tukang” (wawancara pada sabtu, 16 agustus 2025).

rs penerima bantuan bsp pada tahun 2024 berumur 65 tahun mengatakan juga bahwa :

*“...jai mentongi anne hambatang wattungna di bajiki anne ballaka, ka tena ku nakgala doe wattunna di bajiki jari nginranga kodong ri tetanggaku, erokmi di apa ka haruski di paklekba” (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).*

artinya :

“...banyak sekali hambatan yang saya alami saat memperbaiki rumah ini, karena saya tidak memiliki uang ketika proses perbaikan berlangsung. akhirnya saya terpaksa meminjam kepada tetangga, mau bagaimana lagi, sebab rumah ini harus diselesaikan” (wawancara pada jumat, 15 agustus 2025).

hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap swadaya dalam program bsp tidak selalu berfungsi sebagai sumber pemberdayaan, tetapi dalam kondisi tertentu justru memunculkan tekanan sosial dan psikologis yang menghambat implementasi program. tekanan ini terutama dialami ketika tuntutan swadaya dipersepsikan melebihi kemampuan ekonomi penerima bantuan, sehingga memaksa mereka mencari sumber dana tambahan melalui pinjaman atau pengorbanan aset pribadi. dalam situasi tersebut, swadaya tidak lagi dimaknai

sebagai partisipasi sukarela, melainkan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi agar pembangunan rumah dapat terus berjalan.

dalam perspektif interaksionisme simbolik herbert blumer, makna swadaya terbentuk melalui proses interaksi sosial dan penafsiran subjektif individu terhadap situasi yang mereka hadapi. swadaya tidak hadir sebagai konsep netral, melainkan sebagai simbol sosial yang dimaknai berbeda oleh setiap penerima bantuan berdasarkan pengalaman, kondisi ekonomi, serta relasi sosial di lingkungannya. ketika individu berinteraksi dengan tetangga, tukang, atau pihak lain dalam konteks pembangunan rumah, muncul simbol-simbol sosial seperti *malu*, *utang*, dan *kewajiban moral*, yang kemudian memengaruhi cara mereka memaknai swadaya.

tekanan sosial tampak ketika penerima bantuan merasa harus menjaga citra diri di hadapan tetangga dan tukang, khususnya terkait kemampuan membayar upah kerja. rasa malu untuk menunggak pembayaran atau terus-menerus meminjam kepada lingkungan sekitar membentuk tekanan psikologis yang signifikan. dalam kerangka interaksionisme simbolik, perasaan malu tersebut bukan semata-mata emosi personal, tetapi merupakan hasil dari penilaian sosial yang dibayangkan dan diinternalisasi oleh individu melalui interaksi sehari-hari. makna swadaya kemudian bergeser dari simbol kemandirian menjadi simbol ketidakmampuan, yang berdampak pada munculnya dilema untuk melanjutkan atau menghentikan pembangunan.

lebih jauh, tekanan psikologis juga muncul dari konflik batin antara kebutuhan untuk menyelesaikan pembangunan rumah dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. informan menunjukkan adanya kondisi terpaksa untuk terus melanjutkan pembangunan meskipun berada dalam tekanan ekonomi dan emosional. dalam konteks ini, tindakan melanjutkan pembangunan bukan sepenuhnya didorong oleh motivasi positif, melainkan oleh rasa takut terhadap konsekuensi sosial dan administratif apabila pembangunan terhenti. hal ini menunjukkan bahwa makna swadaya dibentuk secara dinamis melalui situasi problematis yang dihadapi individu, sebagaimana ditegaskan blumer bahwa tindakan manusia didasarkan pada makna yang mereka berikan terhadap situasi, bukan semata-mata pada kondisi objektif.

dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap swadaya dapat menjadi faktor penghambat implementasi program bps ketika makna swadaya lebih banyak dikonstruksi sebagai beban sosial dan psikologis daripada sebagai bentuk partisipasi yang memberdayakan. tekanan yang muncul dari interaksi sosial dan penafsiran subjektif penerima bantuan berimplikasi langsung pada keberlanjutan pembangunan rumah. oleh karena itu, implementasi program tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek teknis dan finansial, tetapi juga dinamika makna dan interaksi sosial yang membentuk pengalaman masyarakat dalam menjalankan swadaya.

tabel 3.3 matriks hasil penelitian

<b>tema</b>	<b>sub tema</b>	<b>implikasi pada implementasi bsp</b>	<b>bukti empiris kunci</b>
<b>makna swadaya yang mendukung implementasi</b>	efisiensi waktu pelaksanaan pembangunan	pembangunan rumah berlangsung lebih cepat dan fleksibel karena penerima bantuan terlibat langsung dalam proses pembangunan dan tidak sepenuhnya bergantung pada tenaga eksternal.	<i>“saya sendiri yang jadi tukangnyanya, bahkan hari libur tetap saya kerjakan sedikit-sedikit” (id, 16 agustus 2025).</i>
	kepatuhan administratif	maknaswadaya sebagai tanggung jawab moral mendorong penerima bantuan menjalankan prosedur administratif secara aktif sebagai bentuk komitmen terhadap program.	<i>“saya langsung ke makassar ambil sertifikat karena diminta fasilitator” (rs, 15 agustus 2025).</i>
	peningkatan kualitas bangunan	swadaya mendorong pengambilan keputusan teknis yang berorientasi pada ketahanan hunian jangka panjang berdasarkan pengalaman risiko lingkungan.	<i>“saya tambah biaya supaya pondasinya dicor, biar kuat kalau banjir” (rs, 15 agustus 2025).</i>
	kolaborasi dalam implementasi	keterlibatan keluarga dan kerabat melalui praktik gotong royong memperkuat pelaksanaan program di tingkat lokal.	<i>“yang kerja semua saudara supaya tidak banyak keluar biaya” (sr, 8 agustus 2025).</i>
	motivasi tinggi dalam pembangunan	makna swadaya sebagai identitas dan harga diri meningkatkan komitmen penerima bantuan untuk menyelesaikan pembangunan rumah secara optimal.	<i>“saya tidak mau rumah ini setengah jadi, karena ini untuk anak cucu” (sr, 8 agustus 2025).</i>
<b>makna</b>	tekanan sosial	ketika swadaya	<i>“lebih baik</i>

<b>swadaya yang menghambat implementasi</b>	dan psikologis	dimaknai sebagai beban ekonomi dan sosial, pelaksanaan program terhambat oleh tekanan utang, rasa malu, dan keterpaksaan.keterpaksaan.	<i>pembangunan ini dihentikan saja karena memang sudah tidak ada dana... kita juga merasa malu kalau tidak mampu membayar ongkos tukang” (istri sb, 16 agustus 2025).</i>
---	----------------	--	---

sumber: hasil olahan data primer 2025

### 3.5 kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana makna swadaya yang dibangun masyarakat berimplikasi pada implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kelurahan pattallasang, dapat disimpulkan bahwa makna swadaya yang dimiliki masyarakat bersifat beragam, dinamis, dan kontekstual, serta berpengaruh langsung terhadap jalannya implementasi program di tingkat lokal.

pertama, swadaya yang berorientasi pada pemberdayaan, yang dimaknai sebagai kemandirian, tanggung jawab, investasi jangka panjang, gotong royong dan solidaritas sosial, serta identitas dan harga diri, terbukti mendukung implementasi program bsp. makna tersebut mendorong efisiensi waktu pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap prosedur administrasi, memperbaiki kualitas dan ketahanan bangunan, memperkuat kolaborasi berbasis keluarga dan kerabat, serta menumbuhkan motivasi tinggi dalam menyelesaikan pembangunan rumah. dalam konteks ini, swadaya berfungsi sebagai modal sosial dan psikososial yang menopang keberhasilan implementasi program.

kedua, swadaya juga dimaknai secara problematis oleh kelompok masyarakat tertentu sebagai beban ekonomi serta tekanan sosial dan psikologis, terutama ketika tuntutan tambahan biaya pembangunan tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi penerima bantuan. makna ini memunculkan tekanan berupa utang, penjualan aset, rasa malu, dan dilema untuk melanjutkan atau menghentikan pembangunan rumah. kondisi tersebut berimplikasi pada terhambatnya proses implementasi program dan menempatkan penerima bantuan dalam posisi yang rentan secara ekonomi maupun emosional.

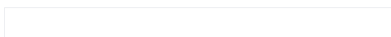
ketiga, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bsp tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis dan administratif, melainkan sangat dipengaruhi oleh konstruksi makna sosial yang dilekatkan masyarakat pada konsep swadaya. dalam perspektif interaksionisme simbolik,

makna swadaya terbentuk melalui interaksi sosial, pengalaman hidup, dan penafsiran subjektif masyarakat terhadap bantuan, kondisi ekonomi, serta relasi sosial di lingkungan mereka. Oleh karena itu, swadaya dapat berfungsi sebagai mekanisme pendukung atau justru sebagai mekanisme pembatas dalam implementasi program, tergantung pada bagaimana makna tersebut dikonstruksi dan dialami oleh penerima bantuan.

dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program bsps di kelurahan pattalassang tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan dan mekanisme kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan program dalam memahami dan mengelola makna swadaya yang dibangun masyarakat. pemahaman terhadap dimensi makna ini menjadi kunci penting agar implementasi program dapat berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, serta tidak menimbulkan beban sosial maupun ekonomi yang berlebihan bagi masyarakat penerima bantuan.

### 3.6 daftar putaka

- berger, p. l., & luckmann, t. (1966). *the social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge*. doubleday.
- blumer, h. (1969). *symbolic interactionism: perspective and method*. university of california press.
- butler, j. (1990). *gender trouble: feminism and the subversion of identity*. new york: routledge.
- chambers, r. (1997). *whose reality counts? putting the first last*. london: intermediate technology publications.
- cooley, c. h. (1902). *human nature and the social order*. new york: scribner's sons.
- creswell, j. w. (2018). *research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. thousand oaks, ca: sage publications.
- creswell, j. (2013). *penelitian kualitatif & desain riset; memilih di antara lima pendekatan*. pustaka belajar.
- direktorat jenderal perumahan. (2020). *petunjuk teknis pelaksanaan bps*. jakarta: kementerian pupr.
- geertz, c. (1983). *local knowledge: further essays in interpretive anthropology*. new york: basic books.
- goffman, e. (1963). *stigma: notes on the management of spoiled identity*. englewood cliffs, nj: prentice-hall.
- gunawan, i. (2013). *metode penelitian kualitatif teori dan praktik*. pt. bumi aksara.
- hadi, s., sutopo, h. b., & widodo, s. (2021). *metodologi penelitian kualitatif: teori dan praktik*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- hall, s. (1996). *"who needs identity?" dalam questions of cultural identity*, ed. stuart hall & paul du gay. london: sage.
- hazni, hayati, f., & mutiawati, y. (2023). analisis kegiatan main peran makro untuk menstimulasi percaya diri pada anak usia 4-5 tahun di tk cinta ananda banda aceh. *jurnal ilmiah mahasiswa*, 4(1), 1–10.
- jenkins, r. (2008). *social identity (3rd ed.)*. london: routledge.
- kaharuddin. (2021). *metode penelitian kualitatif: panduan untuk penelitian lapangan*. jakarta: rajawali pers.
- khalawati, a. (2023). konstruksi sosial penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya (bps) sebagai identitas sosial: studi kasus desa pendem, kecamatan mojogedang, kabupaten karanganyar. *development*



and social change, 6(2), 92-110

- komariah, d. s. dan a. (2010). metodologi penelitian kualitatif,. alfabeta.
- kurniasih, i., & prasetyo, y. (2021). peran aktor dalam pelaksanaan program perumahan swadaya di daerah perdesaan. jurnal ilmu pemerintahan, 101–113.
- kusnadi. (2010). akar kemiskinan dan strategi pemberdayaan. malang: lembaga penerbitan universitas muhammadiyah malang.
- maswandhani, d., & victor, l. (2024). implementasi program bsps dalam penyediaan rumah layak huni di balai kasih kecamatan kuala langkat, 10-13.
- mead, g. h. (1934). mind, self, and society from the standpoint of a social behaviorist. university of chicago press.
- miles, m. b., huberman, a. m., & saldana, j. (2014). qualitative data analysis: a methods sourcebook. sage publications, inc.
- nurhaya. (2024). kebijakan bantuan stimulant perumahan swadaya (bsps) untuk rumah layak huni di desa lara kabupaten mamuju tengah, 14-17
- radjab, m. (2014). bahan ajar metode penelitian kualitatif. jurusan sosiologi fisip unhas.
- rijali, a. (2019). analisis data kualitatif. alhadharah: jurnal ilmu dakwah, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- samsu. (2017). metode penelitian teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif methods, serta research dan development. pusaka.
- turner, j. f. c. (1976). *housing by people: towards autonomy in building environments*. london: marion boyars.
- umiarso, & elbadiansyah. (2014). interaksionisme simbolik dari era klasik hingga modern. jakarta: rajagrafindo persada.
- uphoff, n. (1992). *local institutions and participation for sustainable development*. gatekeeper series no. 31, international institute for environment and development.
- walgito, b. (2003). pengantar psikologis umum. yogyakarta: andi offset.
- wibowo, t., & ramadhan, f. (2019). evaluasi program bsps di kawasan perdesaan provinsi jawa tengah. jurnal rekayasa perumahan, 14(1),

